



UNIVERSITAS INDONESIA

**POTENSI ANCAMAN SEPARATIS
GERAKAN PAPUA MERDEKA TERHADAP NKRI**

TESIS

**VEMMY RICHARD
NPM : 0806449576**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN**

**JAKARTA
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**POTENSI ANCAMAN SEPARATIS
GERAKAN PAPUA MERDEKA TERHADAP NKRI**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
Pada Program Pascasarjana Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia**

**VEMMY RICHARD
NPM : 0806449576**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN**

**JAKARTA
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : VEMMY RICHARD

NPM : 0806449576

Tanda Tangan :

Tanggal : 4 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

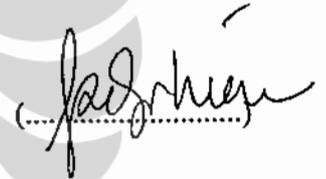
Tesis ini diajukan oleh

Nama : Vemmy Richard
NPM : 0806449576
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Intelijen
Judul Tesis : POTENSI ANCAMAN SEPARATIS GERAKAN PAPUA MERDEKA TERHADAP NKRI

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Intelijen pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Intelijen Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. F. Iriani Sophiaan Yudhoyoko, M.Si



(.....)

Pembimbing : Joko Kusnanto Anggoro, Ph.D



(.....)

Penguji : Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si



(.....)

Ditctapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, atas limpahan berkatnya penulis berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul : POTENSI ANCAMAN SEPARATIS GERAKAN PAPUA MERDEKA TERHADAP NKRI. Penulisan tesis ini bertujuan sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar Magister Intelijen pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Program Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik dalam proses persiapan, bimbingan penulisan, hingga terselesaikannya tesis ini dalam waktu yang telah ditentukan. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada :

1. Saudaraku, Yacob Palyama (almarhum) yang memiliki impian dan cita-cita melihat perdamaian di Papua dan peningkatan kehidupan masyarakat Papua.
2. Kedua orang tuaku dan adikku yang selalu mendukung dan menjadi sumber inspirasi dan semangat dalam penyelesaian pendidikan di Universitas Indonesia.
3. Terkhusus untuk Adinda tercinta, Helena Patricia yang selalu setia menemani dan memberikan waktu, tenaga, dukungan dan perhatiannya selama proses penyusunan tesis.
4. Bapak Joko Kusnanto Anggoro, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan, waktu, bimbingan, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.
5. Dra. F. Iriani Sophiaan Yudhoyoko, MSi selaku Ketua Jurusan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyusun tesis ini hingga selesai tepat pada waktunya.
6. Dr. Margareta Hanita, S.H., M.Si, selaku penguji yang telah memberikan ide-ide pemikiran dan pencerahan kepada penulis dalam proses akhir penyusunan tesis ini.
7. Segenap jajaran Sekretariat Kajian Strategik Intelijen Pascasarjana Universitas Indonesia, Pak Faisal, Mas Wing dan Mba Eni atas bantuan

dan dukungannya kepada penulis selama pendidikan di Kajian Strategik Intelijen Pascasarjana Universitas Indonesia, serta dosen-dosen di Kajian Strategik Intelijen Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang menjadi bekal berharga bagi penulis.

8. Sahabat dan rekan-rekan seangkatan, Cus, Mama Loren, Logan, Z, Ucup, Sukron, Machzan, Bimo, Duen, Wardi serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan disini satu persatu, saya sangat berterimakasih atas dukungannya.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

Namun dengan keterbatasan yang dimiliki penulis, tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritikan maupun saran yang membangun dari semua pihak, akan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan ini di waktu mendatang. Akhir kata, saya berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 4 Januari 2011

Vemmy Richard

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vemmy Richard
NPM : 0806449576
Program Studi : Kajian Stratejik Intelijen
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **POTENSI ANCAMAN SEPARATIS GERAKAN PAPUA MERDEKA TERHADAP NKRI**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2011
Yang menyatakan

(Vemmy Richard)

ABSTRAK

Nama : Vemmy Richard
Program Studi : Kajian Strategik Intelijen
Judul : POTENSI ANCAMAN SEPARATIS GERAKAN PAPUA MERDEKA TERHADAP NKRI

Tesis ini membahas tentang ancaman separatistis yang ditimbulkan oleh Gerakan Papua Merdeka terhadap kedaulatan NKRI. Ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat Papua sejak paska penjajahan Belanda menimbulkan keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam penyebab munculnya keinginan untuk memisahkan diri tersebut, salah satu yang utama karena masyarakat Papua menganggap bahwa pemerintah pusat belum mampu menyejahterakan rakyat Papua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dan penelitian intelijen strategik.

Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketidakpuasan masyarakat Papua dapat mengancam stabilitas dan kedaulatan NKRI. Keinginan untuk memisahkan diri tersebut muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpuasan, marginalisasi budaya dan sosial, eksplorasi SDA, pelanggaran HAM serta adanya dukungan dari dunia internasional. Oleh karena itu pemerintah perlu menerapkan strategi kebijakan yang tepat untuk mengeliminir Gerakan Papua Merdeka.

Kata kunci :
Separatis, Papua, Disintegrasi Nasional, Ancaman Nasional

ABSTRACT

Name : Vemmy Richard
Study Program : Intelligence Strategic Study
Title : POTENTIAL SEPARATIST THREAT OF PAPUA
FREEDOM MOVEMENT AGAINST NKRI

This thesis discusses about separatist threat posed by Papua Freedom Movement against sovereignty of NKRI. Dissatisfaction felt by the people of Papua from Dutch colonial post raises a desire to secede from The Republic of Indonesia. Various causes emerge of the desire to secede, one of the main because of the Papuan people assume that the central government has not been able to provide welfare for the Papuans. This study was a qualitative research with descriptive analysis design and strategic intelligence research.

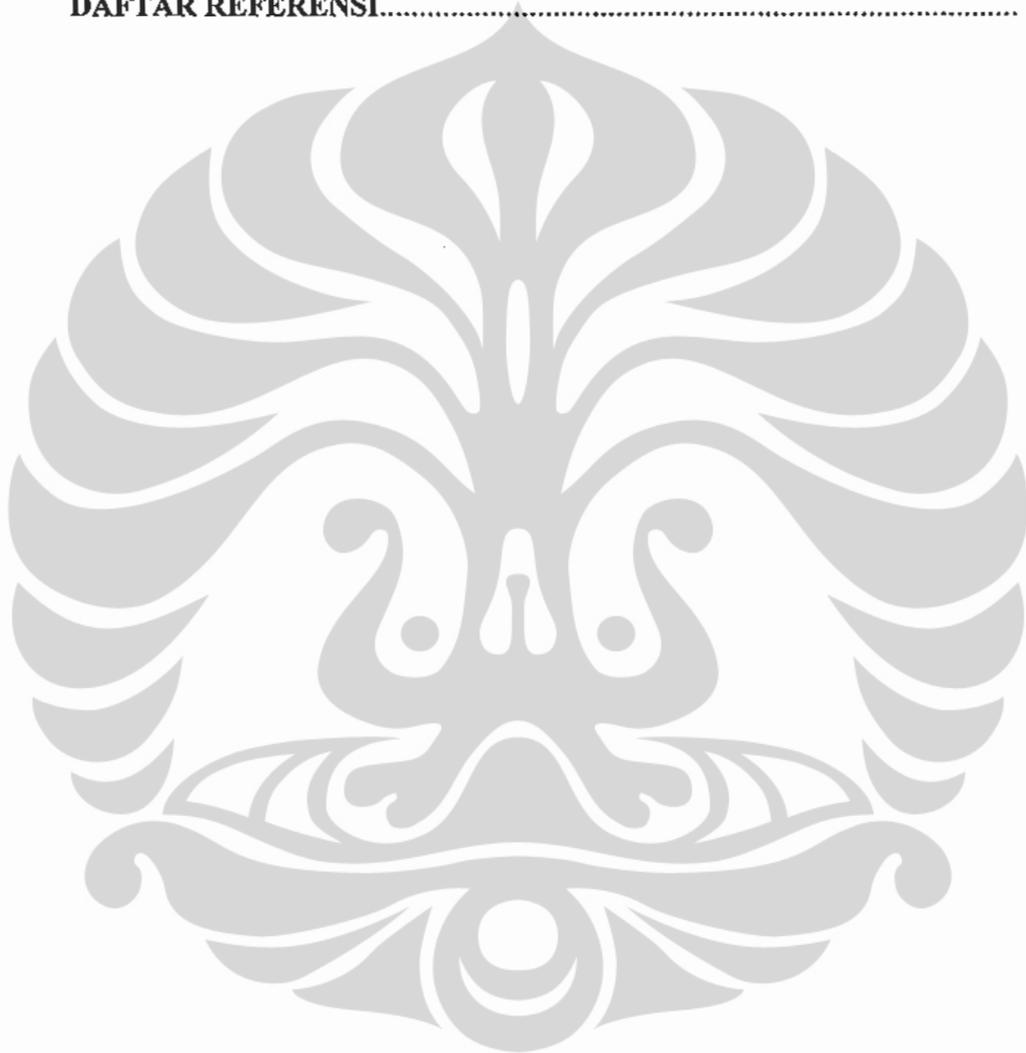
The results of this study suggest to the central government that the dissatisfaction of the Papuans could threaten the stability and sovereignty of the Republic of Indonesia. The desire for secession is emerging as a result of dissatisfaction, social and cultural marginalization, exploration of natural resources, human rights violations and the support from the international community. Therefore, government needs to implement appropriate policy strategies to eliminate the Papua Freedom Movement.

Keyword :
Separatist, Papua, National Disintegration, National Threat,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Kajian Pustaka.....	4
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
2. LANDASAN TEORI	11
2.1. Teori Deprivasi.....	11
2.2. Teori Insurgensi/Separatis	18
2.3. Teori Ethnicity.....	20
2.4. Teori Integrasi Politik.....	22
2.5. Konsep Keamanan dan Ancaman Nasional.....	25
2.6. Teori Konflik dan Resolusi Konflik.....	27
2.6.1. Teori Konflik.....	27
2.6.2. Resolusi Konflik.....	29
3. POTENSI ANCAMAN GERAKAN PAPUA MERDEKA	30
3.1 Perkembangan Gerakan Papua Merdeka	30
3.1.1 Sejarah Integrasi Papua.....	30
3.1.2 Perkembangan Isu Separatis	34
3.1.3 Faktor-Faktor yang Memperkuat Upaya Separatis	38
3.1.4 Aktivitas Politik Gerakan Papua Merdeka.....	50
3.1.5 Aktivitas Bersenjata Gerakan Papua Merdeka.....	56
3.2 Upaya Internasionalisasi Gerakan Papua Merdeka	62
3.3 Reaksi Negara Pasifik Terhadap Gerakan Papua Merdeka	69
3.3.1 Reaksi Negara-Negara Pasifik	70
3.3.2 Reaksi Negara dan Kelompok Lain.....	79
4. ANALISIS ANCAMAN GERAKAN PAPUA MERDEKA	81
4.1. Keinginan Papua untuk Merdeka	81

4.2. Proses Integrasi Nasional Papua	85
4.3. Ancaman gerakan Papua Merdeka	88
4.4. Kebijakan Pemerintah Terhadap Negara Pasifik	92
5. PENUTUP	99
5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Saran	100
DAFTAR REFERENSI	103



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Irian Barat berintegrasi dengan Indonesia sejak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat melalui suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) kepada Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.¹ Meski demikian, status Irian Barat akan benar-benar jelas setelah adanya jajak pendapat yang dalam klausul III *New York Agreement*, disebutkan harus selambat-lambatnya akhir tahun 1969 dibawah pengawasan PBB. Hasil jajak pendapat atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang telah disahkan oleh PBB melalui resolusi 2504 maka Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari NKRI dan ditetapkan menjadi Provinsi Irian Jaya. Pada masa berikutnya ketika nama Irian Jaya dirubah menjadi Papua

Gerakan separatis menentang Pemerintah Indonesia dimulai ketika terjadi penyerangan oleh suku Arfak terhadap Batalyon 751 (Brawijaya) di Manokwari pada 26 Juli 1965. Gerakan ini dipimpin oleh Sersan Mayor Parmenes Ferry Awom, yang merupakan bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua (PVK atau *Papoea Vrijwilligers Korp*) bentukan Belanda. Penyerangan itu dipicu oleh penolakan para anggota PVK Batalyon Papua dari suku Arfak dan Biak untuk didemobilisasi, serta penahanan orang-orang yang mengeluh pada penguasa setempat karena pengangguran yang tinggi dan kekurangan pangan di kalangan suku tersebut. Sejak saat itulah muncul pemberontakan yang bersifat sporadis dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menginginkan kemerdekaan Papua. Pemberontakan OPM tersebut mengalir ke seluruh kabupaten di Irian Jaya seperti Biak-Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Japen-Waropen, Merauke Jayawijaya, dan Jayapura.²

OPM adalah nama yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada setiap organisasi atau faksi baik di Irian Jaya maupun di luar negeri yang

¹ Jhon RG Djopari, "Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka", Jakarta: PT Gramedia (1993), hlm. 1.

² Syamsul Hadi, et. al, "Disintegrasi Pasca Orde Baru, Negara Konflik Lokal dan Dinamika International", Jakarta : Center for International Relation Studies FISIP UI (2006), hlm. 102.

dipimpin oleh putra-putra Irian Jaya pro-Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Irian Jaya (West Papua) lepas dari NKRI.³ Nama OPM pertama kali dikenal di Manokwari pada tahun 1964 ketika penangkapan pimpinan "Organisasi dan Perjuangan menuju Kemerdekaan Papua", Terianus Aronggear dan kawan-kawannya. Nama itu juga semakin populer yaitu pada saat meletusnya pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh Permenas Ferry Awom pada tahun 1965 di Manokwari, serta berbagai pemberontakan atau aksi militer sporadis lainnya diberbagai wilayah di Irian Jaya.

Kegiatan militer OPM di bawah komando Tentara Nasional Papua (TPN). TPN dalam pergerakannya dibantu oleh *Papua Intelligence Service* (PIS) yang melakukan kegiatan rahasia. Gerakan ini berkembang dari nasionalisme Papua yang sudah dikembangkan oleh Belanda dengan mendirikan partai politik, pendirian sekolah Pamong Praja, pembentukan *Nieuw Guinea Raad* pada 1 April 1961, dan pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1961.⁴ Rasa nasionalisme Papua tersebut diturunkan terus-menerus, sehingga membuat ideologi kemerdekaan Papua sangat mudah berkembang di hati rakyat Papua.

"Sekarang adalah zaman kemerdekaan. Bangsa Indonesia dan bangsa Papoe adalah soedara. Di dalam zaman kemerdekaan ini, bangsa Indonesia dan bangsa Papoe berdiri sama tinggi, dan doedoek sama rendah. Bangsa Indonesia tidak boleh memonopoli kekoesaan, posisi jabatan, kekajaan, sedangkan bangsa Papoe tidak mendapatkan apa-apa. Djika persoalan-persoalan terseboet masih ada, maka selama itu poela akan tetap ada permasalahan antara bangsa Indonesia dengan bangsa

³ Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) diciptakan oleh para penegak hukum Indonesia ketika memproses peradilan Terianus Aronggear pada 1964 yang memimpin kelompok Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat. Sejak itu nama OPM dipakai oleh kelompok-kelompok yang kegiatannya menentang pemerintah RI. Lihat John R.G. Djopari, "Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka", Jakarta: PT Gramedia (1993) hal. 100-101.

⁴ Riza Sihbudi, et.al., "Bara Dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah dan Solusi Atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau", Bandung: Penerbit Mizan (2001), hlm. 122.

Papoea.” (Marcus Kaisiepo dalam majalah *Penjoeloeh*, Australia ed. September 1945)⁵

“Selama tigapuluh lima tahun proses pembangunan di tanah Papua, ia tidak ubahnya hanya dijadikan ideologi dan kebijakan yang dipaksakan, dan karena itu membuat orang Papua merasa terbuang dari tanahnya. Tidak heran bila ujung-ujungnya pembangunan di tanah Papua ini justru dilihat sebagai penjajahan. Akibatnya, ramai-ramailah mereka minta merdeka.” (wawancara dengan Pdt Herman Saut di Jayapura)⁶

Dua buah pernyataan diatas, Marcus Kaisiepo dan Pdt Herman Saut, menunjukkan perkembangan yang terjadi di Papua kurang signifikan bagi masyarakat Papua, baik awal kemerdekaan Indonesia maupun paska kemerdekaan Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan sekian banyak dari jeritan dan isi hati masyarakat Papua mengenai nasib mereka yang termarginalisasi di tanah mereka sendiri. Aspirasi tersebut kemudian diwujudkan melalui aksi protes bahkan hingga aksi perlawanan bersenjata, dengan tujuan merdeka dari NKRI. Isu-isu Papua merdeka semasa Orde Baru diredam secara represif oleh pemerintah dengan pengiriman TNI dan status Darurat Operasi Militer, sedangkan di era Reformasi diberlakukan Otonomi Khusus bagi Papua, bahkan Presiden Abdurachman Wahid memberikan kebebasan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora dan pelaksanaan Kongres Papua tahun 2000. Akan tetapi, hal tersebut tidak menurunkan intensitas usaha-usaha kelompok OPM untuk memisahkan diri dari NKRI. Hal ini menjadikan Gerakan Papua Merdeka atau OPM salah satu ancaman potensial bagi stabilitas dan keutuhan NKRI.

1.2. Perumusan Masalah

Berbagai usaha pemerintah dari tahun 1965 hingga sekarang masih belum mampu meredam keinginan masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari NKRI. Gerakan Papua Merdeka bukan semakin mengecil tetapi semakin berkembang,

⁵ Dhuroruddin Mashad dan Ikar Nusa Bakti, “Berbagai Faktor Separatis di Irian Jaya”, Indonesia di Ambang Perpecahan, Jakarta: LIPI (), hlm. 175.

⁶ *Ibid* hlm. 176.

bahkan memiliki sayap-sayap organisasi di luar negeri. Gerakan Papua Merdeka secara langsung merupakan ancaman bagi tegaknya NKRI, keinginan untuk mendirikan negara didalam sebuah negara berdaulat merupakan ancaman langsung bagi kedaulatan dan keberlangsungan negara tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Gerakan Papua Merdeka merupakan ancaman bagi kedaulatan NKRI.”** Kemudian diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Seberapa besar potensi ancaman Gerakan Papua Merdeka terhadap kedaulatan NKRI?
2. Bagaimana strategi kebijakan pemerintah terhadap penyelesaian Gerakan Papua Merdeka?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penyusunan tesis ini sebagai upaya menjawab permasalahan strategi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan gerakan-gerakan separatis di Indonesia. Pemerintah dapat menentukan rumusan-rumusan strategi yang dapat digunakan dalam menentukan setiap kebijakan yang akan diambil dalam mengatasi gerakan separatis di Indonesia. Selain itu juga, pemerintah dapat mengantisipasi dan meredam kemungkinan berkembangnya gerakan separatis baru yang bertumbuh dan berkembang di wilayah NKRI.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian stratejik intelijen ini pada dasarnya merupakan produk intelijen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah (*intelijen user*) dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait dengan permasalahan terkait gerakan separatis di Indonesia pada umumnya, dan Gerakan Papua Merdeka pada khususnya.

1.5. Kajian Pustaka

- a. Teori Deprivasi

Ted Robert Gurr dalam "Why Men Rebel", menjelaskan dasar dari asal muasal konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia. Teori inti dari Gur adalah teori deprivasi (theory of deprivation), dimana menjelaskan bahwa "The widespread perception of relative deprivation leads to discontent, which lead to politization of discontent, which tends to lead to political violence." (Gurr, 1970:12-13) Saya menggarisbawahi bahwa Gur menyatakan bahwa deprivasi (kekurangan) yang dirasakan seseorang atau sekelompok orang bersifat relatif. Hal ini kemudian dijelaskan lebih jauh dalam pengertian yang tertuang dalam dua buah nilai yaitu value expectations dan value capabilities.

"Relative deprivation itself defined as perceived discrepancy between (people's) value expectations and their value capabilities." (Gurr, 1970:13) Nilai ekspektasi merupakan sebuah hal dan kondisi dimana manusia merasa berhak untuk mendapatkannya, sedangkan nilai kapabilitas merupakan sebuah hal dan kondisi dimana manusia merasa mampu mendapatkan dan mempertahankan yang memberikan arti sosial bagi mereka. Terdapat dua arti penting dari pengertian tersebut, yaitu pertama, ekspektasi harusnya hanya ekspektasi, manusia bukan hanya menginginkan sesuatu tetapi juga berpikir mereka "berhak" atas hal tersebut, kedua, seluruh konsep yang diketengahkan oleh Gurr berdasarkan pada "persepsi" manusia bukan pada bagaimana sebuah hal terjadi pada kenyataannya. Hal ini kemudian membawa pada kontribusi Gurr dalam studi teori konflik yaitu "focusing on the dynamics of human behavior as dictated by peoples perception of the world." Teori ini kemudian menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara ekspektasi dan kapabilitas, yaitu decremental deprivation, aspirational deprivation, dan progressive deprivation.

Decremental deprivation kondisi dimana nilai ekspektasi kelompok relative konstan sedangkan nilai kapabilitasnya menurun. Aspirational deprivation kondisi dimana nilai kapabilitas relatif stabil sedangkan nilai ekspektasi cenderung naik atau menguat. Terakhir, progressive deprivation kondisi dimana nilai ekpektasi naik secara simultan dan signifikan sedangkan nilai kapabilitas malah berkebalikan. Gurr menyatakan bahwa sifat dari kesemuanya itu hanya sementara, dalam jangka panjang/jangka waktu tertentu nilai ekspektasi cenderung beradaptasi dengan nilai kapabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi

kekuatan dan ketiga bentuk relative deprivation adalah (1) tingkat rata-rata perbedaan, (2) tingkat kepentingan dari nilai yang dipengaruhi perbedaan, (3) jumlah atau proporsi nilai kelas yang dipengaruhi perbedaan, dan (4) waktu.

Gurr menawarkan bahwa dalam masyarakat heterogen, tingkatan intensitas terbesar relative deprivation bila dihubungkan terhadap perbedaan yang mempengaruhi nilai ekonomi, kemudian bila dihubungkan terhadap nilai keamanan dan komunitas, dan terakhir bila dihubungkan nilai partisipasi, kesadaran diri, status atau koherensi ideational. Seiring berlalunya waktu, intensitas relative deprivation pertama-tama mengalami kenaikan kemudian menurun. Kepentingan sebuah posisi nilai berubah secara positif dan langsung terhadap "usaha yang diinvestasikan dalam meraih atau mempertahankan posisi yang diinginkan." Kemudian dengan memperhatikan aspirational deprivation, "pengalaman pertama yang dialami adalah kedekatan dengan posisi nilai yang diinginkan pada saat terjadi perbedaan" memperkuat hasil yang terjadi adalah frustrasi.

Kekuatan relative deprivation untuk sebuah kolektif/komunitas dijabarkan dalam rata-rata jumlah kemarahan yang dirasakan oleh seluruh anggota kolektif/komunitas. Ini merupakan komponen psikologi. Berapa banyak anggota dari kolektif yang terpengaruh oleh kemarahan hasil dari relative deprivation merupakan pertanyaan ruang lingkup dan ini komponen sosiologi. Dalam sebuah lingkungan beberapa orang akan merasakan depresi terhadap sesuatu hal. Langkah pertama untuk menganalisa potensi aksi kolektif dengan cara menentukan proporsi dari populasi yang merasakan hal yang sama, hal tersebut adalah rasa keterbuangan/kerugian/keterampasan yang dirasakan terus menerus (intens).

b. Teori Insurgensi/Separatis.

Insurgency bisa didefinisikan sebagai perjuangan antara pihak yang tidak berkuasa dengan pihak penguasa, dimana pihak yang tidak berkuasa menggunakan secara sadar kemampuan politiknya; seperti para ahli yang teroganisir, media propaganda, dan demonstrasi, dan penggunaan kekerasan yang bertujuan menghancurkan, mengformulasi ulang, atau mempertahankan satu atau beberapa aspek dasar legitimasi politik. Legitimasi merupakan pernyataan yang

sering digunakan untuk memposisikan keberadaan aspek politik bermoral atau tidak –benar atau salah–oleh populasi atau bagian tertentu dari populasi (komunitas). Berdasarkan penelitian, terdapat tujuh tipe gerakan insurgensi yaitu anarkis, egalitarian, tradisional, pluralis, secessionis, reformis, dan konservasionis.

c. Konsep Ancaman Nasional

Ancaman adalah suatu hal, kejadian, tindakan yang bisa membahayakan, menyulitkan, mengganggu menimbulkan rasa takut, merugikan, dan lain- lain. Menhankam/ Pangab (1975) menyatakan bahwa ancaman merupakan suatu usaha yang bersifat merubah atau merombak kebijakan secara konsepsional dari sudut kriminal ataupun politis. Tantangan merupakan suatu usaha yang bersifat menggugah kemampuan. Hambatan adalah suatu yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi kebijakan, yang tidak bersifat konsepsional berasal dari diri sendiri. Gangguan adalah suatu usaha dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi kebijakan yang tidak bersifat konsepsional.⁷ Keempat hal ini biasa dikenal dengan sebutan ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan).

Ancaman adalah pelbagai situasi, kondisi, tindakan baik alamiah atau hasil rekayasa, berbentuk fisik atau non fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, baik langsung maupun tidak langsung, yang diantisipasi sebagai potensi ancaman yang dapat mengganggu, menghambat, mengubah, merusak, menghancurkan identitas, integritas, eksistensi, kepentingan, perjuangan, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pencapaian tujuan nasional.⁸

Ancaman juga diartikan sebagai setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa serta kepenetinan nasional.

⁷ Irawan Sukarno, "Ancaman Potensial dan Strategi Penangkalan", SESPARLLU XXX dan SEDILU XXXII 2004, Hlm. 2.

⁸ Ikshanudin, et. Al, "Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Intelijen Negara", Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2010, Hlm. 7.

Ancaman terhadap NKRI adalah suatu hal yang dapat membahayakan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang, ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan kemanan, yang datangnya baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.⁹

Dalam kehidupan kenegaraan, dikenal adanya ancaman nyata, ancaman konkrit seperti ancaman nyata (ancaman konkrit) seperti ancaman fisik, serangan militer, embargo, boikot, *travel warning*. Selain itu ancaman yang tidak nyata (tidak konkrit) karena tidak kelihatan seperti subversi dan infiltrasi. Selain itu dari segi asal dari mana ancaman datang, bisa disebut ancaman dari luar negeri dan ancaman dari dalam negeri. Melihat jenis ancaman tersebut, tentu saja kadarnya tidak sama.¹⁰

Mengetahui kadar ancaman, sejauh mana tingkat bahaya ancaman tersebut, tentu amat diperlukan. Dalam menghadapi ancaman harus sesuai dengan porsi dan proporsional, serta tidak over dosis agar tidak menimbulkan masalah baru yang bisa kontra produktif. Untuk mengukur tingkat ancaman ada banyak cara. Pandangan Mr Robert yang dikenal dengan sebutan *Robert Ring* adalah salah satu ukuran untuk tingkat ancaman. Pengklasifikasian ancaman menurut Robert Ring ini terbagi menjadi minor, moderat, serius, dan kritis.¹¹

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini merupakan uraian metode-metode yang akan diambil dalam upaya mewujudkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi naskah peraturan perundang-undangan, studi literatur, kajian pustaka penelitian terdahulu, serta bahan bacaan lainnya termasuk media cetak dan elektronik.

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian ini berusaha merumuskan strategi dan kebijakan yang digunakan pemerintah dalam rangka penyelesaian masalah

⁹ *Op.cit.* Sukarno. Hlm. 3.

¹⁰ Supono Sugirman, "Analisis Intelijen sebuah Kontemplasi", Jakarta: Centre For the Study of Intelligence and Counterintelligence, 2009, Hlm. 297.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 298

separatis di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta data-data sekunder dari instansi pemerintah terkait.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman tesis maka disusun sistematika penulisan yang merupakan uraian berupa urutan penulisan setiap bab dan bagiannya sehingga dapat dicapai uraian dan analisis yang lengkap dalam perumusan strategis. Uraian penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I menguraikan secara lengkap latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan beberapa teori sebagai landasan teori pembahasan. Landasan teori menguraikan teori deprivasi, konsep ancaman dan keamanan nasional, teori insurgensi serta teori ethnicity.

Bab III menguraikan tentang gambaran umum dan sejarah singkat Gerakan Papua Merdeka, selain itu juga menggambarkan perkembangan Gerakan Papua Merdeka serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kekuatannya.

Bab IV menguraikan analisis langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dalam upaya membuat strategi dan kebijakan terkait mengatasi permasalahan Gerakan Papua Merdeka.

Bab V menguraikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran yang berisi rekomendasi mengenai strategi penyelesaian permasalahan Gerakan Papua Merdeka.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Teori Deprivasi

Ted Robert Gurr dalam “Why Men Rebel”, menjelaskan dasar dari asal muasal konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia. Teori inti dari Gur adalah teori deprivasi (*theory of deprivation*), dimana menjelaskan bahwa “The widespread perception of relative deprivation leads to discontent, which lead to politization of discontent, which tends to lead to political violence.” (Gurr, 1970:12-13) Saya menggarisbawahi bahwa Gur menyatakan bahwa deprivasi (kekurangan) yang dirasakan seseorang atau sekelompok orang bersifat relatif. Hal ini kemudian dijelaskan lebih jauh dalam pengertian yang tertuang dalam dua buah nilai yaitu *value expectations* dan *value capabilities*.

“Relative deprivation itself defined as perceived discrepancy between (people’s) value expectations and their value capabilities.” (Gurr, 1970:13) Nilai ekspektasi merupakan sebuah hal dan kondisi dimana manusia merasa berhak untuk mendapatkannya, sedangkan nilai kapabilitas merupakan sebuah hal dan kondisi dimana manusia merasa mampu mendapatkan dan mempertahankan yang memberikan arti sosial bagi mereka. Terdapat dua arti penting dari pengertian tersebut, yaitu pertama, ekspektasi harusnya hanya ekspektasi, manusia bukan hanya menginginkan sesuatu tetapi juga berpikir mereka “berhak” atas hal tersebut, kedua, seluruh konsep yang diketengahkan oleh Gurr berdasarkan pada “persepsi” manusia bukan pada bagaimana sebuah hal terjadi pada kenyataannya. Hal ini kemudian membawa pada kontribusi Gurr dalam studi teori konflik yaitu “focusing on the dynamics of human behavior as dictated by peoples perception of the world.” Teori ini kemudian menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara ekspektasi dan kapabilitas, yaitu *decremental deprivation*, *aspirational deprivation*, dan *progressive deprivation*.

Decremental deprivation kondisi dimana nilai ekspektasi kelompok relative konstan sedangkan nilai kapabilitasnya menurun. *Aspirational deprivation* kondisi dimana nilai kapabilitas relatif stabil sedangkan nilai ekspektasi cenderung naik atau menguat. Terakhir, *progressive deprivation* kondisi dimana

nilai ekpektasi naik secara simultan dan signifikan sedangkan nilai kapabilitas malah berkebalikan. Gurr menyatakan bahwa sifat dari kesemuanya itu hanya sementara, dalam jangka panjang/jangka waktu tertentu nilai ekspektasi cenderung beradaptasi dengan nilai kapabilitas. Intensitas kemunculan dari rasa frustrasi, yang diakibatkan salah satu dari ketiga bentuk deprivasi relatif, tergantung pada (1) tingkat rata-rata perbedaan, (2) tingkat kepentingan dari nilai yang dipengaruhi perbedaan, (3) jumlah atau proporsi nilai kelas yang dipengaruhi perbedaan, dan (4) waktu.

Gurr menawarkan bahwa dalam masyarakat heterogen, tingkatan intensitas terbesar deprivasi relatif bila dihubungkan terhadap perbedaan yang mempengaruhi nilai ekonomi, kemudian bila dihubungkan terhadap nilai keamanan dan komunitas, dan terakhir bila dihubungkan nilai partisipasi, kesadaran diri, status atau koherensi nilai ideal. Seiring berlalunya waktu, intensitas relative deprivation pertama-tama mengalami kenaikan kemudian menurun. Kepentingan sebuah posisi nilai berubah secara positif dan langsung terhadap "usaha yang diinvestasikan dalam meraih atau mempertahankan posisi yang diinginkan." Kemudian dengan memperhatikan aspirational deprivation, "pengalaman pertama yang dialami adalah kedekatan dengan posisi nilai yang diinginkan pada saat terjadi perbedaan" memperkuat hasil yang terjadi adalah frustrasi.

Kekuatan relative deprivation untuk sebuah kolektif/komunitas dijabarkan dalam rata-rata jumlah kemarahan yang dirasakan oleh seluruh anggota kolektif/komunitas. Ini merupakan komponen psikologi. Berapa banyak anggota dari kolektif yang terpengaruh oleh kemarahan hasil dari relative deprivation merupakan pertanyaan ruang lingkup dan ini komponen sosiologi. Dalam sebuah lingkungan beberapa orang akan merasakan depresi terhadap sesuatu hal. Langkah pertama untuk menganalisa potensi aksi kolektif dengan cara menentukan proporsi dari populasi yang merasakan hal yang sama, hal tersebut adalah rasa keterbuangan/kerugian/keterampasan yang dirasakan terus menerus (intens).

Rasa frustrasi yang dialami oleh kelompok masyarakat Papua, atas kesenjangan ekonomi yang dirasakan, keterbatasan dalam bidang politik, serta rasa "berbeda" dengan kelompok etnis lainnya kemudian memuncak sehingga

menimbulkan gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI. Akumulasi frustrasi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Papua kemudian diwujudkan melalui gerakan perlawanan baik secara politik maupun bersenjata. Gerakan Papua Merdeka merupakan perwujudan dari akumulasi rasa frustrasi yang terpendam sejak Pepera 1969.

Menurut Gurr (1994) ada empat faktor yang menentukan apakah minoritas akan melakukan mobilisasi untuk melawan dominasi negara atau tidak.¹² Faktor pertama adalah derajat kesenjangan ekonomi, sosial dan politik antara kelompok-kelompok. Secara umum, kelompok yang sangat berkekurangan (deprivasi) memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi politik aktif. Meskipun, deprivasi bukanlah kondisi yang cukup untuk menimbulkan konflik antar etnis. Agar hal itu terjadi, kelompok juga harus memiliki tujuan yang sama, kepemimpinan dan organisasi.

Faktor kedua adalah arti penting dari identitas kelompok. *Cross-cutting identities* atau rendahnya tingkat kohesi antar sesama anggota kelompok diperkirakan untuk mengurangi probabilitas bahwa sebuah kelompok etnis akan dapat bertindak dalam konser. Motivasi sangat bermanfaat untuk membangun kelompok etnis, seperti dalam pergerakan membela kepentingan. Perubahan yang dialami secara bersama-sama dalam satu tingkat, merangsang kekompakan dan meningkatkan polarisasi antara anggota kelompok. Simbol atau tanda merupakan identitas kelompok yang penting dalam proses pergerakan.

Faktor ketiga, keterampilan organisasi dan konsentrasi regional penting untuk pengembangan kegiatan politik. Kepemimpinan sangat penting untuk membangkitkan dan menumbuhkan dan mengembangkan gerakan etnis. Peningkatan skala organisasi etnis mendorong pergerakan ke arah afiliasi etnis skala besar yang menyediakan kerangka organisasi dan konstituensi untuk melakukan aksi secara bersama-sama.

Faktor keempat, pergerakan etnis harus mendapat respons dari dominan kelompok atau negara. Timbal balik dan interaksi yang terjadi juga merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Konflik antara kelompok mayoritas dan

¹² David Carment dan Patrick James, "Escalation of Ethnic Conflict: A Survey and Assesment," <http://server.carleton.ca/~dcarment/papers/escalati.html> diunduh pada 27 Oktober 2010.

minoritas biasanya melibatkan isu identitas nasional; ekspansi dan sentralisasi otoritas politik nasional yang menciptakan arena kompetisi untuk negara menguasai sumber daya, dan pengakuan etnisitas sebagai dasar untuk kompetisi sumber daya dan akses politik.

Sehubungan dengan nilai-nilai hirarki, Gurr mengusulkan bahwa dalam setiap populasi heterogen, intensitas deprivasi relative terbesar yang berkaitan dengan ketidaksesuaian yang mempengaruhi nilai-nilai ekonomi, kurang berkenaan dengan nilai-nilai keamanan dan komunal, dan berkenaan dengan partisipasi, realisasi diri, status atau nilai-nilai koherensi ideal (Gurr 1970:71). Sejumlah kualifikasi lain juga diperkenalkan. Dalam perjalanan, intensitas deprivasi relative (yang selanjutnya disebut DR) meningkat pada awalnya dan kemudian menurun. Pentingnya nilai posisi yang bervariasi positif dan langsung dengan “upaya yang diinvestasikan dalam mencapai atau memelihara posisi yang diinginkan” (p.73). Terakhir, dan sehubungan dengan bentuk khusus aspirasi DR, “kedekatan dari nilai posisi yang diinginkan saat ketidaksesuaian pada pengalaman pertama” secara intensif akan membuat frustrasi (p.73).

Intensitas dari DR secara kolektif dikatakan sebagai jumlah rata-rata dari kegusaran yang dirasakan oleh semua anggotanya. Hal ini merupakan komponen psikologi. Berapa jumlah anggota dari suatu kelompok yang dipengaruhi oleh kegusaran yang dihasilkan dari DR merupakan sebuah pertanyaan dan merupakan variabel sosiologis (Gurr 1970:83). Dalam banyak kelompok beberapa orang akan merasa kekurangan akan sesuatu. Langkah pertama dalam menganalisa potensi mereka untuk melakukan tindakan kolektif adalah dengan menentukan seberapa besar kelompok tersebut berbagi atas perasaan kekurangan yang sama tersebut. (pp.86-91).

Secara operasional, kita harus memulai dengan mengidentifikasi kelas-kelas yang relevan, strata ekonomi dan demografi dan kelompok komunal di masing-masing masyarakat/perkumpulan. Pengelompokan yang relevan akan bervariasi di antara masyarakat. Ukuran proporsional dari masing-masing group ditentukan dari tipe data sensus jika tersedia. Kemudian pola dari deprivasi ekonomi dan politik yang mempengaruhi sebuah kelompok dinilai dari informasi tentang kondisi seperti kesulitan ekonomi, deprivasi kebijakan pemerintah

(sebagai contoh, penyitaan kebijakan fiskal atau pembatasan kegiatan politik), dan tingkat ketimpangan lintas etnis dan agama. Proporsi masing-masing kelompok dipengaruhi oleh satu atau beberapa kondisi, seperti indikator dari bidang DR; intensitas merupakan fungsi dari kerasnya kebijakan atau kondisi. Hasil dari tindakan per bidang dan intensitas untuk setiap kelompok adalah suatu indeks besarnya ketidakpuasan mereka dan potensi mereka untuk melakukan tindakan kolektif.

Sebagaimana Gurr menjelaskan, “potensi kekerasan kolektif akan menjadi yang terbesar dalam suatu negara yang mayoritas masyarakatnya sangat kekurangan atas tujuan mereka yang paling berharga, secara individual dan kolektif terjadi kejenuhan dalam mencapai tujuan dengan sarana konstruktif yang terbuka dan tidak memiliki kesempatan melakukan tindakan non kekerasan atas kemarahan mereka” (Gurr 1970:92). Beberapa tingkat DR hadir dalam beberapa populasi dalam waktu yang bersamaan. Hal terpenting dalam timbulnya konflik adalah intensifikasi DR karena kondisi yang mendukung akan meningkatkan harapan atau menurunkannya kemampuan kelompok-kelompok populasi utama.

Gurr mengidentifikasi empat sumber meningkatnya harapan. Yang pertama adalah *demonstration effect* dari budaya masyarakat barat melalui media atau melalui literature dan pendidikan ala barat. Gurr, meskipun demikian, memodifikasi *demonstration effect* dengan mengusulkan bahwa kita harus mempertimbangkan “intensitas dan cakupan dari kekurangan yang telah ada di dalam grup “ketika memeriksa *demonstration effect* (Gurr 1979:101). Bahkan ketika DR telah ada sebelumnya dalam suatu kelompok tertentu, *demonstration effect* kemungkinan akan menjadi sumber yang kuat untuk meningkatnya harapan hanya ketika masyarakat percaya bahwa ada beberapa kemungkinan memperoleh tujuan nilai baru (p.102). Kedua, efek yang sama dapat terjadi sebagai hasil dari pengenalan keyakinan ideologis baru, seperti daya tarik komunisme yang dibuat subjektif sehingga menyadari provinsi sendiri(p.104). Tiga jenis dari *demonstration effect* terjadi ketika posisi dari referensi grup ke grup lain meningkat (p.105). Terakhir, meningkatnya harapan dapat terjadi apabila setiap group memiliki perbedaan posisi nilai dalam sumbu nilai yang berbeda seperti posisi ekonomi bernilai tinggi, politik rendah dan posisi status(p.109).

Titik kritis disini adalah kemungkinan terjadinya revolusi di saat harapan tersebut meningkat, akibat dari beberapa proses reformasi terbatas, setelah dalam periode yang lama terjadi intensitas yang cukup dari deprivasi tersebut dan akhirnya harapan tersebut akan hancur (Gurr 1970: 117). “hanya seorang jenius yang hebat yang dapat menyelamatkan pangeran yang bertindak untuk menyelamatkan rakyatnya setelah penindasan yang panjang” (de Tocqueville quoted in Gurr 1970: 117). Gurr menyarankan bahwa untuk menghindari hasil yang revolusioner dalam kasus seperti itu, “nilai output dan kesempatan” harus terus diperluas ketika loyalitas kelembagaan diperkuat dan kewenangan dipertahankan (Gurr 1970: 121). Terjadinya DR, bagaimanapun juga, tidak hanya tergantung pada peningkatan harapan. Menurunnya kemampuan mencapai harapan dan adanya kesempatan bagi kelompok juga turut berperan menciptakan ketidakpuasan. Sebagai contoh pada masa lalu adalah ketika diberlakukannya secara tiba-tiba langkah-langkah penghematan yang berdampak, misalnya, mengurangi kemampuan masyarakat miskin Amerika Latin untuk mencapai kesejahteraan.

Ketika ketidakpuasan tersebut terjadi, ketidakpuasan tersebut akan dipolitisasi yang tergantung pada berbagai macam faktor intervensi. Hilangnya legitimasi pemerintah, yang penting oleh Brinton dan Johnson, oleh Gurr dianggap sebagai faktor terpenting dalam menjelaskan terjadinya perselisihan di masyarakat. Apakah suatu kelompok yang merasa tidak puas akan melakukan kekerasan atau tidak tergantung pada adanya pembenaran normative (secara kultur atau nilai) untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut. Legitimasi dari rezim politik yang ada merupakan salah satu hal penting dari faktor normatif. Selanjutnya, Gurr menggabungkan argument-argumen yang rasional, mengajukan bahwa perhitungan manfaat dari ketidakpuasan kelompok, terutama oleh pemimpin mereka, sebagai bentuk kemungkinan atau aksi politik. Yang terakhir, keseimbangan dari kekuatan koersif, yaitu kekuatan militer yang dimiliki pemerintah dengan partai oposisi dan ada atau tidaknya struktur organisasi yang mendukung partai oposisi dibandingkan untuk mendukung mekanisme pemerintah, berinteraksi dengan ketidakpuasan politik untuk menentukan sejauh mana besar dan bentuk umum dari kekerasan politik tersebut.

Why Men Rebel merupakan sebuah contoh kontribusi dari revolusi perilaku, tidak hanya tergantung pada analisa kuantitatif empiris, tetapi dalam arti upaya yang disengaja oleh Gurr untuk menjauhkan diri secara emosional dari subjek analisisnya. Kalimat Brinton dalam tulisan Gurr yang terkenal saat terakhir menulis bahwa karyanya dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun pemberontak. Secara epistemologis, Gurr membedakan dengan menyolok dengan sarjana-sarjana lain seperti Alasdair MacIntyre and Sheldon S Wolin dalam arti bahwa tidak seperti yang terakhir, ia mempercayai bahwa revolusi tunduk pada analisis objektif dan sistematis. Gurr juga membedakan dengan Marx dalam arti ia tidak memberikan argument secara eksplisit untuk sebuah filsafat praktis yang akan mengubah dunia seperti penafsirannya.

Secara substantive, pekerjaan Gurr lebih dekat kepada Brinton dan Johnson, terutama yang terakhir. Faktanya, dalam tulisan terakhir Gurr disebutkan bahwa “teori struktur social (seperti Johnson Smelser dsb) memiliki penekanan yang berbeda dibandingkan teori-teori psikologi sosial,” sebagai contoh dari Gurr dan Invo serta Rosalind Feierbend (Gurr 1973: 359-392). Kedua aliran tersebut menyetujui peran penting perubahan social dalam penciptaan “ketegangan” atau dislokasi; keduanya menekankan pentingnya norma, keyakinan dan nilai dalam masyarakat; keduanya terfokus pada keseimbangan dari dukungan kelembagaan (struktural kondusif); keduanya berpendapat bahwa kerasnya elit cenderung memperburuk prospek bagi hasil tanpa kekerasan; dan keduanya memberikan perhatian penting kepada angkatan bersenjata. Gurr dan Johnson hanya berbeda tentang apakah dan bagaimana tingkat analisis psikologi harus dipertimbangkan.

Dalam pekerjaan terakhirnya, Gurr menjauh sedikit dari penekanan awal tentang variabel psikologis. Dalam model yang digunakannya untuk memprediksi konflik politik domestic, ia berpendapat bahwa meluasnya konflik politik dipengaruhi oleh (a) ketidakpuasan, yang disimpulkan dari kesenjangan struktural dalam masyarakat, (b) disposisi terhadap konflik, dan (c) kekuatan organisasi. Model teoritis yang telah direvisi mencakup hubungan interaktif antara tiga karakteristik kelompok konflik. Disposisi terhadap konflik yang terjadi dipengaruhi oleh perhitungan rasional tentang faktor-faktor seperti sejarah suksesnya tantangan yang dikemukakan, keseimbangan antara kekuatan untuk

memaksa dan ketersediaan atas pembenaran normative untuk melawan rezim (sebagai contoh menurunkan rezim). Kekuatan organisasi, di sisi lain, tergantung dari ukuran, keterpaduan dan kemampuan koersif kelompok tersebut. Bagaimanapun juga, ketidakpuasan merupakan inti dari model teoritis: kelompok tidak akan memberontak kecuali di antara anggota dalam kelompok tersebut berbagi ketidakpuasan secara terus menerus. Hal ini mendasari teori psikologi yang banyak dikritik oleh teoritis konflik, diantaranya yang menonjol adalah Charles Tilly dan Theda Skocpol.

2.2. Teori Insurgensi/Separatis.

Insurgensi bisa didefinisikan sebagai perjuangan antara pihak yang tidak berkuasa dengan pihak penguasa, dimana pihak yang tidak berkuasa menggunakan secara sadar kemampuan politiknya; seperti para ahli yang terorganisir, media propaganda, dan demonstrasi, dan penggunaan kekerasan yang bertujuan menghancurkan, mengformulasi ulang, atau mempertahankan satu atau beberapa aspek dasar legitimasi politik. Legitimasi merupakan pernyataan yang sering digunakan untuk memposisikan keberadaan aspek politik bermoral atau tidak –benar atau salah–oleh populasi atau bagian tertentu dari populasi (komunitas). Berdasarkan penelitian, terdapat tujuh tipe gerakan insurgensi yaitu anarkis, egalitarian, tradisional, pluralis, secessionis, reformis, dan konservasionis.

Proses politik yang berlangsung disetiap negara berbeda-beda, terkadang krisis politik yang terjadi menimbulkan transformasi politik, yang oleh kelompok minoritas dimanfaatkan untuk menyampaikan tuntutan¹³. Bentuk paling ekstrim dari tuntutan tersebut yaitu keinginan untuk memisahkan diri atau yang lebih dikenal dengan istilah separatis. Dalam berbagai literatur ilmu politik dan pemerintahan separatis politik adalah suatu gerakan untuk memperoleh kedaulatan dengan cara sekelompok orang/suatu wilayah memisahkan diri dari negara. Kelompok yang memiliki aspirasi untuk memisahkan diri umumnya memiliki kesadaran nasional (*national consciousness*) yang khas.

¹³ JJ Linz dan Alfred Stepan, "Some Thoughts on Decentralization, Devolution, and the Many Varieties of Democratic Federal Arrangements," dalam Little W R (ed), *Crafting Indonesian Democracy*, Bandung: Mizan, 2001.

Gerakan separatis menempuh berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, baik cara damai maupun kekerasan yang melibatkan kekuatan bersenjata dan terror. Dipermukaan gerakan separatis sering kali tampak diwarnai dengan secara kental oleh nasionalisme atau fanatisme agama. Tetapi, bila ditelaah secara mendalam hal yang lebih dominan karena kurang keterlibatan kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan politik atau kekuasaan serta ketimpangan sosial ekonomi yang diderita. Spencer Metta menyimpulkan dari hasil penelitiannya terdapat tujuh faktor utama sumber separatis, yaitu :¹⁴

- a) *Emotional resentment*. Secara psiko-sosial, nasionalisme tidak jarang berakar pada sentiment emosional, termasuk kecemburuan yang sangat dalam terhadap masyarakat pesaing – walaupun alasannya kadang kala tidak masuk akal atau tidak mendasar.
- b) *The justified resistance of victims*. Kaum nasionalis yang menderita dalam waktu yang lama akibat HAM mereka dilanggar, termasuk pelanggaran akan hak-hak kebudayaan, sosial, ekonomi, dan agama, akhirnya memberontak dan memilih berpisah dari negara.
- c) *Propaganda orchestrated for political gain*. Sering kali apa yang disebut sebagai keinginan bersama untuk memisahkan diri itu sebagai keinginan bersama untuk memisahkan diri itu untuk lebih dari upaya pemimpin politik yang mengobarkan rasa kebencian rakyat terhadap kekuasaan tertentu.
- d) *Power of a dominant ethnic group*. Dominasi kelompok etnik tertentu dalam suatu negara multicultural dan kecenderungan untuk tidak membagi kekuasaan sering menjadi sebab timbulnya aspirasi separatis.
- e) *Economic motivations*. Sering kaum separatis digambarkan sebagai kelompok yang dirugikan secara ekonomis dan dieksploitasi oleh mereka yang lebih kaya, karena keadaan itu mereka menuntut untuk berpisah dan mengatur diri sendiri.
- f) *Preservation of a threatened culture*. Tidak jarang gerakan separatis juga dilatarbelakangi pemahaman bahwa kemerdekaan harus dicapai sebagai

¹⁴ JP Solossa, "Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI," Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, Hlm. 40-41.

satu-satunya cara untuk melindungi kebudayaan, agama, bahasa, dan tradisi lain yang terancam punah akibat dominasi kebudayaan nasional.

- g) *Commitment to modernization*. Sejarah menunjukkan bahwa pecahnya suatu negara juga dapat diakibatkan oleh adanya keinginan revolusioner kelompok tertentu untuk mendirikan suatu rejim universal yang memayungi semua komunitas etnis dan agama di bawah sistem hukum yang sama dan seragam.

2.3. Teori Ethnicity

Semenjak berakhirnya perang dingin, banyak perubahan yang terjadi dan dirasakan oleh kelompok-kelompok Studi Hubungan Internasional (SHI). Ada angin segar yang dirasakan para ahli yang membawa konsekuensi positif pada kajian SHI. Salah satu isu yang termasuk adalah etnisitas, isu ini menjadi begitu berkembang mulai dari sisi sejarah, antropologi, sosiologi dan politik diamati oleh para pakar di dunia. Seperti J. Rothschild dengan teori politisasi etnik (*ethnopolitics*) hingga Walker Connor dan Joshua Fishman yang menelaah unsur psikologis dan kekerabatan dari etnis dan nasionalisme etnik.

Pergolakan kelompok etnik bekas jajahan Uni Soviet dan Yugoslavia yang meminta untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri merupakan salah satu contoh yang menunjukkan teori nasionalisme etnik berkembang. Hal ini pula yang mengundang para ahli dunia untuk lebih mempelajari fenomena ini sebab merupakan hal yang aneh dalam era globalisasi sekarang ini nasionalisme-etnik masih mampu untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu terdapat juga alasan-alasan lain yang menjadikannya fokus telaah. Pertama, etnisitas berkembang menjadi kecenderungan global. Kedua, masalah yang menyangkut etnisitas akan berlanjut sebagai arena politik nasional dan internasional. Ketiga, kurang lebih 90% negara di dunia ini adalah *multination-state* dan 50 negara diantaranya adalah negara yang memiliki masalah etnik. Keempat, kebanyakan studi mengenai etnisitas masih berasal dari penelitian sistematis dan empiris masih kurang mendalam.

Terdapat tiga perspektif tentang nasionalisme, yaitu primordial, kontekstual, dan konstruktif. Perspektif primordial memandang nasionalisme

bersifat kontinu atau berkelanjutan. Nasionalisme kita merupakan kelanjutan semangat kebangsaan terdahulu yang terbentuk dari elemen identitas dan elemen ikatan emosional. Namun, perspektif ini tidak dapat menjelaskan bagaimana kedua elemen berkembang menjadi nasionalisme-etnik. Perspektif kontekstual memandang nasionalisme sebagai fenomena modern, dimana nasionalisme terbentuk karena pengaruh ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun perspektif ini dapat menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh perspektif primordial. Akan tetapi, perspektif ini juga tidak dapat menjawab mengapa tidak semua kelompok etnik yang mengalami ketidakadilan memiliki semangat kebangsaan dan juga pandangan ini terlalu determinitis atau berorientasi ekonomi. Terakhir perspektif konstruktif, nasionalisme adalah fenomena tradisional dan modern. Nasionalisme terbentuk karena para nasionalis melakukan rekayasa sosial dengan memanfaatkan warisan primordial serta pengaturan politik, ekonomi, sosial, dan budaya kontemporer yang mereka hadapi. Namun, perspektif ini pun memiliki kelemahan terlalu mekanistik dan elitis dan menganggap proses sosial yang terjadi merupakan kendali dari atas, tetapi terdapat juga proses sosial yang spontan.

Ada tiga simpulan yang dapat diambil dari pengamatan diatas. Pertama, setiap nasionalisme etnik tidak dapat terlepas dari *primordial attachment*. Kedua, terkonsolidasinya nasionalisme etnik tidak terlepas dari faktor lain, perspektif kontekstual dan konstruktif. Ketiga, faktor terakhir yang kurang diperhatikan, faktor internasional. Untuk dapat mengidentifikasi sumber-sumber nasionalisme etnik keempat faktor tersebut bisa digunakan untuk menganalisis dan mempelajari lebih dalam mengenai nasionalisme etnik. Faktor internasional adalah faktor eksternal yang tidak dapat diabaikan. Banyak hal yang menghubungkan mulai dari aspek historis, agama, kepentingan hingga simpati terhadap perjuangan nasionalisme etnik yang diwujudkan dalam berbagai pernyataan dan tindakan baik langsung maupun tidak langsung.

Nasionalisme etnik yang diteliti dalam penelitian ini adalah *ethnonation*. Nasionalisme etnik didefinisikan sebagai sentimen dari anggota-anggota suatu *ethnonation* yang dimobilisasi untuk memperjuangkan kedaulatan bagi komunitas etnik mereka. Sedangkan *ethnonation* didefinisikan sebagai komunitas orang yang

memaknakan identitas politik mereka dengan mengklaim hak untuk menjalankan kedaulatan. *Ethnopolitics* yang menyandang *ethnonation* memiliki tujuan untuk memperoleh hak *self-determination*; memperoleh kedaulatan; dan meraih kemerdekaan.

2.4. Teori Integrasi Politik

Bagi suatu negara yang memiliki keanekaragaman atas suku bangsa, agama, yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang amat luas dan besar tanpa integrasi dapat mempengaruhi ketentraman dan keamanan bagi negara itu sebab mereka tidak merasa menyatu dan secara bebas memainkan peranannya sebagaimana warga negara biasa.

Ronald L Watts menyatakan bahwa integrasi politik adalah penyatuan kelompok yang berbeda, masyarakat ataupun wilayah, ke dalam suatu organisasi politik yang bisa bekerja atau bertahan hidup.¹⁵ Konsep integrasi nasional mengacu pada proses atau kondisi penyatuan bagian-bagian bangsa yaitu masyarakat yang hidup di wilayah negara yang bersangkutan memiliki persamaan sejarah, kesatuan simbol dan perasaan subjektif yang mengikat antara satu anggota dengan anggota yang lainnya.¹⁶

Wiener menyatakan integrasi politik bagi suatu negara sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa tersebut, yang dimaksud dengan integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik.

Nazaruddin Syamsuddin mengungkapkan bahwa integrasi nasional pada dasarnya mencakup dua masalah pokok yaitu¹⁷ :

- a) Bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh kepada tuntutan-tuntutan negara, yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki negara.
- b) Bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat, konsensus ini tumbuh dan

¹⁵ Robert L Watts, "Federalism, Regionalism, and Political Integration," dalam David Cameron (ed.), *Regionalism and Supra Nationalism*, Montreal: The Institute for Research on Public Policy, 1981, Hlm. 5.

¹⁶ Ibid, Hlm. 5.

¹⁷ Nazarrudin Syamsyuddin. *Integrasi dan Ketahanan Nasional di Indonesia*, Lemhanas, Jakarta 1994

berkembang diatas nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa secara keseluruhan.

Menurut pakar sosiologi, Manrice Duverger dalam bukunya, mengatakan bahwa “integrasi didefinisikan sebagai dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara bagian-bagian antara organisme hidup atau antar anggota-anggota dalam masyarakat” sehingga integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat, yang cenderung membuatnya menjadi suatu kata yang harmonis yang didasarkan pada tatanan yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya.

Maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa integrasi politik adalah menyatukan bagian-bagian berupa masyarakat yang majemuk, pluralitas keagamaan, linguisme, budaya peradaban termasuk wilayah kehidupan mereka ke dalam satu kesatuan sistem politik nasional (*nation-state*).¹⁸

Dengan melihat pengertian tersebut maka integrasi politik menurut Wiener dibagi dalam lima jenis yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit-khalayak, dan perilaku integratif. Dari kelimanya, yang menjadi permasalahan mendasar dalam proses integrasi nasional yaitu integrasi bangsa dan integrasi wilayah.

a) Integrasi Bangsa

Secara alamiah, manusia mengarahkan kesetiannya pada kelompok-kelompok kedaerahan, etnis, keagamaan, bahasa atau disebut juga primordialisme. Oleh karena itu, bagi negara yang memiliki keanekaragaman suku, etnis, ras, dan agama integrasi bangsa sangat penting untuk menciptakan identitas nasional. Hal serupa juga dinyatakan oleh Howard Wrigings yaitu integrasi bangsa berarti menyatukan bagian-bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu.

Pemerintah sewajarnya melakukan percepatan proses integrasi bangsa dengan pengesahan satu bahasa nasional, memaksakan program-program pendidikan dan banyak hal lainnya, yang pada prosesnya menimbulkan rasa sakit hati dalam kalangan minoritas akibat dari tekanan dari penguasa untuk mewujudkan identitas nasional, kemudian kalangan minoritas ini menjadi kaum

¹⁸ Decky Natalis Pigay, “Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua,” Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, Hlm. 59.

penentang. Integrasi alamiah, yang semestinya terjadi, dihambat sendiri oleh akselerasi yang dilakukan pemerintah.

Wiener melihat kebijakan pemerintah pusat mentaukan masyarakatnya dengan cara pertama, penghapusan sifat cultural utama dari kelompok minoritas dan mengembangkan semacam kebudayaan nasional, biasanya kebudayaan kelompok dominan, yang kemudian disebut asimilasi. Kedua, pembentukan budaya nasional tanpa menghapuskan kebudayaan kelompok kecil. Ketiga, cara yang bersifat revolusioner dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi militer. Negara yang menggunakan cara kekerasan sangat mudah menumbuhkan benih-benih separatism sebagai ungkapan kekecewaan kelompok minoritas.¹⁹

Persoalan mendasar yang muncul dalam proses integrasi nasional yaitu penggunaan dan pembagian kekuasaan dalam struktur penguasa, terjadi perubahan dalam struktur penguasa karena proses penyatuan. Persoalan yang dihadapi yaitu bagaimana membuat masyarakat mau ikut ambil bagian dan bekerja sama dalam kebijakan politik dengan mengesampingkan individu, perbedaan kelompok dan persaingan. Seperti yang diungkapkan oleh Claude Ake yaitu "integrasi politik pada dasarnya mencakup dua masalah utama; pertama, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh kepada tuntutan negara. Kedua, bagaimana meningkatkan consensus normative yang mengatur tingkah laku masyarakat atau individu yang ada didalamnya."²⁰

b) Integrasi Wilayah

Organsky menyatakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya di negara yang baru merdeka, adalah pembentukan pemerintah pusat yang menguasai atas seluruh wilayah dan penduduk yang tinggal dalam batas-batas wilayah itu.²¹

Menurut Coleman dan Rosberg integrasi wilayah dalam bidang horizontal yang bertujuan mengurangi diskontinuitas dan ketegangan cultural kedaerahan dalam proses mewujudkan masyarakat yang homogeny. Dengan kata lain,

¹⁹ Myron Weiner, "Political Integration and Political Development," dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Politik*, Jakarta: Gramedia, 1992, Hlm. 160.

²⁰ Claude Ake, "A Theory of Political Integration," dalam *Southeast Asia, The Politics of National Integration*, Illinois: Dorsey Press, 1967, Hlm. 13.

²¹ AFK Organsky, "The Stages of Political Development," New York: Knopf, Hlm. 8.

integrasi horizontal atau proses pemaduan bangsa tidak mengenal pembatasan-pembatasan yang ada di dalam bidang vertikal dan horizontal.

Dalam kenyataannya, banyak pemerintah yang tidak dapat menerapkan kekuasaannya di seluruh wilayah negara. Terdapat perselisihan dan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh campur tangan pemerintah, belum lagi faktor kesulitan geografis yang ekstrim membuat beberapa wilayah menjadi sulit untuk dijangkau. Oleh karena itu, Wriging menyatakan integrasi wilayah terjadi apabila pemerintah meningkatkan kemampuannya untuk menerapkan kekuasaannya di seluruh wilayahnya.

2.5. Konsep Keamanan dan Ancaman Nasional

Khususnya di negara-negara yang masih bergumul dengan bina-bangsa (*nation-building*) dan bina-negara (*state-building*), sebagaimana dibayangkan oleh Barry Buzan, tetap tegaknya suatu negara memang lebih dari sekedar dari kemampuannya untuk menjamin keamanan fisik (*physical based of the states*) seperti wilayah, penduduk, sumberdaya, tetapi juga mempertahankan tegaknya lembaga-lembaga politik dan aturan-aturan yang mencerminkan otoritas negara (*institutions based*) dan bahkan, dalam kondisi tertentu, terpeliharanya wawasan dan cita-cita bersama (*ideational based*).²²

Keamanan merupakan suatu hal yang selalu berusaha untuk diwujudkan oleh setiap negara, dalam rangka survivalitas atau keberlangsungan hidup masyarakatnya. Apabila ada gangguan baik internal maupun eksternal maka menjadi ancaman bagi negara. Demikian juga halnya dengan separatis atau keinginan untuk memisahkan diri dari negara, apapun alasannya, hal ini akan mengakibatkan keberlangsungan hidup suatu negara, pemerintah, maupun bangsa terancam. Keinginan sebagian masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI, melalui gerakan Papua Merdeka telah menjadi ancaman bagi NKRI.

Kusnanto menyatakan perilaku negara dalam upaya mempertahankan otoritas negara (*institutions based*) dalam pencapaian negara-bangsa (*nation-state*) dengan menjamin keamanan fisik, merupakan hal sedang negara Indonesia lakukan dalam penanganan masalah Papua. Banyaknya personil keamanan,

²² Kusnanto Anggoro, "Keamanan Nasional dan Fungsi Intelijen."

pengiriman satuan-satuan khusus ke Papua merupakan bentuk usaha negara mewujudkan keamanan fisik. Walaupun, pada prosesnya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terekspos ke dunia internasional sehingga menimbulkan permasalahan lain yang menjadikan permasalahan Papua menjadi lebih kompleks lagi.

Ancaman adalah suatu hal, kejadian, tindakan yang bisa membahayakan, menyulitkan, mengganggu menimbulkan rasa takut, merugikan, dan lain- lain. Menhankam/ Pangab (1975) menyatakan bahwa ancaman merupakan suatu usaha yang bersifat merubah atau merombak kebijakan secara konsepsional dari sudut kriminal ataupun politis. Tantangan merupakan suatu usaha yang bersifat menggugah kemampuan. Hambatan adalah suatu yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi kebijakan, yang tidak bersifat konsepsional berasal dari diri sendiri. Gangguan adalah suatu usaha dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi kebijakan yang tidak bersifat konsepsional.²³ Keempat hal ini biasa dikenal dengan sebutan ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan).

Ancaman adalah pelbagai situasi, kondisi, tindakan baik alamiah atau hasil rekayasa, berbentuk fisik atau non fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, baik langsung maupun tidak langsung, yang diantisipasi sebagai potensi ancaman yang dapat mengganggu, menghambat, mengubah, merusak, menghancurkan identitas, integritas, eksistensi, kepentingan, perjuangan, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pencapaian tujuan nasional.²⁴

Ancaman juga diartikan sebagai setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional.

Ancaman terhadap NKRI adalah suatu hal yang dapat membahayakan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi

²³ Irawan Sukarno, "Ancaman Potensial dan Strategi Penangkalan", SESPARLLU XXX dan SEDILU XXXII 2004, Hlm. 2.

²⁴ Ikshanudin, et. Al, "Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Intelijen Negara", Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2010, Hlm. 7.

bidang, ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan kemanan, yang datangnya baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.²⁵

Dalam kehidupan kenegaraan, dikenal adanya ancaman nyata, ancaman konkrit seperti ancaman nyata (ancaman konkrit) seperti ancaman fisik, serangan militer, embargo, boikot, *travel warning*. Selain itu ancaman yang tidak nyata (tidak konkrit) karena tidak kelihatan seperti subversi dan infiltrasi. Selain itu dari segi asal dari mana ancaman datang, bisa disebut ancaman dari luar negeri dan ancaman dari dalam negeri. Melihat jenis ancaman tersebut, tentu saja kadarnya tidak sama.²⁶

Mengetahui kadar ancaman, sejauh mana tingkat bahaya ancaman tersebut, tentu amat diperlukan. Dalam menghadapi ancaman harus sesuai dengan porsi dan proporsional, serta tidak over dosis agar tidak menimbulkan masalah baru yang bisa kontra produktif. Untuk mengukur tingkat ancaman ada banyak cara. Pandangan Mr Robert yang dikenal dengan sebutan *Robert Ring* adalah salah satu ukuran untuk tingkat ancaman. Pengklasifikasian ancaman menurut Robert Ring ini terbagi menjadi minor, moderat, serius, dan kritis.²⁷

2.6. Teori Konflik dan Resolusi Konflik

2.6.1. Teori Konflik

Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, dan politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik.²⁸ Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.²⁹

²⁵ *Op.cit.* Sukarno. Hlm. 3.

²⁶ Supono Sugirman, "Analisis Intelijen sebuah Kontemplasi", Jakarta: Centre For the Study of Intelligence and Counterintelligence, 2009, Hlm. 297.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 298

²⁸ Wirawan., "Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian." Salemba Humanika, 2010, Hlm. 1.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 5.

Dalam suatu interaksi sosial, ada beberapa hal yang bisa menimbulkan konflik, yaitu keadilan (*justice*), kewajaran (*equity*), persamaan hak (*equality*), dan kekuasaan (*power*).

- a) Keadilan distributif (*distributive justice*). Keadilan yang berhubungan dengan distribusi barang dan jasa yang mempunyai nilai ekonomi dan distribusi suatu kondisi yang memengaruhi kesejahteraan, terdiri dari aspek-aspek psikologi, fisik, ekonomi, dan social.
- b) Keadilan prosedural (*procedural justice*). Keadilan mengenai prosedur untuk mendapatkan barang dan jasa
- c) Kewajaran (*equity*). Dalam suatu hubungan kerjasama di mana produktivitas ekonomi merupakan tujuan utama, kewajaran lebih merupakan prinsip utama daripada persamaan hak dalam keadilan distributif.
- d) Persamaan hak (*equality*). Persamaan hak artinya setiap orang yang berinteraksi sosial sebagai individu mempunyai nilai yang sama dan menciptakan kondisi optimal untuk memelihara harga diri (*self-esteem*). Persamaan hak dalam keluaran berarti setiap anggota mempunyai nasib yang sama (*common fate*) yang akan mengembangkan solidaritas dalam interaksi sosial. Ketiadaan persamaan hak akan meniadakan kekohesifan hubungan sosial yang akan mengarah timbulnya suatu konflik.
- e) Kekuasaan (*power*). Dalam suatu interaksi sosial, kekuasaan (*power* atau *social power*) juga berperan. Dalam suatu interaksi sosial, kekuasaan merupakan hasil ketergantungan di antara dua pihak yang berinteraksi.

Secara sederhana, konflik dapat dipahami sebagai suatu bentuk pertentangan antara dua atau lebih pihak yang mempertahankan kebenaran masing-masing. Ini berhubungan erat dengan berbagai dimensi dalam konflik di Papua. Pertalian panjang dan rumit dari segi waktu dan ruang antara satu dimensi dengan dimensi yang lain menghasilkan berbagai jenis dan modus konflik, pelaku, dan kepentingan yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Untuk menyebut beberapa diantaranya adalah perspektif sepihak dari Jakarta, kesalahpahaman budayam kekerasan politik bermotifkan ekonomi, diskriminasi pemerintah terhadap rakyat Papua, rekayasa negara dalam melestarikan

kekerasan, tuduhan genosida, tuntutan kemerdekaan, perjuangan Otonomi Khusus, imposisi pemekaran, dan lain-lain. Pada tahap ini konflik-konflik di Papua seakan-akan sulit untuk diuraikan kembali secara jernih di mana akar persoalannya dapat dikenali dan dibuka kemungkinan untuk menyelesaikannya satu per satu atau secara bersamaan.

Menurut Louis Kriesberg, evaluasi terhadap konflik dapat dilakukan dengan melihat unit yang berkonflik, isu yang dikonflikkan, dan cara berkonflik yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya konflik dapat dibedakan berdasarkan isu yang dikonflikkan, karakteristik kelompok yang berkonflik, hubungan antara kelompok yang berkonflik, cara yang digunakan masing-masing kelompok yang berkonflik.

2.6.2. Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik.³⁰ Mekanisme resolusi konflik pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan suatu perdamaian yang positif. Perdamaian positif ini dapat dicapai dengan (1) mengidentifikasi sumber-sumber kekerasan struktural; (2) mengidentifikasi perubahan struktural yang dibutuhkan; dan (3) melembagakan proses resolusi konflik dalam struktur sosial.³¹

Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Kedua, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian

³⁰ Syamsul Hadi, et. al., *Op.Cit.* hlm 24.

³¹ *Ibid.* hlm 27-28

konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.³²

Dalam pelaksanaan kebijakan resolusi konflik, harus dipadukan dengan berbagai teori tentang pencegahan konflik. Tindakan Pencegahan dapat berfokus pada : (1) tindakan politik jangka pendek dalam rangka mencegah konfrontasi; (2) penataan kelembagaan untuk menyeimbangkan kekuatan dan membangun rasa percaya diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan; dan (3) reformasi struktur ekonomi dan sosial, yang kadangkala juga disebut "*preventive development*". Untuk menentukan strategi-strategi yang berbeda ini, perumus kebijakan menghadapi masalah validitas kebijakan (*validity of preventive action*), yakni apakah tindakan yang diambil tepat dan efektif berkaitan dengan latar belakang dan eskalasi konflik.³³

³² Andi Widjanto, "Empat Tahap Resolusi Konflik," diakses dari <http://www.tempointeraktif.com>, pada 10 Oktober 2010, pukul 22.30 WIB.

³³ Janie Leatherman, "Memutus Siklus Kekerasan: Pencegahan Konflik Dalam Krisis Intranegara", Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004, Hlm. 130.

BAB III

POTENSI ANCAMAN

GERAKAN PAPUA MERDEKA

3.1. Perkembangan Gerakan Papua Merdeka

3.1.1. Sejarah Integrasi Papua

Wilayah Irian Barat³⁴ menjadi bagian dari jajahan Belanda sejak tahun 1828. Ketika Belanda menyerahkan kedaulatan RI tahun 1949, wilayah Irian Barat termasuk di dalamnya karena menurut Pemerintah Belanda akan diatur kemudian. Dalam Perjanjian di Den Haag tentang Peyerahan Kedaulatan, pada 1949 disebutkan:

The status quo of Residency of New Guinea shall be maintained with the stipulation that within a year from the date of transfer of sovereignty to the Republic of United States of Indonesia the question of the political status of New Guinea be determined through negotiations.

Akan tetapi, setelah tidak ada tanda-tanda pemerintah Belanda menyelesaikan hal ini setahun setelah 1949, maka pada tahun 1954 Indonesia mengadakan persoalan ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sikap Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara Asia Afrika sebagaimana tersurat dalam resolusi Asia Afrika pada bulan April 1955 agar Indonesia-Belanda meminta PBB untuk membantu menyelesaikan sengketa status Irian Barat.

Berbagai usaha diplomatik telah dilakukan Indonesia tetapi tidak membuahkan hasil. Sampai 1961 masalah ini masih belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan meski tiap tahun diagendakan dalam Sidang Majelis Umum PBB. Bersamaan dengan itu hubungan diplomatik Indonesia-Belanda terputus. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru berupa Trikora (Tri Komando

³⁴ Nama Papua, konon berasal dari Antonio D'Abren, pelaut Portugis yang datang ke pulau tersebut pada tahun 1515. Nama *New Guinea* berasal dari Ynigo Ortiz de Fretes, Seorang Spanyol yang berlabuh di Memberamo pada 1545, dinamakan demikian karena pulau ini banyak kesamaan dengan Guinea yang terletak di pantai Afrika Barat. Selanjutnya nama Irian diusulkan dalam konferensi Malino 1946 oleh Frans Kaisiepo, dan sejak itu nama Irian dipakai oleh Pemerintah Indonesia. Lihat, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: No.3), hal. 1484-1488.

Rakyat) sehingga terjadilah pertempuran bersenjata antara Indonesia-Belanda di daerah pantai barat Irian.

Melihat perkembangan yang tidak positif terutama dalam suasana hubungan internasional yang diselimuti oleh Perang Dingin, Elsworth Bunker, menjadi mediator dalam upaya mencari penyelesaian kasus Irian Barat. Pihak Belanda dan Indonesia kemudian dipertemukan dalam suatu perundingan yang menghasilkan New York Agreement, 15 Agustus 1962, yang kemudian Sidang Majelis Umum PBB dengan Resolusi nomor 1752 (21 September 1962).³⁵ Persetujuan New York yang terdiri atas 29 pasal, pada dasarnya berisi tiga hal, yaitu Transfer administrasi dari Belanda kepada PBB, Transfer administrasi dari PBB ke Indonesia, serta Penentuan Nasib Sendiri.³⁶

Realisasi persetujuan ini antara lain berhasil dibentuknya United Nations Executive Authority (UNTEA) sebagai badan administrasi sementara, bendera Belanda diturunkan dan digantikan dengan bendera PBB, aparat keamanan Belanda diganti pasukan keamanan PBB yang terutama terdiri dari warga Irian, serta Sekjen PBB berkewajiban memberikan laporan berkala kepada Indonesia dan Belanda serta Majelis Umum PBB.

Setelah Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA pada 1 Oktober 1962, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian New York, administrasi UNTEA dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap I (1 Oktober 1962-1 Mei 1963) pejabat Belanda diganti dengan pejabat non-Belanda dan non-Indonesia. UNTEA diwajibkan melakukan diseminasi informasi kepada penduduk Irian mengenai transfer administrasi kepada Indonesia dan prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri seperti yang diatur dalam Persetujuan New York. Tahap kedua, dilakukan sesuai

³⁵ "Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Netherlands Concerning West New Guinea (West Irian)" ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Subandrio sebagai wakil Indonesia dan J. H. Van Roijen serta C. Schurmann sebagai wakil Belanda di Markas Besar PBB New York. Kedua pihak sepakat bahwa persetujuan ini harus diratifikasi sebelum pembahasan masalah Irian pada Sidang Majelis Umum PBB, dan mulai berlaku sejak diterima sebagai resolusi MU PBB serta berakhir apabila semua unsur yang ada telah dilaksanakan.

³⁶ Tentang Transfer administrasi dari Belanda kepada PBB diatur pada pasal 2-11; transfer administrasi dari PBB kepada Indonesia diatur dalam pasal 12 dan 13; sedangkan penentuan nasib sendiri (*self determination*) diatur dalam pasal 14-21. Lihat pada lampiran "Agreement Between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands Concerning West New Guinea (West Irian)", sign at the Headquarters of the United Nations, New York, on 15 August 1962.

perkembangan dilapangan dan tidak diikat dalam suatu kerangka waktu tertentu. Manakala PBB menganggap tepat waktunya, UNTEA akan melakukan transfer administrasi kepada Indonesia. Setelah itu semua aparat keamanan akan digantikan oleh Indonesia dan semua ketentuan hukum Indonesia segera berlaku. Setelah proses transfer administrasi selesai, akan dilakukan penentuan nasib sendiri (*Art of Self Determination*) yang prinsip-prinsip pelaksanaannya digariskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penentuan nasib sendiri harus nasehat, bantuan dan partisipasi PBB;
2. Prosedur penentuan nasib sendiri harus dimusyawarahkan dengan wakil-wakil rakyat;
3. Persyaratan untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri harus berdasarkan praktek-praktek internasional;
4. PBB dan Indonesia akan menyampaikan laporan pelaksanaan penentuan nasib sendiri kepada Majelis Umum PBB;
5. Indonesia dan Belanda akan mengakui dan terikat pada hasil penentuan nasib sendiri tersebut.

Dalam rangka melaksanakan mandatnya, PBB telah menunjuk Duta Besar Fernando Ortiz Sanz dari Bolivia sebagai wakil Sekjen PBB untuk melakukan tugas pemberian nasehat, bantuan, partisipasi dan pelaporan pelaksanaan penentuan nasib sendiri. Selama proses PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat), sebagai perwujudan penentuan nasib sendiri 2 Agustus 1962, Wakil Sekjen PBB telah berpartisipasi secara aktif sesuai dengan mandate dan tugasnya yang digariskan oleh persetujuan New York. Dalam laporannya kepada sidang majelis Umum PBB, Ortiz Sanz menyatakan antara lain.³⁷

The petitions opposing annexation to Indonesia ...show that without doubt certain elements of the population of the populations of west Irian held firm conviction in favor of independence. Nevertheless, the answer given by the consultative assemblies to the question to them was a unanimous consensus in favor of remaining with Indonesia.

³⁷ Deplu RI, "Sejarah Kembalinya Papua ke Pangkuan Republik Indonesia," Jakarta: Direktorat Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri, 1998.

Finally, on the basis of the facts presented in this report and the documents referred to, it can be stated that with the limitations imposed by geographical characteristics of the territory and the general political situation in the area, an act of free choice has taken place in West Irian in accordance with Indonesian practice, in which representatives of the populations have expressed their wish to remain with Indonesia.

Berdasarkan laporan tersebut di atas, Sidang Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1969 menetapkan resolusi no.2504 tentang pengesahan penentuan nasib sendiri di Irian Barat sesuai persetujuan New York. Sejak itu masyarakat internasional mengakui baik secara *de jure* maupun *de facto* wilayah Irian Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian disebut dengan Papua.

Walaupun proses integrasi sebagaimana digambarkan diatas nampak kuat dan legal, tetapi seperti yang akan terungkap pada bagian berikut, oleh sebagian masyarakat Irian proses tersebut dianggap kurang adil dan mengabaikan kepentingan mereka. Akibatnya menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian rakyat Irian yang selanjutnya mengakibatkan munculnya upaya separatis.

3.1.2. Perkembangan Isu Separatis

Penggabungan wilayah Papua ke dalam negara kesatuan RI menimbulkan kontrovesi di kalangan bangsa Papua sendiri. Di satu pihak terdapat kelompok yang mendukung kebijakan pemerintah RI untuk memasukkan wilayah Papua kedalam wilayah kedaulatan RI, sementara dipihak lain terdapat kelompok yang secara terang-terangan menentang tindakan tersebut.

Pada saat proses integrasi itu berlangsung sebagian orang dari kelompok penentang pergi meninggalkan Papua menuju Belanda, sebagian lagi menyebrangi perbatasan menuju Papua New Guinea (PNG) dan sisanya tetap tinggal di Papua dan mengasingkan diri di hutan-hutan. Kelompok ang terakhir ini menyatakan ingin berdiri sebagai negara dengan nama Papua Barat. Mereka menggalang

kekuatan, bergabung dan membentuk suatu organisasi yang bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berpusat di Biak Numfor.³⁸

Walaupun sulit untuk dikatakan bahwa semua penolak integrasi menjadi anggota OPM, namun aktivitas OPM cukup signifikan dalam memperjuangkan tuntutan-tuntutan kemerdekaan bangsa Papua. Bahkan sampai saat ini OPM merupakan satu-satunya Gerakan Papua Merdeka yang secara konsisten memperjuangkan aspirasinya, sekaligus sebagai identitas kolektif dan simbol perlawanan bangsa Papua menuju kemerdekaan. OPM didirikan pada 1 Desember 1961 di Hollandia (kini bernama Jayapura). Basis kegiatannya meliputi hampir seluruh daerah Papua, terutama daerah-daerah sekitar Jayapura, seperti Arso, Memberamo, Wembi, Sentani, Sarmi, Vyurup. Beberapa daerah PNG seperti Port Moresby, Black Water, Sepik, Sowampa dan Amanap juga digunakan kelompok tersebut untuk melaksanakan aksi massa.³⁹ Pendukung OPM terdiri dari beberapa kelompok, seperti kelompok Awom (yang paling dominan), kelompok James Nayro, kelompok Arnold, dan sebagainya yang masing-masing memiliki massa pendukung dari suku yang berbeda.

Secara umum, pendukung OPM dapat dikategorikan menjadi tiga golongan, yaitu: (a) masyarakat kelas bawah yang berasal dari kelompok suku yang tinggal di lokasi strategis; (b) masyarakat kelas menengah yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan pegawai negeri sipil yang melakukan desersi; dan (c) kalangan militer yang melakukan desersi. Sedangkan kegiatannya sebagian melibatkan unsur kekerasan fisik seperti, pembunuhan, penyiksaan, dan penyerangan pos-pos ABRI maupun non-kekerasan fisik pengibaran bendera OPM dan protes anti pemerintah.

Pendiri OPM adalah sebagian besar penduduk Papua barat yang mendapat pendidikan Belanda pada masa kekuasaan kolonial Belanda periode II (1944-1962). Di antara mereka adalah Markus Kaisiepo, Nicholas Jouwe, dan

³⁸ Kelompok-kelompok federalis diluar Jawa mendapat bantuan dari Belanda dan memperoleh simpati dari masyarakat Belanda. Bantuan itu antara lain diadakannya *crash program* atas kebijakan ekonomi dan politik berupa pembentukan Dewan Distrik untuk Biak-Numfor 1959, Dewan Papua New Guinea dengan mayoritas orang Irian terpilih yang di bentuk April 1966 serta membentuk bendera, lagu kebangsaan, pasukan militer serta janji kemerdekaan. Lihat Steven Harris dan Collin Brown, "Indonesia and Australia: The Papua Border Problem of 1984", *Australia-Asia Papers*, Research Paper no.29, Brisbane: Griffith University Press, 1985, hlm.3-4.

³⁹ Taufik Hidayat, "Organisasi Papua Merdeka: Suatu Studi Deskriptif tentang Latar Belakang dan Prospeknya", Surabaya, FISIP Universitas Airlangga, Skripsi S1, 1987, hlm. 84.

N.Tanggahma. Sebelum OPM secara resmi mengibarkan benderanya, yang secara implisit dan dianggap sebagai deklarasi pendirian negara Papua Barat, pada bulan oktober 1961 pemerintah Belanda membentuk Komite Nasional Papua. Komite ini kemudian mengeluarkan manifesto yang berisi: (1) penentuan bendera Papua; (2) penentuan lagu kebangsaan Papua; (3) mengganti nama bangsa menjadi Papua Barat; (4) mengusulkan agar bendera dikibarkan pada 1 November 1961.⁴⁰

OPM mempunyai dua basis kekuatan, yaitu basis kekuatan yang berada diluar wilayah Papua yang aktivitasnya berpusat pada masalah politis dan propaganda (basis eksternal) dan basis yang berada di dalam wilayah Papua, terutama di perbatasan PNG-Indonesia, yang aktivitasnya bersifat politis-militer (basis internal). Basis eksternal OPM didukung oleh kelompok-kelompok yang bersimpati pada gerakan-gerakan yang bertujuan '*self-determination*'. Secara sistematis basis eksternal ini mendapat dukungan moral dan financial yang menjamin keberlangsungan perjuangannya.

Pada awalnya OPM hanya diakui pemerintah RI sebagai kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan tidak terlalu dianggap sebagai gerakan pemisahan diri (separatis), walaupun sejak awal berdirinya kelompok ini sudah bersifat separatis. Hal ini bisa dilihat dari tujuan didirikannya OPM. Kelompok anti-integrasi ini memiliki seperangkat nilai yang mengikat mereka secara psikologis dan dijadikan sebagai alat pemersatu sehingga semakin memperkuat sifat separatisnya, yaitu teks proklamasi, lagu kebangsaan, bendera negara, hari kemerdekaan, dan nama negara. Teks proklamasi tersebut berbunyi :

To all the Papuan people, from Numbay Jayapura to Merauke, from Sorong to Baliem Star Mountains and from Biak tho the Isle of Adi: with God blessing, we take this opportunity to day to announce to you all thatthe land and the people of Papua have been declared to be free and independent (de facto and the jure). May God be with us, and let it be known to the world that the sincere wish of the Papuan people to be free and independent in their own country hereby fulfilled.

⁴⁰ Lihat juga Paul Barber, *Tapol*, the Indonesian Human Right Campaign, www.gn.ap.org/tapol

Lagu kebangsaan Papua adalah “Oh My Land Papua”, dengan bendera kebangsaan bernama “Morning Star” Negara mereka bernama Papua Barat yang di proklamasikan pada tanggal 1 Mei 1963.⁴¹

Dalam prosesnya, kegiatan-kegiatan OPM tidak hanya dilakukan dalam wilayah Papua saja tetapi juga dilakukan di wilayah Pasifik Selatan terutama di PNG. Didalam melancarkan propagandanya, OPM memanfaatkan konsep Solidaritas Persaudaraan Melanesia (*Melanesian Brotherhood Solidarity*), yang menghendaki agar negara-negara Pasifik Selatan yang memiliki kesamaan etnis bersam-sama mendukung tindakan OPM. Dalam hal ini OPM dapat dikatakan berhasil, terbukti dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh etnis Melanesia yang berada di wilayah PNG dan Vanuatu. Beberapa insiden perbatasan yang terjadi antara militer Indonesia dan PNG dan seringkali isu OPM digunakan oleh elit-elit politik PNG untuk mencari dukungan massa saat pemilu, menunjukkan bahwa gerakan ini mendapat simpati luas dikalangan rakyat PNG. Isu ini pada kenyataannya sering memicu konflik antara pemerintah RI dan PNG.

Menurut catatan sejarah bangsa Papua, sekali lagi bangsa Papua pernah menyatakan kebulatan tekad dan suara untuk merdeka pada tanggal 1 Juli 1960. Deklarasi tekad itu pernah diumumkan kepada dunia melalui pemerintah Belanda pada tanggal 1 Desember 1961. Persiapan kemerdekaan Papua ini adalah inisiatif Belanda. Atas desakan PBB melalui resolusi-resolusinya tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi wilayah dan masyarakat yang belum berpemerintahan sendiri, Belanda pada akhirnya merasa berkewajiban melaksanakan kemerdekaan Papua. Dalam rangka penegakan HAM tersebut, maka bangsa Papua telah dipersiapkan dini hari untuk mewujudkan Papua Barat yang merdeka dan berdaulat.⁴²

Pertemuan Rakyat Papua yang diselenggarakan pada tanggal 1 Desember 1961 itu sering disebut sebagai Kongres Rakyat Papua I. Setelah deklarasi pada 1 Desember 1961 tersebut terdapat serangkaian peristiwa penting yang menyangkut nasib bangsa Papua yang sekaligus melahirkan kekecewaan mendalam bagi mereka. Beberapa peristiwa tersebut, antara lain:

⁴¹ R.J May, ed., “Between Two nations: The Indonesian-Papua New Guinea Border and West Papuan Nasionalism”, Sydney; Robert Brown and Associates, 1986, hlm. 952.

⁴² Steven Harris dan Collin Brown, *Op.cit.*, hlm. 3-4.

- a. Diselenggarakannya Perjanjian New York pada tahun 1962. Perjanjian ini dianggap mengecewakan oleh rakyat Papua karena sebagai bangsa yang dibicarakan nasibnya, rakyat Papua tidak terwakili dalam perjanjian tersebut.
- b. Jangka waktu administrasi UNTEA yang seharusnya empat tahun (1963 sampai 1969) diperpendek menjadi delapan bulan dan kemudian wilayah tersebut diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1961.
- c. PT Freeport MacMoran, Inc. yang beroperasi di propinsi Papua menandatangani Kontrak Karya I pada tahun 1967, yaitu sebelum Papua resmi menyatakan kesiapannya bergabung dengan RI atau tidak.
- d. Penentuan Pendapat Rakyat (*the act of Free Choice*) yang dilaksanakan pada tahun 1969, merupakan pola Indonesia, yaitu sistem musyawarah. Hal ini dianggap menyalahi apa yang disepakati dalam New York Agreement yang menetapkan system *one man one vote*.

Kekecewaan bangsa Papua meningkat ketika pada tahun 1970 Belanda mengingkari janjinya untuk memproklamasikan kemerdekaan Papua Barat. Bahkan pada tahun 1972 pemerintah Indonesia mengganti nama Irian Barat menjadi Papua. Pada tahun ini pula untuk pertama kalinya rakyat Papua disertakan dalam pemilu. Tetapi sebagai akibat dari kekecewaan yang telah dialami oleh beberapa orang Papua, terjadi pengerasan sikap di kalangan mereka. Salah satunya ditunjukkan dengan memboikot Pemilu 1977, pemberontakan di Baliem dan Jayapura.

3.1.3. Faktor-Faktor yang Memperkuat Upaya Separatis

Kupasan singkat di atas setidaknya menunjukkan bahwa faktor penyebab awal yang menimbulkan gerakan separatis yang didukung sebagian masyarakat Papua ialah ketidakpuasan mereka terhadap proses integrasi ke wilayah RI yang dianggapnya kurang adil dan tidak mencerminkan aspirasi semua masyarakat. Disamping itu, masyarakat Irian semenjak awal juga berkeyakinan bahwa mereka memiliki hak untuk merdeka sebagai sesuatu bangsa sendiri.⁴³ Ada anggapan yang kuat pada sebagian masyarakat Irian bahwa silihat dari sudut faktor etnis,

⁴³ Otis Simopiaref, <http://www.irja.org/archiaves/2001.txt>

mereka tergolong dalam etnis Malenesia. Bangsa Papua merasa diri mereka berbeda dengan sebagian besar rakyat Indonesia yang didominasi oleh etnis Melayu.

Perasaan keterasingan itu kemudian didukung oleh sikap pemerintah Indonesia yang dianggap represif dan lebih mewakili kepentingan “Orang Jawa”. Dalam prosesnya, sebab-sebab awal gerakan separatistis ini diperkuat oleh faktor-faktor lain seperti diuraikan di dalam di dalam bagian berikut ini.

a. Eksploitasi Sumber Alam dan Perusakan Lingkungan

Bumi Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah. Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna dapat ditemukan disana, baik yang tersimpan di laut maupun didaratan seperti hutan-hutan tropis. Selain itu kekayaan alam berupa bahan-bahan mineral seperti perak, sulfur, emas, tembaga, batu bara, fosfat, dan minyak telah menjadikan Papua sebagai tanah tujuan bagi investasi asing.

Salah satu penanaman modal asing yang sudah lama beroperasi di Papua adalah PT Freeport MacMoran. Perusahaan multinasional penambangan milik Amerika Serikat ini bergerak di bidang penambangan, pemrosesan dan pemasaran tembaga, emas, perak, fosfat, sulfur, minyak, dan beberapa sumber alam lain. Perusahaan ini sudah menandatangani Kontrak Karya yang pertama kalinya pada tahun 1967 dan lokasi PT. Freeport terletak di dataran tinggi (kurang lebih 13.500 kaki di atas permukaan laut) yang merupakan habitat hidup suku Amungme di Timika.

Semenjak beroperasi, PT Freeport telah menempati dua situs, yaitu di Erstberg (yang kini sudah tidak produktif dan tidak dioperasikan lagi) dan Grasberg yang sampai saat ini masih beroperasi bahkan mengalami perluasan daerah penggalian. Kegiatan operasi penambangan PT Freeport memicu konflik antara penduduk lokal dengan investor yang dianggap telah melakukan berbagai macam pelanggaran dan perusakan. Limbah buangan (tailings) penambangan terbukti sangat berbahaya dan mencemari lingkungan.

Berikut ini adalah sebagai data tentang kerusakan lingkungan yang ditimbulkan yang akibat beroperasinya PT Freeport.⁴⁴ Tailings yang berwujud

⁴⁴ Lihat ‘PT freeportMcMoran environmental Issues’, <http://www.moles.org>.

batu-batuan di buang ke sungai Aghawaghon yang berlanjut ke Sungai Otoma, Sungai Ajkwa, Sungai Kopi, dan Sungai Minajerwi. Sungai-sungai ini sumbernya berasal dari gunung Erstberg dan Grasberg. Jumlah buangnya sekitar 285.000 ton per hari. Sebagai perbandingan pertambangan tembaga Ok Tedi Copper Mine, PNG, limbahnya berjumlah sekitar 80.000 ton per hari di sungai Fly. Sementara itu pengguna Mine di Bougenville, PNG, membuang limbah sekitar 130.000 ton per hari di Sungai Jaba. Saat ini daerah pertambangan ini ditutup karena tuntutan masyarakat sekitar.

Karena tuntutan internasional mengenai tanggung jawab masalah lingkungan, akhirnya PT Freeport setuju mengimplementasikan program monitoring lingkungan. Akan tetapi PT Freeport tidak menyediakan data sampel yang memadai karena perusahaan tersebut menolak mengizinkan institusi independen melakukan aktivitas monitoring di area pertambangan. Akibatnya informasi yang dapat dipercaya tentang dampak lingkungan di daerah tersebut sulit diperoleh.

Konsentrasi tembaga di sedimen Sungai Ajkwa, seperti yang dilaporkan oleh Australia and New Zealand National Health and Medical Research Council (NHMRC) dan sesuai dengan standar WHO, ditemukan mencapai 38 kali di atas level bahaya kontaminasi.

Air yang melintasi Sungai Ajkwa, berdasar sampel air yang telah diteliti, mendapat rating 'D', yang artinya sangat membahayakan kesehatan. Air tersebut mengandung lima jenis kontaminasi, di antaranya mengandung tembaga yang mencapai 10 kali melebihi ambang batas bahaya. Di samping itu tingkat konsentrasi merkuri mencapai 40 kali ambang batas bahaya. Jenis-jenis ikan tradisional seperti Yuaro, Lifao, Irao dan Ufuro dilaporkan musnah. Dengan demikian tingkat bahayanya telah mencapai tingkat sangat signifikan, melebihi ambang batas standar air yang boleh dikonsumsi.

Oleh karena itu, penduduk di sekitar Sungai Ajkwa telah diingatkan agar mereka tidak meminum air sungai tersebut dan memakan sagu yang tumbuh di dekat Sungai Ajkwa. Air sungai ini telah terkontaminasi oleh limbah yang menyebabkan kerusakan lingkungan berat. Akibatnya, muncul berbagai bahaya seperti matinya sumber-sumber daya kelautan seperti ikan dan terumbu karang,

munculnya berbagai jenis penyakit seperti penyakit kulit, gangguan kehamilan, dan berbagai jenis penyakit degeneratif lainnya. Dengan tingkat kontaminasi yang sedemikian tinggi maka seluruh ekosistem sungai terancam mati karena keasaman (*acidity*) lingkungan meningkat tajam.⁴⁵ Hal ini sangat berlawanan dengan laporan yang dikeluarkan oleh PT Freeport sendiri yang secara menyatakan: "...tidak terdapat ancaman kesehatan apapun bagi penduduk".⁴⁶

Pada bulan November 1996 Overseas Private Investment Corporation (OPIC) membatalkan asuransi tanggungan politik (*political risk insurance policy*) senilai kurang lebih US\$ 100 juta karena kegiatannya yang sangat membahayakan lingkungan. Namun demikian, sampai saat ini pemerintah Indonesia masih mempertahankan beroperasinya PT Freeport karena perusahaan ini merupakan aset pemerintah pusat. Keuntungan yang diberikan oleh PT Freeport kepada pemerintah Indonesia adalah sebagai salah satu pembayar pajak tertinggi, juga memberi royalti dan deviden terbesar. Pada tahun 1996, misalnya, Indonesia menerima sekitar US\$ 480 juta.⁴⁷ Ironisnya, walaupun PT Freeport mampu mencapai omzet sebesar US\$ 1,5 milyar per tahun, keuntungan ini tidak memberi dampak pada kemakmuran rakyat Papua. Dari kurang lebih 14.000 pegawainya, terdapat hanya 15% penduduk lokal yang pada umumnya bekerja sebagai pegawai rendah.⁴⁸

b. Pelanggaran HAM dan Militerisasi

Selain melakukan *eco-terrorism*, Pt. Freeport juga berperan dalam serangkaian pelanggaran HAM. Kasus – kasus pelanggaran ini sering menjadi sorotan internasional dan dinyatakan sebagai contoh *par excellence* hubungan erat antara militer dengan perusahaan multinasional. Di samping Timor Timur, distrik Timika sering digambarkan sebagai *the most militarized area* di Indonesia.⁴⁹ Kegiatan – kegiatan PT. Freeport dalam mengeksploitasi sumber – sumber alam, penggunaan tanah dan dampak kegiatannya yang membahayakan lingkungan

⁴⁵ Kirk M. Soodhalter; "Freeport MacMoran-Exporting Environmental Racism", diambil dari <http://www.tulane.edu>

⁴⁶ "Mining Gold, Undermining Justice...", <http://www.corpwatch.org>

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ "Copper Mining in Papua-Irian Case", <http://www.american.edu>

⁴⁹ "Mining Gold, Undermining Justice....", *loc. cit*

seringkali dilindungi oleh militer yang dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah RI.

Berikut ini adalah sebagian data tentang pelanggaran HAM dimaksud. Dalam masalah penggunaan tanah, PT. Freeport dikatakan sebagai “merampas” milik suku Amungme dan Komoro. Seperti yang dinyatakan oleh Tom Beanal, ketua LEMASA (Lembaga Masyarakat Adat Amungme), bahwa tanah dan gunung yang disakralkan pun telah dirusak tanpa rasa bersalah. Masyarakat Amungme menyatakan protes tapi banyak diantara mereka justru dibunuh dan disiksa. Menurut Human Rights Commission Report, pelanggaran HAM yang terjadi di daerah tersebut meliputi pembunuhan acak (*indiscriminate killings*) penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (*torture and inhuman/degrading treatment*), penahanan tidak berdasar (*unlawful arrest and arbitrary detention*), penghilangan (*disappereance*), pengamatan yang berlebihan (*excessive surveillance*), dan pengrusakan harta milik (*destruction of property*).⁵⁰

Untuk mendukung operasi – operasi ini (yang pada tahun 1977 bernama Operasi Tumpas), PT. Freeport menyumbang sejumlah dana. Untuk menjamin keberlangsungan aktivitas PT. Freeport di Grasberg, perusahaan ini menyediakan berbagai fasilitas seperti perumahan, makanan, dan transportasi. Sementara itu untuk meligitimasi tindakannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Keputusan Presiden No. 11/1963 tentang Undang-undang Anti-Subversi, Keputusan Presiden No. 8/1963 tentang hah-hak berpolitik.

Lebih jauh, seperti yang dilaporkan oleh Australian Council for Overseas Aid (ACFOA), Bishop Muninghoff di Jayapura serta Amnesty Internasional, pelanggaran HAM juga meliputi pemerkosaan, penghilangan tanpa jejak, pembunuhan dan pemenjaraan tanpa pengadilan. Pemerintah RI dianggap telah melakukan *state terrorism* dengan memberlakukan sistem pertahanan teritorial.⁵¹ Serangkaian penahanan, penyiksaan, intimidasi dan pengawasan ketat diberlakukan dengan dalih untuk melumpuhkan aktivitas OPM. Sejumlah besar

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ John Otto Ondawame, “Colonisation is the Root of Political Problem: the Case of Indonesia in the West Papua”, <http://www.pasifika.net>.

orang sipil dan anggota OPM dibunuh. Seperti yang ditulis oleh Lagerberg Kees (1979) dan Zonggonau et al. (1997), sekitar 30% penduduk Papua dibunuh, hilang, dan dipenjarakan tanpa diadili selama tahun 1962-1987. PT Freeport dan pemerintah Indonesia menolak keterlibatannya, bahkan sebaliknya, menuduh OPM yang melakukan pembunuhan penduduk sipil. Militer dianggap melakukan politik *divide and rule* di kalangan penduduk lokal.

Menurut Ondawame, rakyat Papua didiskriminasi secara sistematis atas dasar ras dan agama karena mereka sering dianggap sebagai ras inferior, pemalas dan tidak berguna. Selama periode masa Transisi tahun 1963, contohnya, orang-orang Papua yang bekerja sebagai pegawai di instansi pemerintah digantikan posisinya oleh orang-orang non-Papua, terutama Jawa. Mereka juga dikirim ke berbagai kota di Jawa untuk diikutsertakan dalam program 'pendidikan kembali' (*reeducation*).⁵²

c. Marjinalisasi Sosial dan Budaya

Seperti telah disebutkan di depan, salah satu penyebab munculnya upaya separatistis masyarakat Irian ialah karena secara fisiologis merasa berbeda dengan sebagian besar rakyat Indonesia. Konsep "Persaudaraan Melanesia" menjadi landasan kuat bagi alienasi kultural mereka di tengah-tengah kuatnya budaya Melayu. Sindrom alienasi ini semakin dirasakan dengan dilaksanakannya program-program pemerintah seperti transmigrasi dan Keluarga Berencana.

Seperti diketahui, propinsi Papua adalah salah satu daerah tujuan program transmigrasi yang memindahkan penduduk dari pulau-pulau padat terutama Jawa dan Bali. Secara resmi target utama transmigrasi adalah pemerataan distribusi penduduk agar tidak terjadi konsentrasi di pulau-pulau padat penduduk tersebut. Tujuan lainnya adalah agar terjadi asimilasi diantara sesama penduduk Indonesia. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah demi alasan keamanan yang berlandaskan konsep Wawasan Nusantara dan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta.

Akan tetapi implementasi program-program ini juga menimbulkan sejumlah kontroversial. Bagi rakyat Papua, transmigrasi memiliki arti yang berbeda. Secara positif, datangnya para transmigran membawa pengetahuan dan

⁵² *Ibid*

wawasan baru bagi penduduk setempat. Akan terjadi pula perubahan demografis yang membawa implikasi sosial, politik dan ekonomi yang negatif pada penduduk lokal. Banyak diantara rakyat Papua beranggapan bahwa transmigrasi merupakan salah satu upaya marjinalisasi budaya Papua (dengan melakukan jwanisasi). Dalam jangka waktu 20 tahun sejak integrasi, penduduk Papua berlipat ganda menjadi 2,4 juta jiwa dan diproyeksikan menjadi 3,9 juta orang pada tahun 2010. Saat ini terdapat lebih dari 70% penduduk Papua yang lahir di luar Papua yang menempati berbagai kota besar d propinsi ini, baik sebagai transmigran spontan maupun yang disponsori oleh pemerintah.⁵³

Tanah-tanah yang digunakan oleh pemerintah untuk lahan pemukiman transmigrasi dilaporkan merupakan hasil "rampasan" milik penduduk lokal karena kepemilikannya dilakukan tanpa berkonsultasi dengan pemiliknya, juga tanpa kompensasi yang memadai. Distrik Timika sendiri merupakan penerima sekitar 11.000 orang transmigran yang terdiri dari 2.300 keluarga.⁵⁴ Daerah lain yang menjadi lahan penempatan transmigran adalah sepanjang Indonesia-PNG, di dekat dua kota besar Jayapura dan Merauke.

Dampak dari meningkatnya jumlah transmigran adalah semakin terbatasnya kesempatan kerja bagi rakyat Papua. Para pendatang pada umumnya menempati wilayah-wilayah strategis, seperti daerah pertambangan, sepanjang perbatasan, dan pusat-pusat kota. Mereka biasanya menguasai bisnis kecil dan menengah. Sebaliknya, penduduk lokal bekerja sebagai tenaga kerja tidak terlatih (*unskilled workers*) dengan gaji rendah. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan penduduk lokal, yang menurut anggapan mereka tidak mendapat akses yang sama dsalam hal pendidikan.

Situasi ini oleh masyarakat Irian telah menyalahi Perjanjian Bersama yang dibuat pada tahun 1974 antara penduduk lokal, pemerintah, dan PT Freeport MacMoRan tentang Pendidikan dan Latihan. Akibat dilanggarnya perjanjian itu, banyak penduduk lokal yang putus sekolah yang menyebabkan meningkatnya

⁵³ <http://www.utexas.edu>

⁵⁴ "The Impacts of Freeport Mining Activities on the People of West Papua", *Kabar Irian*, <http://www.freedom.frogspice.net>

krisis sosial seperti kejahatan, alkoholisme, prostitusi, dan pornografi di kalangan pemuda.⁵⁵

Selain itu penduduk pedalaman seperti Suku Dani dan Mbua kehilangan *way of life* akibat deforestasi yang mengharuskan mereka hidup di wilayah sempit untuk dapat tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan hidup mereka yang sehari-harinya mereka dapatkan dari hutan. Hutan-hutan tersebut telah berubah menjadi daerah pemukiman transmigrasi. Sebagian penduduk pedalaman yang biasa hidup di pegunungan terpaksa harus pindah ke dataran rendah sehingga banyak di antara mereka yang terjangkit penyakit seperti malaria yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Tingkat prevalensi malaria mencapai 68%, namun kemudian berhasil diturunkan menjadi 2-8% dengan bantuan dari berbagai pihak seperti PT. Freeport yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, Universitas Indonesia, Unit Riset Medis Angkatan Laut Amerika dengan bantuan masyarakat.⁵⁶

Di samping itu, program transmigrasi ini oleh sebagian besar penduduk Papua dipandang sebagai upaya Indonesianisasi. Ondawame menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian mendasar antara UUD 1945 dengan hukum adat Papua dalam hal kepemilikan tanah.⁵⁷ Persepsi konflik dua perangkat hukum itu terletak pada sifat inklusif UUD 1945 dan eksklusif hukum Papua. Sementara pemerintah memandang seluruh bagian dari bumi Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat, bangsa Papua beranggapan bahwa bumi Papua secara eksklusif adalah milik kolektif rakyat Papua yang tidak mengakui sebagai bagian dari rakyat Indonesia.

Program Keluarga Berencana (KB) juga menjadi bagian keresahan rakyat Papua. Pembatasan untuk hanya boleh memiliki dua anak dianggap sebagai upaya pemusnahan ras Melanesia di bumi Papua. Kenyataannya, status gizi yang buruk dan perawatan kesehatan yang rendah telah mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi terutama di antara anak-anak balita. Mereka menuduh pemerintah melakukan praktek *genocidal policy* dengan membatasi tingkat kelahiran. Kecurigaan ini diperkuat dengan tidak seimbangnya jumlah klinik-klinik KB yang

²² *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

²⁴ John Otto Ondawame, "Colonisation is the Root of Political Problem: the Case of Indonesia in the West Papua", <http://www.pasifika.net>.

lima kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah rumah sakit umum dan tenaga medisnya. Freeport telah membangun beberapa puskesmas di Banti, Arwanop, Kwamki Lama dan Mapurajaya dengan fasilitas sangat terbatas, sementara mereka harus membayar sangat mahal untuk dapat menggunakan fasilitas yang memadai di rumah sakit.

d. Perubahan Situasi Internasional

Perubahan situasi internasional pasca Perang Dingin dan proses demokratisasi internasional membawa implikasi yang luas bagi bangsa-bangsa yang menuntut *self determination*. Meredanya ketegangan Barat-Timur yang sebelumnya syarat dengan isu-isu *high politics*, mendorong masyarakat internasional semakin hirau terhadap isu-isu *low politics*. Konsentrasi perhatian internasional beralih dari konflik-konflik berskala internasional yang disponsori oleh negara ke konflik-konflik internal serta isu-isu domestik yang berdampak internasional.

Bersamaan dengan itu terjadi pula proses demokratisasi yang berjalan simultan dengan meredanya ketegangan Barat-Timur. Proses demokratisasi ini memungkinkan pentingnya penegakan isu-isu seperti HAM dan lingkungan hidup dan batas teritorial negara tidak lagi menjadi hambatan untuk memberi perhatian terhadap isu-isu tersebut. Akibatnya, negara-negara yang di anggap bermasalah dalam isu-isu tersebut di tuntutan untuk berlaku lebih adil dengan memberi kesempatan pada kelompok-kelompok di dalam negeri untuk menentukan nasib sendiri.

Meningkatnya perhatian negara-negara dan masyarakat internasional pada umumnya terhadap isu-isu berkarakter *low politics* dengan sendirinya mengakibatkan mudahnya isu separatis Irian mendapat perhatian internasional, terutama karna masalah pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan menjadi salah satu dimensi penting yang berkaitan dengan isu separatis Papua. Dengan demikian, dapatlah di katakan bahwa perubahan situasi internasional membuka peluang sekaligus harapan bagi gerakan-gerakan yang berjuang untuk memperbaiki apa yang di rasakan sebagai ketidakadilan dan terjadinya pelanggaran HAM. Perjuangan masyarakat Timor Timur hingga berhasilnya

mereka keluar dari negara kesatuan Indonesia adalah salah satu contoh bagaimana perubahan situasi internasional memainkan peranan yang instrumental terhadap keberhasilan perjuangan memperoleh kemerdekaan Timor Timur.

Fenomena inilah yang nampaknya juga ikut memperkuat keyakinan kelompok-kelompok masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri, bahwa situasi internasional yang ada memberi kemungkinan kepada mereka untuk mendapat perhatian dan sekaligus bantuan terhadap perjuangan mereka. Fakta telah menunjukkan adanya upaya internasionalisasi masalah separatis di Papua melalui pernyataan kemerdekaan Papua dalam kongres rakyat Papua 11 Mei 2000. Adapun salah satu poin penting resolusi tersebut secara eksplisit menyinggung mengenai perlunya dukungan internasional.⁵⁸

Indikasi mengenai adanya dukungan internasional, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, terhadap upaya separatis Papua nampaknya cukup luas. Sebuah seminar tentang Papua Barat pada tanggal 20 November 1999 yang diorganisir oleh the Foundation for Studies and Information of Papuan Peoples berhasil mempengaruhi Menteri Luar Negeri Belanda, J. J van Aartsen, untuk menyetujui suatu investigasi terhadap situasi yang terjadi ketika Papua Barat masuk ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.⁵⁹ Selanjutnya, beberapa Senator Partai Buruh Australia dari Fraksi Kiri jugateelah mulai menjadikan isu separatis Papua sebagai salah satu soal yang diangkat di dalam perdebatan di Parlemen Australia.⁶⁰ Sementara itu, adanya dukungan terhadap kemerdekaan Papua yang datang dari dua negara di Pasifik, yaitu Vanuatu dan Nauru, merupakan sebuah pertanda bahwa strategi yang dilakukan oleh kelompok separatis ini dapat menjadi ancaman serius bagi politik luar negeri RI.⁶¹

e. Momentum Reformasi

Perubahan iklim reformasi politik Indonesia yang bergulir semenjak jatuhnya rejim Soeharto dapat juga dipandang sebagai salah satu faktor yang ikut memperkuat gerakan separatis di Papua. Perubahan iklim politik Indonesia yang

⁵⁸ "Resolution from the Papuan People's Congress" Appendix dalam Dr. J. R. Verrier, *loc. cit.*

⁵⁹ *Pasific News Bulletin*, December 1999, h. 3.

⁶⁰ Senate, *Debates*, 23 November 1999, h. 10423.

⁶¹ Papua Could Follow Timor Way," *The Age*, 9 November 2000.

semakin terbuka terutama semenjak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ternyata telah memungkinkan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengekspresikan secara terbuka aspirasi dan kepentingannya.

Iklim keterbukaan politik ini rupanya ikut memberi kontribusi terhadap menguatnya upaya memisahkan diri Papua yang disuarakan oleh sebagian masyarakatnya. Hal ini terlihat jelas dengan berhasilnya mereka menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua II.

Kongres Rakyat Papua II (KRP II) yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 3 Juni 2000 merupakan kelanjutan KRP I yang mengesahkan berdirinya Negara Papua Barat pada tanggal 1 Desember 1961. KRP II dihadiri oleh wakil-wakil dari kurang lebih 250 suku yang berasal dari 10 pulau di wilayah propinsi Papua dan memperoleh simpati dari beberapa negara yang menghadirkan diri sebagai pengamat, seperti PNG, Australia, Amerika, Jepang, dan Belanda.

Kongres yang secara resmi bernama Kongres Nasional Papua Barat II ini dapat dianggap sebagai titik balik gerapan OPM karena dalam kongres itulah untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia secara resmi mengakui keberadaan gerakan itu. Presiden Abdurrahman Wahid bahkan member bantuan financial sebesar Rp. 1 miliar demi suksesnya acara tersebut dan mengizinkan berkibarnya bendera Bintang Kejora bersama-sama dengan bendera Merah Putih di sekitar tempat berlangsungnya kongres. Selain itu, Presiden juga mengizinkan penggunaan nama Papua untuk menggantikan nama Irian.

Secara resmi Kongres tersebut menyatakan:⁶²

- a) Secara *de facto* rakyat Papua sudah berdaulat sejak 1 Desember 1961
- b) menolak isi Perjanjian New York 1962 yang dianggap cacat secara hukum dan moral karena tidak melibatkan wakil-wakil dari Papua.
- c) menuntut PBB mencabut Resolusi Sidang Umum No. 2504 tanggal 19 Desember 1969 yang isinya mensahkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA – *Act of Free Choice*).
- d) meminta PBB, AS dan Belanda untuk meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses integrasi Papua ke dalam wilayah RI.

Dari KRP II itu dihasilkan beberapa keputusan pokok, yaitu:

⁶² Departemen Luar Negeri RI, Kedubes RI di London, "Komitmen Pemerintah atas Penyelesaian Berbagai Masalah di Tanah Air", *Warta Indonesia*, <http://www.dfa-deplu.go.id>

- a) pelurusan sejarah Papua.
- b) adanya izin Lembaga Adat Papua bagi operasional PT Freeport Indonesia.
- c) Pengembalian hak ulayat rakyat Papua.
- d) Koreksi terhadap penyelenggaraan transmigrasi yang telah merampas hak ulayat rakyat.

Pemerintah Indonesia secara tegas menolak pernyataan hasil kongres tersebut dan menyesalkan sikap para pemimpin Papua yang melanggar janji dan komitmen mereka pada pemerintah bahwa, kongres semata-mata bertujuan memberikan kesempatan pada rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka dan meninjau kembali sejarah Papua dalam kerangka menghormati sepenuhnya kesatuan nasional wilayah RI. Pemerintah juga kecewa pada sikap pemimpin kongres yang telah berjanji bahwa semua orang Papua boleh ikut dan tidak akan mengikutsertakan warga negara asing.⁶³

Sikap pemerintah selanjutnya atas kekecewaan itu adalah dengan dilarangnya pengibaran bendera bintang kejora mulai 1 Desember 2000,⁶⁴ dan menutup semua pos gerakan separatis di wilayah Papua dan membubarkan sayap militer OPM, yakni tentara Pembebasan Nasional (TPN).⁶⁵ Pemerintah juga menangkap Ketua Presidium Papua (PDP), Theys Hiyo Eluay dan sekjen PDP, Thaha Al Hamid, yang bermaksud menyelenggarakan peringatan Hari Kemerdekaan Papua pada 1 desember 2000.⁶⁶

Resolusi yang disetujui oleh kongres tersebut kenyataannya dapat dianggap sebagai suatu deklarasi kemerdekaan dan karenanya melanggar UUD 1945. Resolusi itu juga bertentangan dengan tujuan – tujuan prinsip piagam PBB yang melarang setiap integritas negara sebagaimana yang ditegaskan dalam Resolusi Sidang Umum PBB No. 1514 tanggal 14 Desember 1960 mengenai Deklarasi kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Jajahan. Sikap pemerintah RI masih konsisten bahwa untuk menyelesaikan masalah separatis Papua, pemerintah tetap teguh memelihara proses dialog dengan rakyat di propinsi itu. Pemerintah

⁶³ *Kompas*, 25 Maret 2000

⁶⁴ "Separatist flags in Papua to be Lowered after Dec.1", *The Jakarta Post*, 10 November 2000.

⁶⁵ "Papua Liberation Forces Disbanded", *The Indonesian Observer*, 13 december 2000

⁶⁶ "Police Arrest Chief of Papua Council", *The Jakarta Post*, 28 November 2000

sepenuhnya menyadari terdapat masalah – masalah mendasar di Papua akibat ketidakadilan, eksploitasi ekonomi dan pelanggaran HAM.⁶⁷

3.1.4. Aktivitas Politik Gerakan Papua Merdeka⁶⁸

Mencermati kegiatan OPM dan beberapa LSM yang bersimpati terhadap Gerakan Separatis Papua di luar negeri, khususnya di kawasan Pasifik Selatan, Eropa, Amerika dan Afrika; tampak masih tetap melakukan lobi internasional dengan mengedepankan isu masalah pelanggaran HAM, persamaan hak penduduk asli (*Indigenous People*), review PEPERA 1969, dan kemerdekaan Papua.

Berbagai elemen di luar negeri, khususnya kalangan NGO asing di berbagai negara yakni Australia, Belanda, Inggris, Kanada, Irlandia, Amerika Serikat, PNG, Fiji, dan Selandia Baru masih memberikan respon dan dukungan terhadap perjuangan Papua Merdeka. Demikian juga beberapa kalangan parlemen asing seperti Irlandia, Belanda, Australia, Inggris dan Selandia Baru.

Selain meminta dukungan dari NGO asing di luar negeri, perwakilan-perwakilan Gerakan Papua Merdeka juga membentuk organisasi sendiri yang tersebar di beberapa negara Pasifik, Eropa hingga Amerika Serikat.

1. Organisasi Sayap Gerakan Papua Merdeka
 - a. Gerakan Separatis Papua telah membentuk suatu wadah "United West Papua National Council for Independence" (UWPNACI) /Dewan Kesatuan Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan pada tanggal 7 - 9 Juni 2004 di Vanimo, PNG. UWPNACI memiliki agenda politik dan program kerja. Agenda politik antara lain review dan pencabutan kembali dokumen PEPERA 1969 di PBB; proses peralihan dan pembentukan negara dan pemerintahan definitif Papua; keanggotaan PBB dan pembentukan manajemen diplomatik untuk persahabatan sesama masyarakat internasional.
 - b. Upaya gerakan Separatis Papua dalam menginternasionalisasi masalah Papua diorganisir dalam wadah *Free West Papua Organization (FWPO)* yang dipelopori Benny Wenda, sebagai organisasi utama yang berpusat di Inggris.

⁶⁷ Departemen Luar Negeri RI, Kedubes RI di London, "Komitmen Pemerintah atas penyelesaian Berbagai Masalah di Tanah Air", *loc. cit.*

⁶⁸ Sumber tertutup.

FWPO memiliki sub organisasi diantaranya *International Parliamentary for West Papua* (IPWP), *International Lawyer for West Papua* (ILWP) dan *Free West Papua Campaign* (FWPC). FWPO memiliki beberapa jaringan tersebar melalui *cyber media* di berbagai negara seperti Amerika, Australia, Belgia, Belanda, Fiji, Hong Kong, Jerman, Indonesia, Irlandia, Inggris, Papua New Guinea, dan Selandia Baru. Adapun isu-isu yang sering diangkat di dunia internasional terutama adalah mengenai pelanggaran HAM di Papua.

- c. Kegiatan propaganda yang menyuarakan Papua merdeka secara intens terus dilakukan oleh Gerakan Separatis Papua, kemudian dikembangkan dengan pembentukan *International Parliamentary for West Papua* (IPWP) pada 15 Oktober 2008 di Inggris dengan tujuan menggalang dukungan dari parlemen di dunia untuk membangun jaringan, melobi pemerintah-pemerintah, PBB dan kawasan regional serta lembaga-lembaga internasional lainnya. Selain itu, secara khusus adalah melobi Pemerintah Inggris sebagai anggota Uni Eropa.
- d. *International Lawyers for West Papua* (ILWP) dideklarasikan pada 3-5 April 2009 di Georgetown, Guyana sebagai bentuk pergerakan bagi kemerdekaan Papua melalui jalur advokasi hukum, diharapkan dapat menjadi wadah bagi *International Lawyers* berasal dari seluruh dunia untuk mendukung *right of determination* bagi rakyat Papua. Namun demikian, ILWP yang dideklarasikan di Guyana tidak mendapat respon positif di kalangan media internasional dalam pemberitaannya. IPWP dan ILWP diklaim sebagai satu kesatuan utuh ibarat "Ayah dan Ibu" yang siap dan tetap berkomitmen pada perjuangan *self of determination* bagi masa depan rakyat Papua.

2. NGO Asing yang Mendukung Gerakan Papua Merdeka

NGO Internasional yang sering mengangkat masalah HAM di Papua diantaranya *Amnesty International* (AI), *Asian Human Right Commission* (AHRC), *Asian Legal Resource Centre* (ALRC), *Institute for Papuan Advocacy and Human Right* (IPAHR / ELSHAM), *Human Right Watch* (HRW), *Asian Indonesia and Tribal People Network* (AITPN); *Internationl Crisis Group*; *Human Rights First* (HRF); *Australia West Papua Association* (AWPA); *Pacific*

Caucus; Reporter Without Border (RSF); International NGO Forum on Indonesian Development (INGOFID); TAPOL; Commission of the Churches on International Affairs of the World Council of Churches (CCIAWCC); Society for Threatened Peoples (STP); Unrepresented Nations and People Organisation (UNPO); Justice and Peace Netherlands; Cordaid-NGO with General Consultative Status; West-Papua-Network Germany; United Evangelical Mission (UEM).

Human Right Watch (HRW) sudah menerbitkan empat buah laporan terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Papua; *Kopassus Siksa Orang Papua di Merauke (2009)*, *Protes dan Hukuman Tahanan Politik di Papua (2007)*, *Endemic Abuse and Impunity in Papua's Central Highlands (2007)*, *VIOLENCE AND POLITICAL IMPASSE IN PAPUA (2001)*. Selain itu juga, HRW

Selain itu, di regional Asia juga tersebar melalui *Asia Pasific Solidarity Network (APSN)* yang membahas seputar isu-isu aktual di kawasan Asia Pasifik; termasuk isu Papua. APSN mengangkat isu-isu Papua melalui jaringan media internasional diantaranya *ABC News Asia, ABYZ News Links Asia, Asia Daily, AsiaNet News, Asia News Network, Asia-Pacific News, Asia Times, Asian Observer, BBC News Asia Pacific, Channel News Asia Pacific, Radio Australia Asia Pacific News, Radio New Zealand*, dll.

Isu HAM merupakan salah satu isu yang bersifat *universal*, karena dianggap sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap HAM dapat mendorong keterlibatan individu, lembaga dan bahkan negara untuk menyuarakan setiap pelanggaran HAM melalui mekanisme tertentu kepada lembaga-lembaga di tingkat nasional maupun internasional, seperti LSM atau NGO.

LSM/NGO memiliki sistem jaringan kerja global yang melibatkan LSM/NGO yang bergerak dibidang HAM di seluruh dunia. Informasi awal pelanggaran HAM yang diperoleh baik dari individu maupun jaringan LSM lokal, akan segera disebarluaskan kepada LSM/NGO di luar negeri menggunakan sarana komunikasi jaringan internet. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, seluruh NGO/LSM baik yang berada di luar maupun dalam negeri akan menerima data pelanggaran HAM tersebut secara cepat pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya,

masing-masing LSM/NGO akan melaporkan data pelanggaran HAM tersebut, kepada badan-badan PBB dan special rapporteur yang memantau masalah HAM di seluruh dunia, melalui mekanisme mereka masing-masing. Sistem jaringan kerja global LSM dan NGO ini memang sangat sulit untuk dicegah, karena memanfaatkan jaringan internet yang sudah mendunia.

Mencermati perkembangan isu pelanggaran HAM yang semakin di *blow up* di dunia internasional oleh LSM/NGO lokal maupun internasional melalui internet maupun pelaporan ke forum-forum PBB, serta forum-forum internasional semakin menambah permasalahan dalam menyelesaikan konflik Papua secara adil dan bermartabat. Hal tersebut, dikarenakan lemahnya upaya pemerintah dalam mengcounter isu-isu Papua dan kurang maksimalnya program Otonomi Khusus sebagai solusi penyelesaian masalah Papua. Upaya para Duta Besar Indonesia di luar negeri untuk mengcounter isu-isu tersebut juga dinilai sangat kurang.

Potensi peningkatan penggalangan negara-negara internasional oleh kelompok-kelompok perjuangan kemerdekaan Papua melalui LSM/NGO lokal dan internasional dengan menggunakan isu pelanggaran HAM dan gagalnya Otonomi Khusus masih sangat tinggi, mengingat aturan hukum yang belum maksimal diterapkan dan lemahnya pengawasan pemerintah untuk mengcounter isu tersebut, serta kurang optimalnya Otonomi Khusus dalam penyelesaian masalah Papua secara adil dan bermartabat. Hal tersebut, terindikasi dari meningkatnya pemberitaan melalui situs-situs (website) yang dikelola jaringan kelompok Papua Merdeka, baik lokal maupun internasional dan pemanfaatan forum PBB, forum-forum di kawasan Asia, Amerika, Australia dan negara lain yang terindikasi mendukung gerakan Papua Merdeka.

Lobi internasional Gerakan Papua Merdeka dalam forum internasional memiliki sasaran agar PBB, sebagai badan yang mewakili kekuatan seluruh negara di Dunia, agar memperhatikan permasalahan yang terjadi di Papua, layaknya ketika lepasnya Timor Timur (Timor Leste red.) yang merupakan intervensi PBB dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi disana. Hal serupa juga diharapkan oleh Gerakan Papua Merdeka sehingga kemerdekaan Papua dapat terwujud melalui referendum ulang, dimana PEPERA 1969 dinilai tidak sah karena tidak bersifat "one man, one vote." Selain PBB, dukungan nyata juga

datang dari kongres AS, yaitu Eni Faleomavaega (Ketua Sub-Panitia Departemen Luar Negeri untuk Asia, Pasifik dan Masyarakat Global) yang merupakan perwakilan Vanuatu dalam Kongres AS. Eni Faleomavaega juga sudah dua kali melakukan kunjungan ke Indonesia dan Papua (2007, 2010) dengan pernyataan yang mendukung sepenuhnya Otsus Papua dan upaya Pemerintah RI terhadap Papua, tetapi malah memprakarsai Public Hearing di Kongres AS terkait permasalahan Papua. Hal menjadi peluang dan pembangkit semangat bagi perjuangan Gerakan Papua Merdeka.

1. Internasionalisasi Masalah Papua ke PBB

Beberapa isu pelanggaran HAM Papua yang dominan diangkat oleh LSM dan NGO pada forum PBB diantaranya :

- a. Kekerasan dan penyiksaan a.l : Kasus Abepura (Desember 2000), Wasior (Juni 2001), Wamena (April 2003), Abepura Berdarah (Maret 2006). Pembunuhan aktivis Papua Merdeka dan aktivis HAM seperti pembunuhan Theys Hiyo Eluay (2001) dan Opinus Tabuni (2008), kekerasan pada aktivis HAM, masyarakat sipil dan tahanan dari tahun 2004 s.d 2007 dan bentrokan antara masyarakat dengan Polisi di Jayawijaya (Maret 2006).
- b. Diskriminasi rasial dan program transmigrasi, a.l : Pembangunan Papua tidak berdasarkan nilai-nilai lokal, kurangnya kebijakan *affirmative* dalam bidang kehidupan, serta tindakan diskriminasi dan stereotipe terhadap orang Papua dalam dunia kerja. Perampasan tanah adat akibat program transmigrasi dan pembangunan kamp militer tanpa memberikan kompensasi yang berimbang pada masyarakat adat, sehingga membuat masyarakat adat semakin terpinggirkan dari tanahnya sendiri.
- c. Kekerasan dan penangkapan oleh aparat pada kasus pengibaran bendera Bintang Kejora dari tahun 1998 s.d 2008. Operasi TNI dan Polri (Paniai - 1998, Puncak Jaya- 2004 dan 2005, Tolikara-2005).
- d. Pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta intimidasi terhadap masyarakat sipil, aktivis HAM, pengacara dan jurnalis dalam proses pemantauan situasi di Papua .
- e. Kegagalan pemerintah dalam memberikan standar hidup layak bagi masyarakat dan pelanggaran pelaksanaan Otsus :

Mekanisme yang digunakan melaporkan masalah pelanggaran HAM ke forum PBB antara lain melalui :

- 1) *Treaty based mechanism*. Merupakan mekanisme pengaduan yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi-konvensi HAM Internasional.
- 2) *Charter based mechanism*. Adalah prosedur penegakan HAM yang tidak dibentuk oleh konvensi-konvensi HAM akan tetapi berdasarkan piagam PBB melalui Komisi HAM, Sub-Komisi HAM, Prosedur 1503, dan *Special Rapporteur* (SR) atau *working group*.
- 3) *Universal Periodic Review (UPR)*. UPR adalah mekanisme yang dibentuk PBB sebagai wadah menyampaikan laporan pertanggung jawaban negara-negara anggota PBB dan badan-badan PBB, LSM-LSM HAM di negara tersebut, serta LSM Internasional sebagai pemenuhan kewajiban Internasionalnya dibidang HAM.
- 4) Melalui intervensi dalam sidang-sidang tertentu di PBB, seperti sidang Tahunan *United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues* (UNPFII); yang merupakan forum utama di PBB (New York, AS). Umumnya digunakan oleh pihak-pihak non-Pemerintah, termasuk organisasi-organisasi berbasis pendekatan bangsa-bangsa asli (*indigenous peoples*).

2. Public Hearing Kongres AS

Berbagai upaya kelompok separatis untuk mencari dukungan agar Papua lepas dari kedaulatan NKRI terus dilakukan melalui berbagai forum legislasi berskala nasional maupun internasional, diantaranya dengan memberikan masukan kepada Kongres AS mengenai pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat secara tidak proporsional. Pada 22 September 2010, di Washington DC akan dilaksanakan "*Congressional hearing in Washington DC on the Human Rights Crisis in Papua and West Papua*" dihadiri oleh Octovianus Mote (aktivis OPM di AS/mantan Wartawan Kompas), Eben Kirksey, PhD (ahli Papua Barat di AS), Pieter Drooglever (penulis "*An Act of Free Choice*"), Sophie Richardson, PhD (aktivis *Human Rights Watch*), Joseph Y. Yun (Bureau of East Asian and Pacific Affairs), Robert Scher (Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia), Henkie Rumbewas (Australia West Papua Association/AWPA),

Nicholas Simeone Messet, dan Salamon Maurits Yumame (FORDEM) yang memberikan kesaksian dalam forum tersebut.

Dalam hal ini, Octovianus Mote telah mengidentifikasi 3 hal utama untuk mewujudkan keadilan di Papua Barat. *Pertama*, pemberian donasi dilakukan sejak awal untuk mendukung pelaksanaan sidang Kongres-AS di Washington DC. *Kedua*, bagi yang tinggal di Amerika Serikat, diharapkan memberikan dukungan kepada anggota Kongres AS pada H.Res.1355 melalui aksi unjuk rasa guna mendorong anggota Kongres AS memperhatikan pelaksanaan hak asasi manusia, sekaligus mendesak agar pemerintah Indonesia menghormati hak-hak masyarakat Papua dan Papua Barat. *Ketiga*, melakukan pendaftaran keikutsertaan dalam mendukung pelaksanaan sidang Kongres AS tersebut.

3.1.5. Aktivitas Bersenjata Gerakan Papua Merdeka

Perjuangan Papua Merdeka masih intens dilakukan oleh Gerakan Separatis Bersenjata melalui TPN/OPM, sejak bulan Januari s/d Nopember 2010 paling tidak telah melakukan 13 kali penyerangan yang mengakibatkan korban jiwa maupun materi. Penyerangan dilakukan untuk menunjukkan eksistensi Gerakan Papua Merdeka, memelihara semangat kemerdekaan serta menyuarakan tuntutan kemerdekaan; dengan sasaran TNI/Polri, masyarakat pendatang maupun warga asing, serta objek-objek vital, seperti PT.FI. Beberapa kegiatan Gerakan Separatis Bersenjata di tahun 2010 antara lain :

1. Pada 24 Januari 2010 pk1. 06.15 WIT di Mile 60-61 Area PTFI Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika telah terjadi aksi penembakan terhadap iring-iringan bus karyawan PTFI yang dikawal oleh Brimob dari Mile 68 menuju Kuala Kencana.
2. Pada 15 Februari 2010 pukul 11.15 WIT di depan agen penyalur BBM Alda Chris Papua, Kota Lama Mulia, Kab. Puncak Jaya telah terjadi penyerangan terhadap anggota Brimobda Papua. Pelaku merampas 1 pucuk SS-1 milik korban dan melarikan diri menuju Kampung Yalinggua, Kota Lama Mulia, Kab. Puncak Jaya.
3. Pada 13 Maret 2010 sekitar pukul 14.20 WIT di Kampung Tanoba Distrik Tingginambut, Kab. Puncak Jaya telah terjadi kontak senjata oleh

orang tak dikenal terhadap iring-iringan rombongan Kapolres Puncak Jaya, Aleks Korwa yang sedang menuju Tingginambut.

4. Pada 18 Maret 2010 pukul 18.00 WIT di Kampung Kalome Kab. Puncak Jaya, telah terjadi penembakan oleh orang tak dikenal dengan senjata laras panjang, terhadap warga yang sedang dalam perjalanan dari Mulia menuju Wamena.
5. Pada 23 Maret 2010 di Puncak Senyum Distrik Mulia Kab. Puncak Jaya terjadi kontak tembak antara anggota TNI dari Yon 753/AVT Nabire dengan kelompok TPN/OPM.
6. Pada tanggal 12 April 2010 pukul 18.30 WIT, di Kali Semen Kampung Wandegobak Distrik Mulia terjadi kontak tembak antara 2 orang orang tak dikenal dengan rombongan Kapolres Puncakjaya saat melaksanakan patroli.
7. Pada 13 April 2010, di Kampung Kalome Distrik Mewoluk Kab.Puncak Jaya Papua, terjadi penembakan terhadap pekerja PT.Modern yang dilakukan oleh kelompok OPM yang mengakibatkan menewaskan 3 orang karyawan.
8. Pada 26 April 2010, di kawasan pertambangan Baya Biru, Kampung Tayaga Distrik Nomouwodide Paniai, sekitar 30 orang Gerakan Separatis Bersenjata dipimpin oleh Jhon Magai Yogi (anak Tadius Yogi), melakukan pengepungan dan penyandraan terhadap pekerja pendulangan emas PT.Martha Mainning, meminta tebusan uang sebesar Rp 1 Milyar. Kelompok tersebut juga melakukan pemerasan terhadap tempat-tempat hiburan yang berada di sekitarnya dengan meminta uang sebesar Rp 800 juta.
9. Pada 21 Mei 2010 di daerah Yambi Puncak Jaya terjadi penembakan terhadap petugas Pos TNI Yonif 753 Yambi serta penghadangan dan penembakan terhadap anggota Polres Puncak Jaya.
10. Pada 7 Juli 2010 pukul 11.55 WIT di Mile 29 area PTFI, Kab. Mimika telah terjadi penembakan oleh orang tak dikenal, terhadap konvoi 12 bus karyawan PTFI yang dikawal aparat keamanan dari Mile 50 menuju Mile 26. Tidak terdapat korban luka.

11. Pada 6 Agustus 2010, pukul 18.00 WIT terjadi penembakan oleh TPN/OPM pimpinan Lendiron Wonda terhadap masyarakat di Kampung Yogonik, Puncak Jaya, menyebabkan korban luka atas nama Wekinus Wonda (masyarakat kampung Yogonik) karena mencoba mengusir rombongan TPN/OPM tersebut.
12. Pada 27 Nopember 2010 pukul 10.30 WIT di Kav. 2386 Kampung Yambi Distrik Mulia Kab. Puncak Jaya telah terjadi kontak tembak antara patroli gabungan TNI/Polri; yang terdiri dari Kipamrahan753/Pos Yambi dan Brimob Detasemen C; dengan 3 orang Gerakan Separatis Bersenjata yang diduga pimpinan Gombanik Telenggen. Dalam kontak tembak tersebut, 1 orang GSB atas nama Wendimon Wonda, tewas akibat luka tembak .
13. Pada 28 Nopember 2010 pukul 11.00 WIT di Jl. Raya Nafri-Koya, Distrik Abepura, Kota Jayapura telah terjadi penghadangan dan penembakan oleh 7 orang tak dikenal dan langsung menyerang Riswandi (korban meninggal) yang sedang melintas dengan menggunakan senjata M-16, sedangkan yang 6 orang lainnya mengalami luka-luka.

Gerakan Papua Merdeka Bersenjata atau Tentara Pembebasan Nasional (TPN) merupakan sayap militer dari OPM, agenda utama gerakan ini adalah melepaskan Papua dari NKRI melalui jalur bersenjata. Kemunculan TPN/OPM tidak terlepas dari sejarah awal proses integrasi Papua ke dalam NKRI pada tahun 1963, saat itu timbul kelompok perlawanan yang menolak berintegrasi dengan RI yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap keadaan, kekecewaan dan telah tumbuhnya kesadaran nasionalisme Papua, pemberontakan ini dilakukan oleh Sersan Mayor Permenas Ferry Awom di Manokwari pada tanggal 26 Juli 1965 yang kemudian meluas keseluruh wilayah Papua.

Aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh TPN/OPM tidak pernah berhenti dan akan terus berlanjut walaupun dengan persenjataan yang terbatas, seiring dengan perkembangan hubungan antara Gerakan Papua Merdeka Politik dan Bersenjata yang semakin kurang harmonis karena adanya persaingan dalam memperoleh dana-dana kompensasi dari berbagai perusahaan asing yang

beroperasi di Papua serta adanya perubahan kebijakan Gerakan Papua Merdeka Politik yang lebih mengutamakan cara-cara damai dan diplomatis dalam perjuangannya, maka lambat laun semakin tidak ada koordinasi yang baik antara keduanya dan berjalan masing-masing dalam menentukan langkah perjuangannya. Dengan kekuatan yang terbatas maka TPN/OPM melakukan perlawanannya dengan cara perampokan, penghadangan, penculikan, penyanderaan dan penyerangan terhadap para warga atau pekerja pendatang, warga negara asing dan aparat keamanan TNI/Polri yang berada di pedalaman. Serangannya bersifat sporadis dan menggunakan taktik "*hit and run*" dengan motif ekonomi guna memperoleh tebusan serta perusakan atau pembongkaran instalasi-instalasi vital guna memperoleh senjata maupun aksi melintasi perbatasan dari dan ke Papua Nugini.

1) Kekuatan

Organisasi Papua Merdeka mampu berkembang menjadi sebuah organisasi separatis yang lebih teratur, meski sifat separadis dalam pergerakannya tetap menjadi ciri khas dari pergerakan OPM. Tata organisasinya cukup baik dimana organisasi tersebut memiliki susunan kepengurusan seperti pengurus inti, logistik, panglima perang, komandan sektor militer.⁶⁹

Diperkirakan jumlah personil TPN/OPM saat ini adalah sekitar 1.745 orang dengan persenjataan standard dan campuran (rakitan dan tradisional) berjumlah sekitar 200 pucuk yang tersebar di wilayah Papua khususnya daerah perbatasan Indonesia – Papua New Guinea.⁷⁰ TPN/OPM membagi wilayah pergerakannya menjadi sepuluh Komando Daerah Perang (Kodap) meliputi⁷¹ :

- (1) Kodap 1 meliputi: Kab/Kota Jayapura, Kab. Sarmi dan Kab. Keerom.
- (2) Kodap 2 meliputi: Kab. Jayawijaya, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo dan Kab. Peg. Bintang.
- (3) Kodap 3 meliputi: Kab. Mimika.
- (4) Kodap 4 meliputi: Kab. Nabire dan Kab. Paniai
- (5) Kodap 5 meliputi: Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel dan Kab. Mappi.

⁶⁹ Syamsul Hadi et. al. *Op. Cit.* hlm 102

⁷⁰ Erfi Triassunu, *Ada Apa di Papua*, 2005. hlm 75.

⁷¹ *Ibid*, hlm 88

- (6) Kodap 6 meliputi: Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab/Kota Sorong, Kab. Sorong Selatan dan Kab. Raja Ampat
- (7) Kodap 7 meliputi: Kab. Yawa dan Kab. Waropen.
- (8) Kodap 8 meliputi: Kab. Biak Numfor dan Kab. Supiori.
- (9) Kodap 9 meliputi: Kab. Asmat
- (10) Kodap 10 meliputi: Kab. Puncak Jaya.

2) Kemampuan

Melakukan gerilya di wilayah pengaruhnya dengan aksi yang terbatas dalam bentuk intimidasi atau terror dan penyanderaan terhadap masyarakat setempat; menyerang setiap saat di wilayah pengaruhnya dengan kekuatan yang bervariasi antara 10-50 orang; bertahan di daerah basisnya masing-masing di wilayah pedalaman maupun perbatasan dengan kekuatan bervariasi 50-100 orang; mampu melintasi medan dalam menghadapi gelar pasukan pos-pos TNI atau POLRI di daerah pedalaman maupun perbatasan; menguasai medan yang menjadi wilayahnya; mampu melakukan komunikasi dengan TPN/OPM dan klandestein.

3) Tokoh dan Aktifitas TPN / OPM

Tentara Pembebasan Nasional / Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) terdiri dari beberapa kelompok dengan wilayah operasi yang berlainan dan memiliki tokoh / pemimpin masing-masing, antara satu dengan yang lainnya berdiri sendiri tidak berada dalam satu garis komando maupun koordinasi, adapun beberapa tokoh yang menonjol sebagai berikut :

- a) Richard H. Jouweni, Panglima Tertinggi, Menteri Pertahanan dan Urusan Pembebasan Tentara Pembebasan Nasional Papua.
- b) Hans Uri Youweni. Daerah kekuasaan berada di wilayah Bonggo dan sekitarnya termasuk daerah Betaf, tindak kekerasan yang paling menonjol dilakukan adalah penyerangan Pos Satgas Kopassus pada tanggal 3 Februari 2002, di Desa Yefa Kec. Betaf (250 Km Barat daya Kota Jayapura, hanya dalam waktu beberapa menit Pos Satgas Tribuana Kopassus dihancurkan oleh puluhan anggota TPN/OPM yang bersenjatakan tombak, parang dan panah. Dalam penyerangan tersebut menewaskan empat anggota Satgas Tribuana.

- c) Willem Onde, Panglima Kodap V wilayah merauke, kelompok ini sering melakukan aksi menyandera masyarakat sipil untuk dijadikan sebagai alat dalam menekan pemerintah RI seperti yang dilakukannya pada tanggal 16 Januari 2000 terhadap 17 karyawan PT. Korindo Group dan menuntut ganti rugi kerusakan hutan kepada perusahaan tersebut sebesar 1 juta US dollar. Pada tanggal 31 Januari 2000 sebagian besar sandera dibebaskan terkecuali 3 orang. Untuk pembebasan 3 orang korea yang telah disekap hampir satu bulan di hutan kabupaten merauke itu, Willem Onde mengajukan syarat untuk bertemu dengan Presiden KH. Abdurrahman Wahid di Jakarta.
- d) Kelly Kwalik, Panglima Kodap III, salah satu aksinya yang menonjol adalah ketika kelompoknya menyandera beberapa warga negara asing di Mapenduma, akhir drama penyanderaan tersebut dapat diakhiri melalui suatu operasi militer.
- e) Melkianus Awom, Panglima Kodap VIII.
- f) Yeret Watoi, Panglima Kodap VII.

Kelompok Separatis Klandestin (KSK) merupakan salah satu sayap perjuangan OPM yang selalu bergerak di bawah permukaan, kegiatan yang dilakukan cukup tersamar dan tidak menunjukkan batas yang jelas (sangat tipis) antara kegiatan yang bersifat formal atau fisik dengan non formal atau non fisik, demikian halnya dengan keberadaan orang-orangnya yang tidak berasal dan tidak terikat hanya dengan salah satu komponen saja.

Kegiatan klandestin akan lebih efektif dan cukup menentukan bagi perkembangan perjuangan walaupun secara perlahan tapi pasti, mengingat yang menjadi prioritas sasaran adalah pola berfikir seseorang guna meyakinkan berbagai macam konsep tentang strategi yang sangat sistematis bagi tahapan langkah perjuangannya. Kelompok ini sangat memungkinkan untuk bergerak secara bebas dan leluasa ke segala lapisan komponen masyarakat baik di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif bahkan tidak tertutup kemungkinan masuk ke dalam dan berada pada tubuh TNI dan Polri.

- 1) Kekuatan

Pada umumnya kelompok ini tidak mempunyai atau tidak dapat diketahui jumlah kekuatannya secara nyata atau pasti namun demikian dapat dirasakan kehadiran dan keberadaannya melalui benang merah yang dirangkai dan berbagai macam aksi-aksi yang selama ini terjadi, kekuatan dalam segi jumlah bukan menjadi tolak ukur namun lebih menekankan pada kemampuan individu dalam bergerak ke segala komponen dan lapisan masyarakat.

2) Kemampuan

- a) Melakukan komunikasi secara klandestin terhadap semua akses dan jaringan yang bersimpati terhadap Papua Merdeka.
- b) Mampu mengadakan komunikasi dengan pihak asing. Diplomasi klandestin dengan perwakilan negara-negara dan lembaga-lembaga asing baik yang berada di dalam maupun luar negeri.
- c) Mampu mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat terutama di daerah perbatasan dengan menggunakan dalih rasa keadilan, perbedaan ras dan sosial budaya.
- d) Mampu melakukan provokasi untuk menimbulkan kerusuhan di daerah-daerah.
- e) Mampu membentuk opini untuk mendiskreditkan pemerintah.
- f) Mampu menarik simpati sekelompok masyarakat Papua seperti cendekiawan, pegawai negeri sipil dan mahasiswa terutama yang mendukung ide separatis.

PIS merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk mendukung dan meningkatkan operasi klandestin OPM melalui berbagai kegiatan seperti penyusupan, penggalangan dan perekrutan ke dalam institusi-institusi Pemda, TNI dan Polri, dengan prioritas sasaran putra asli daerah Papua yang berdinasi di instansi-institusi tersebut. Organisasi ini dipimpin oleh Lodik Betawi dan Jeweni (TPN). Sampai saat ini aktivitas dari PIS belum banyak diketahui karena sifatnya yang sangat tertutup.

3.2. Upaya Internasionalisasi Gerakan Papua Merdeka

Upaya internasionalisasi Gerakan Papua Merdeka telah dilakukan sejak awal. Hal ini bisa dimengerti mengingat salah satu faktor yang ikut mendorong berhasilnya upaya integrasi Papua ke pangkuan Indonesia ialah dukungan Internasional yang diperoleh Indonesia.

Akan tetapi, selama perang Dingin berlangsung; ketika situasi internasional masih didominasi isu-isu *high politics* yang berdimensi ideologi dan politik, upaya-upaya internasionalisasi belum dapat digalang secara sistematis dan karenanya tidak berhasil mendapat perhatian luas negara-negara dan masyarakat internasional. Kalaupun ada dimensinya relatif masih terbatas (Belanda dan negara-negara Pasifik terutama PNG yang berbatasan langsung dengan Indonesia). Menurut Ondawame, juru bicara OPM, perjuangan rakyat Papua telah diabaikan oleh dunia internasional. Ondawame mencurigai motif-motif dan kepentingan politik, strategis dan ekonomis di balik sikap negara-negara yang mengabaikan perjuangan Papua. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Papua adalah korban konspirasi politik selama masa perang dingin. Menurutnya, Australia, AS, dan negara-negara barat tidak pernah memperhatikan perjuangan *self-determination* dan kemerdekaan Papua sehubungan dengan upaya pencegahan meluasnya komunisme di Indonesia, Australia dan negara-negara Pasifik.⁷²

Berpisahannya wilayah Timor Timur dari Negara Kesatuan RI telah memberikan inspirasi kuat bagi perjuangan pembebasan rakyat Papua yang menganggap diri mereka sebagai koloni Republik Indonesia. Sekalipun latar belakang historis dan proses integrasi kedua wilayah itu sangat berbeda namun mereka memiliki tujuan yang sama. Keberhasilan Timor Timur berpisah dengan Indonesia seakan-akan memberi angin segar bagi Papua untuk terus melanjutkan perjuangannya hingga mencapai hasil yang diinginkan. Semenjak itulah OPM mulai mengintensifkan upaya-upaya internasionalisasi isu separatis Papua melalui pengembangan jaringan dan basis internasionalisasinya. Seperti telah diungkap sebelumnya, salah satu resolusi yang dihasilkan melalui kongres Rakyat Papua II ialah penekanan mereka tentang pentingnya dukungan internasional terhadap perjuangan mereka. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Presidium Papua, Thom Beanal, dalam sambutan penutupan Kongres Nasional Papua Barat secara eksplisit

⁷² John Ondowame, *loc. cit.*

mengatakan bahwa "keinginan merdeka rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terus diperjuangkan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)", Beanal juga menambahkan bahwa "perjuangan kemerdekaan Papua untuk mengembalikan kedaulatan mereka yang sudah dicapai 1 Desember 1961 juga akan terus dilakukan melalui lobi-lobi internasional guna mencari dukungan dari negara-negara maju", selanjutnya dia juga mengatkan bahwa "Papua sudah merdeka 1 Desember 1961 dengan atribut kenegaraan, namun dijual oleh Belanda kepada Indonesia melalui PBB dan Amerika Serikat".⁷³

Sementara itu, Ketua Delegasi Eropa, Viktor Kaisiepo (bermukim di Belanda), yang ikut hadir di dalam Kngres Papua Barat ke-2, secara terbuka mengatakan bahwa pihaknya akan membawa hasil keputusan kongres dan berjanji untuk mensosialisasikanya melalui lobi-lobi ke berbagai negara raksasa di dunia termasuk PBB. Kaisiepo berargumen bahwa "tidak ada dalam sejarah bahwa bangsa Papua hidup bersama dengan Republik Indonesia, sehingga kedaulatan rakyat Papua harus di akui".⁷⁴

Adapun sarana utama yang digunakan gerakan OPM dalam rangka internasionalisasi isu separatist Papua ialah menggunakan jalur diplomasi. Untuk itu, medan gerilya diplomasi OPM di luar negeri itu meliputi pertama-tama negara-negara serumpun, seperti PNG dan Vanuatu; kedua, negara-negara Eropa Barat, seperti Belanda dan Swedia, di mana terdapat kelompok-kelompok yang mendukung OPM karena ketidaksetujuan mereka terhadap rejim Soeharto, karena solidaritas dengan kelompok-kelompok minoritas yang tertindas, dan karena mereka melihat perjuangan OPM sejalan dengan faham neo-Marxisme mereka; serta ketiga, sebuah negara Afrika, Senegal, yang mendukung OPM berdasarkan faham Negritude yang memperjuangkan solidaritas di antara seluruh ras kulit hitam. Dari ibu kota Senegal, Dakar, juga dibina hubungan diplomatik OPM dengan 15 negara Afrika Barat dan Tengah yang menolak hasil PEPERA dalam Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969.⁷⁵ Sekalipun masih sangat

⁷³ "Keinginan Merdeka Rakyat Papua Akan Dibawa ke PBB", *Kompas*, 4 Juni 2000.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Dr. George Yunus Aditjondro, "Bintang Kejora di Tengah Kegelapan Malam: Penggelapan Nasionalisme Orang Irian dalam Historiografi Indonesia", makalah untuk seminar tentang

terbatas dalam melakukan teknik diplomasi dan penggalangan dukungan internasional, secara garis besar gerakan OPM telah mencoba langkah-langkah berikut sebagai upaya internasionalisasi isu separatist Papua.

a. Bilateral: Diplomasi ke Negara-Negara Pasifik

Diplomasi ke negara-negara di kawasan Pasifik dapat dikatakan sebagai salah satu upaya internasionalisasi yang semenjak awal dan secara konsisten dilakukan oleh OPM. Salah satu contoh pendekatan yang dilakukan ialah kunjungan Dewan Presidium Papua yang dipimpin langsung ketuanya, Theys Eluay, ke Vanuatu pada akhir bulan Juli 2000. Delegasi ini sekaligus menghadiri ulang tahun ke 20 Vanuatu yang jatuh 31 Juli 2000.

Melalui kesempatan kunjungan inilah Theys dan delegasinya berkesempatan bertemu para tokoh pejuang Papua Merdeka di Vanuatu, yang dimaksudkan sebagai langkah menyamakan persepsi dalam rangka pelurusan sejarah Papua menuju Papua Baru.⁷⁶ Selain berkunjung ke Vanuatu, delegasi Presidium Dewan Papua secara maraton juga melakukan kunjungan ke Nauru, Papua New Guinea, dan Australia. Selain sebagai upaya konsolidasi kekuatan, lawatan yang dilakukan Presidium Dewan Papua pimpinan Theys ini juga dimaksudkan untuk mendapat dukungan dalam berbagai bentuk dari negara-negara yang dikunjungi ini.⁷⁷

Terdapat paling tidak dua hal yang mendorong mengapa OPM memusatkan pendekatannya ke negara-negara kawasan ini. Pertama, kedekatan hubungan etnis. Hal ini terlihat dengan konsistensinya OPM menggunakan konsep persaudaraan Melanesia (Melanesia brotherhood) sebagai alasan untuk mendapat dukungan dari negara-negara kawasan Pasifik. Dalam lawatannya ke beberapa negara di Pasifik, Theys Eluay di kabarkan menggunakan menggunakan argumen etnis sebagai dasar perjuangan Papua dan karenanya perlu mendapat bantuan dari

Nasionalisme Indonesia pada dan Menjelang Abad XXI, yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Darma di Kampus Universitas Kristen Satya Wacana(UKSW), 2-5 Juni 1993.

⁷⁶ "Pertemuan Tokoh Pejuang Papua Merdeka di Vanuatu", *Kompas*, 28 Juli 2000.

⁷⁷ "Dua Negara Pasifik Bawa Masalah Papua Merdeka ke SU PBB", *Kompas*, 1 Agustus 2000.

negara negara pasifik yang secara etnis sama.⁷⁸Kedua, kedekatan geografis. Disamping kedekatan hubungan etnis, faktor kedekatan geografis juga menjadi faktor pendukung penting sehingga OPM terus melancarkan pendekatannya kepada negara negara di kawasan pasifik. Hal ini terlihat jelas dengan adanya upaya OPM untuk membuka basis konsolidasi kekuatannya di wilayah PNG.

b. Regional: Diplomasi ke Forum Pasifik Selatan

Pada level regional, upaya internasionalisasi isu separatis Papua yang terus digalakkan oleh OPM ialah melalui forum Pasifik Selatan. Hal ini terlihat jelas dengan hampir selalu disebutnya isu Papua Parat dalam setiap komunike akhir KTT forum Pasifik Selatan. Bagi OPM, forum ini juga merupakan arena yang sangat tepat untuk mengedepankan argumentasi persaudaraan Melanesia (*Melanesian brotherhood*) mengingat mayoritas yang hadir di dalam forum ini berasal dari etnis Melanesia.

c. Global: Diplomasi ke Forum PBB

Disamping diplomasi yang coba dilakukan pada level bilateral dan regional, gerakan OPM juga mencoba membawa isu separatis Papua ke PBB, bahwa lembaga ini telah mengakui secara resmi keabsahan integrasi wilayah Papua kedalam kekuasaan Indonesia.

Menghadapi kendala seperti ini, upaya yang dilakukan OPM ialah dengan “menitipkan” agendanya melalui negara negara di pasifik selatan yang secara eksplisit mendukung perjuangan OPM. Sebagai misal, di dalam KTT Milenium PBB pada tanggal 7 September 2000, Presiden Nauru, Bernard Dowiyogo, secara terbuka menyatakan;

“Our Melanesian brothers and sisters in West Papua are still striving to break the imposition of colonial domination and foreign control, following the so-called act of free choice in 1969. It is imperative that West Papua be given the rightful opportunity of a democratic referendum of its indigenous peoples, to exercise at last their right of self-determination. The United Nation cannot stand by and witness the

⁷⁸ Marga Raharja, “Gendrang Dukungan dari Lautan Teduh”, *Kontan*, No. 12 Tahun V, edisi 11 November 2000.

destruction of the people of West Papua, where already more than half a million have been lost to human rights abuses. We must not in this are witness another catastrophe as occurred in East Timor."⁷⁹

Pernyataan Presiden Nauru itu secara eksplisit menunjukkan posisi Indonesia sebagai kekuatan kolonial yang menjajah. Alasan-alasan kultural dinyatakan sebagai dasar untuk mendukung separatis Papua dari wilayah kesatuan Indonesia. Disamping itu, Presiden Dowiyogo juga menyerukan tentang perlunya PBB memberikan dukungan terhadap upaya separatis di Papua, dan untuk keperluan tersebut Presiden Dowiyogo menyatakan negaranya akan mendukung resolusi PBB yang berhubungan dengan hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) Papua Barat.

d. Membuka dan Menjaga Dukungan Jaringan Internasional

Disamping langkah-langkah pendekatan di atas, di dalam menyampaikan aspirasinya basis eksternal OPM juga memanfaatkan teknologi informasi (melalui internet). Beberapa upaya OPM yang dapat dicatat disini adalah.⁸⁰

Surat Himbauan (*Letter of Appeal*) dari pemimpin OPM, Moses Werror, kepada beberapa negara dan pemerintah negara – negara Pasifik Selatan, seperti Fiji, Vanuatu, PNG, dan Solomon Island untuk memberikan dukungan kepada OPM dengan cara :

1. Melakukan *lobby* dan mendukung petisi yang diajukan pada PBB agar lembaga internasional ini membatalkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 tertanggal 19 Desember 1969 tentang integrasi Papua dalam wilayah negara Indonesia.
2. Mendukung kasus papua agar dapat dimasukkan dalam *list of decolonization* di Komite 24 PBB (Komite Dekolonisasi).
3. Seruan untuk menginternasionalisasikan wilayah Papua dan mempersiapkan *self-governance* dan kemerdekaan penuh, jika mungkin pada akhir tahun 2000.

⁷⁹ David Webster, "West Papua: The Next East Timor?" *Peace Magazine*, April 2000.

⁸⁰ Moses Werror, "A Letter of Appeal", [http:// www.converge.org.nz](http://www.converge.org.nz)

Organisasi Papua Merdeka Revolutionary Council (OPMRC) yang bermarkas di Madang, PNG, membuat rancangan tujuh tahap bagi perjuangan mereka yang dimulai pada tahun 1964. Tahap – tahap tersebut sebagai berikut :

1. 1964-1969: persiapan the *Act of Free Choice*
2. 1970-1975: restruksisasi OPM
3. 1976-1981: Pembentukan tentara
4. 1982-1987: membentuk Dewan Pemimpin OPMRC
5. 1988-1993: kampanye diplomasi internasional
6. 1994-1999: pengembalian 'the lost nation' Papua
7. 1999-2005: membangun kembali negara Papua Barat yang baru dalam parameter Melanesia.

Rancangan tersebut diharapkan mendapatkan perhatian dan pengakuan internasional dari forum-forum internasional seperti PBB, gerakan Non-Blok, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Akan tetapi hingga tahun 1996 ketika himbuan tersebut dimuat di media elektronik belum terdapat satu negara pun yang secara resmi menyatakan dukungannya. Hal ini ditegaskan oleh Werror:⁸¹

“The OPMRC seeks to continue with its international diplomacy campaign and needs only one country to recognize our plight. No matter how big, small or powerful as long as the country is a member of the United Nations, we can act in a more effective manner on the international stage. Through a combination of international solidarity and an upsurge in military and political activity inside West Papua, the OPMRC aims to receive recognition for its right to self determination by the year 2000. We have struggled for more than 30 years and the world has ignored our cause.”

Sekalipun perjuangan Papua untuk mencapai kemerdekaan nampaknya masih jauh dari harapan namun perjuangan tersebut terus berlangsung. Yang menarik dalam hal ini adalah adanya keinginan sebagian elit Papua untuk menerima tawaran otonomi pemerintah asalkan tawaran tersebut segera diimplementasikan. Belum ditemukan sumber yang jelas apakah hal ini menunjukkan adanya perpecahan di dalam tubuh OPM ataukah merupakan

⁸¹ Ibid

pelunakan sikap para penuntut kemerdekaan. Keinginan menerima tawaran otonomi tersebut disampaikan oleh John Ibo, salah seorang juru bicara Papua, yang disampaikan kepada *The Jakarta Post*, sebagai berikut:

*"The central government should know the Papuans do not need or expect special autonomy at the level of discussion. They want to see and experience this status materialize in the province...further delays in Implementing special autonomy in Papua will only fuel the already strong demand for establishing an independent state in the territory."*⁸²

3.3. Reaksi Negara Pasifik Terhadap Gerakan Papua Merdeka

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, selain ikut mengganggu stabilitas politik domestik Indonesia, Gerakan Papua Merdeka juga merupakan ancaman potensial bagi kepentingan nasional Indonesia di forum internasional. Terdapat kekhawatiran bahwa jika upaya separatis ini tidak ditangani secara baik maka stabilitas Indonesia potensial terancam. Dalam sebuah wawancara televisi, Ketua MPR, Amien Rais, mengatakan bahwa upaya separatis Papua lebih besar dari masalah krisis ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia karena masalah upaya separatis jelas-jelas mengancam integrasi nasional Indonesia.⁸³

Selanjutnya, perkembangan telah menunjukkan adanya upaya internasionalisasi masalah separatis di Papua antara lain melalui pernyataan kemerdekaan Papua. Adapun salah satu poin penting resolusi tersebut secara eksplisit menyinggung mengenai perlunya dukungan internasional.⁸⁴

Bagian ini mendeskripsikan sikap dan reaksi yang diberikan negara-negara pasifik terhadap upaya separatis tersebut. Meskipun fokus data yang dipaparkan adalah sikap dan reaksi negara, tetapi di dalam bagian ini juga disinggung bentuk-bentuk reaksi yang berasal dari aktor-aktor non-negara. Hal ini dilakukan agar upaya analisis beserta kesimpulan dapat dilakukan secara proporsional.

⁸² "Irianese Leaders Seeks Special Autonomy", *The Jakarta Post*, 25 Juli 2000.

⁸³ Geoff Mulherin, "Zigzag act over Papua Choices", *The Sydney Morning Herald*, 16 June 2000.

⁸⁴ "Resolution from the Papuan People's Congress" Appendix dalam Dr. J.R. Verrier, *loc.cit.*

3.3.1. Reaksi Negara-Negara Pasifik

Secara umum dapat dikatakan negara-negara pasifik *concern* terhadap situasi yang terjadi di Papua (Papua Barat). Tetapi sikap dan reaksi negara-negara Pasifik terhadap upaya separatis Papua berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang secara terang-terangan mendukung upaya separatis tersebut, tetapi ada pula negara-negara yang sikap dan reaksinya sebatas pada *concern* terhadap perkembangan yang sedang terjadi.

Adapun negara-negara Pasifik yang secara terang-terangan telah memberikan dukungan terhadap gerakan perjuangan separatis Papua ialah Nauru, Vanuatu, Tuvalu, dan Kepulauan Cook.

Nauru. Di dalam KTT Forum Pasifik Selatan ke -31 di Tarawa, Kiribati pada bulan Oktober 2000, pemerintah Nauru secara resmi dan terbuka menyatakan dukungannya bagi kemerdekaan Papua Barat. Pemerintah Nauru mengatakan bahwa kedekatan sejarah dan geografi mendorong negaranya untuk mendukung sepenuhnya perjuangan separatis Papua.⁸⁵

Dukungan serupa kembali dikemukakan pemerintah Nauru ketika Presidium Dewan Papua pimpinan Theys Hiyo Eluay melakukan kunjungan ke Nauru dalam rangkaian kunjungan delegasi Theys ke beberapa negara Pasifik akhir Juli hingga Agustus 2000. Secara eksplisit Perdana Menteri Nauru, Bernard Dowiyogo, mengulang kesediaan pemerintahnya untuk mendukung perjuangan Gerakan Papua Merdeka. Presiden Dowiyogo bahwa secara terang-terangan berjanji untuk melakukan lobi ke beberapa negara di Pasifik sekaligus menyiapkan diri membawa aspirasi rakyat Papua ke sidang Majelis Umum PBB. Dalam kaitannya dengan lawatan delegasi pimpinan Theys Elauy ke beberapa negara di Pasifik ini, Nauru juga dikabarkan ikut membiayai perjalanan rombongan Theys.⁴ Di samping itu, diberitakan juga bahwa dalam pertemuan antar delegasi Theys dan PM Nauru, Bernard Dowiyogo, Pemerintah Nauru menyatakan siap membiayai delegasi Papua ke PBB maupun aktifitas dalam negeri karena Papua adalah wilayah penghasil fosfat terbesar di dunia.

⁸⁵ Media Release yang dikeluarkan oleh Pacific Concerns Resource Centre (PCRC) Forum Pasifik Selatan, 27 Oktober 2000

Apa yang dijanjikan Pemerintah Nauru kepada delegasi presidium Papua ternyata benar-benar dibuktikan. Aspirasi rakyat Papua terus disuarakannya ke forum-forum internasional. Dalam KTT Milineum PBB pada tanggal 7 September 2000, Presiden Nauru, Bernard Dowiyogo secara terbuka menyatakan

*Our Melanesian brothers and sisters in West Papua are still striving to break the imposition of colonial domination and foreign control, following the so-called act of free choice in 1969. It is imperative that West Papua be given the rightful opportunity of democratic referendum of its indigenous Peoples, to exercise at last their right of self-determination. The United Nations cannot stand by and witness the destruction of the people of West Papua, where already more than half a million have been lost to human rights abuses. We must not in this are witness another catastrophe as occurred in East Timor.*⁸⁶

Pernyataan Presiden Nauru itu secara eksplisit menunjukkan posisi Indonesia sebagai kekuatan kolonial yang menjajah. Alasan-alasan kultural dinyatakan secara eksplisit sebagai dasar untuk mendukung Gerakan Papua Merdeka dari wilayah kesatuan Indonesia. Di samping itu juga, Presiden Dowiyogo juga menyerukan tentang perlunya PBB memberikan dukungan terhadap upaya Gerakan Papua Merdeka, dan untuk keperluan tersebut Presiden Dowiyogo menyatakan negaranya akan mendukung resolusi PBB yang berhubungan dengan hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) orang-orang Papua Barat.

Bentuk dukungan lain dari Nauru terhadap upaya Gerakan Papua Merdeka ialah ketika delegasi OPM yang hadir pada KTT Forum Pasifik Selatan ke-31 di Tarawa, Kiribati, diikutsertakan di dalam delegasi resmi Nauru. Adapun tokoh-tokoh OPM yang diikutsertakan di dalam delegasi Nauru ialah, Franz Albert Joku, Nick Messet, Paul Masta, dan Martin Raklung Mahue. Bahkan diberitakan juga bahwa bulan Juni 2000, Presiden Dowiyogo, telah menulis surat kepada Sekjen Sekretariat Forum Pasifik, Noel Levi dari PNG, untuk memasukkan masalah Papua Barat dalam agenda resmi KTT Forum Pasifik Selatan ke-31 Oktober 2000. Adapun bunyi surat Dowiyogo;

⁸⁶ David Webster, "West Papua : The next East Timor?" *Peace Magazine*, April 2000.

*The people of West Papua look upon the Forum countries of the Pasific to play an important role in relisting West Papua on the international agenda, I understand that this is a delicate topic, but I believe if the Forum is to continue to be relevant then it mus confront suchissues which are important to lives an democratic rights of the people of our region.*⁸⁷

Vanuatu. Sama seperti halnya Nauru, pemerintah Vanuatu secara resmi dan terbuka juga telah menyatakan dukungannya bagi kemerdekaan Papua Barat. Hal ini secara eksplisit dikemukakan melalui KTT Forum Pasifik Selatan ke-31 yang berlangsung bulan Oktober 2000 di Tarawa, Kiribati. Sebagaimana halnya Nauru, pemerintah Vanuatu juga berargumen bahwa faktor sejarah dan geografi merupakan alasan dasar mengapa negaranya mendukung sepenuhnya perjuangan Gerakan Papua Merdeka.⁸⁸

Oleh karena itu, ketika delegasi Presidium Papua melakukan lawatan ke Vanuatu pada akhir bulan Juli 2000, delegasi pimpinan Theys Eluay ini diterima secara resmi. Bahkan delegasi Presidium Papua diundangn untuk menghadiri perayaan ulang tahun Vanuatu ke-20 pada tanggal 31 Juli 2000. Di dalam kesempatan kunjungan ini, Dewan Presidium Papua bertemu dengan para tokoh pejuang Papua merdeka di Vanuatu. Pertemuan antara Dewan Presidum Papua dengan para pejuang Papua merdeka di Vanuatu ini dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi dalam rangkapelurusan sejarah Papua menuju Papua baru yang merdeka. Diakui oleh salah seorang anggota Dewan Presidium Papua, yang secara kebetulan juga Pilar Pemuda Papua, Benny Yanteo, bahwa pertemuan tersebut merupakan momen yang tepat dan menggembirakan dalam untuk menyamakan persepse perjuangan. Ditambahkannya, diharapkan melalui pertemuan Dewan Presidium Papua dengan parakan masa depan para pejuang OPM di luar negeri itu dapat dibicarakan masa depan Papua yang lebih baik.⁸⁹

Seruan yang tidak berbeda jauh, juga dikemukakan delegasi dari Vanuatu di dalam forum KTT Milenium PBB. Laporan-laporan yang ada bahkan juga

⁸⁷ "West Papuan Delegation at Pacific Islands Forum", Media Release, Tarawa Kiribati, October 27, 2000, [http://www. Wetpapua.net/FOREIGN/pacific.htm](http://www.Wetpapua.net/FOREIGN/pacific.htm)

⁸⁸ Media Release yang dikeluarkan oleh Pasific Concern Resource Center (PCRC) Forum Pasifik Selatan, 27 Oktober 200.

⁸⁹ Pertemuan Tokoh Pejuang Papua Merdeka di Vanuatu. "Kompas, 28 Juli 2000.

menyebutkan bahwa Perdana Menteri Vanuatu, Bapak Sope, Hadir dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Milenium PBB bersama-sama dengan delegasi OPM.⁹⁰

Tuvalu. Di samping Vanatu dan Nauru, Vanatu dapat juga dikategorikan sebagai salah satu negara di kawasan Pasifik yang mendukung upaya Gerakan Papua Merdeka. Meskipun di dalam kapasitas yang terbatas, dikabarkan bahwa bersama Vanuatu dan Nauru, Tuvalu ikut memberikan dukungan finansial terhadap aktivitas pejuang kemerdekaan Papua.

Kepulauan Cook. Negara Pasifik lain kabarnya juga telah memberikan dukungan terhadap perjuangan kelompok Papua merdeka ialah Kepulauan Cook. Negara yang masih berada di bawah mandat Selandia Baru ini diberitakan juga mendukung aspirasi Papua merdeka yang dikemukakan Nauru dan Vanatu di dalam KTT Milenium PBB.⁹¹

Papua New Guinea (PNG). Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia (Papua), PNG adalah negara Pasifik yang sedari awal selalu berkaitan langsung dengan masalah Gerakan Papua Merdeka. Sebagai akibat dari posisi geografis demikian, PNG senantiasa menjadi wilayah pertama di luar Indonesia yang dijadikan sebagai basis oleh gerakan OPM. Di samping itu, posisi PNG yang berbatasan langsung dengan Papua menyebabkan negara Pasifik ini selalu menjadi wilayah yang merasakan dampak dari persoalan separatis Papua, antara lain dengan mengalimya para pengungsi Papua ke wilayah PNG.

Walaupun demikian, semenjak masuk Papua ke dalam wilayah kesatuan Indonesia, PNG senantiasa mengambil kebijakan pengakuan integrasi dan menerima kenyataan bahwa orang Irian adalah warna negara Indonesia. Pada tahun 1979, misalnya, ketika kelompok OPM melakukan konsolidasi kekuatannya di wilayah PNG, pemerintah negeri ini secara resmi menolak langkah OPM. Para pelintas batas justru diwajibkan memberi laporan dengan statusnya. Mereka yang melintas batas hanya diijinkan tinggal jika tujuannya semata-mata untuk tujuan-tujuan yang bersifat tradisional.

⁹⁰ UNDP, PACNEWS, "Nauru lobbies for West Papua, Taiwan at the UN", PACNEWS 1: Friday September 08, 2000.

⁹¹ Marga Raharja, "Genderang Dukungan dari Lautan Teduh", *Kontan*, No. 12 tahun Edisi 11 November 2000.

People crossing the the border are required to report to one of the several patrol posts along the border and state their reason for crossing. If their purpose is "tradotional" ... they are normally allowed to stay until they have finished what they came to do and are then expected to return across the border. If they apply for polytical asylum they are held until a decision is taken and then either granted permission residence or told to return. In all other cases they are told to return. If they refuse, they are arrested and charged as illegal immigrants, after which they may be deported.⁹²

Dukungan dan pengakuan terhadap integritas wilayah Indonesia termasuk pengakuan terhadap Papua sebagai bagian integral wilayah kesatuan Indonesia kembali dikemukakan oleh perdana menteri PNG, Mekere Morauta, ketika Megawati soekarnoputri, ketika itu masih menjadi Wakil Presiden, melakukan kunjungan ke Port Moresby pada tanggal 15-16 September 2000. Dalam satu poin dari Pernyataan Bersama Megawati soekarnoputri dengan PM PNG disebutkan bahwa Wakil Presiden Indonesia sangat menghargai konsistensi PNG dalam hal pengakuan integrasi wilayah Papua menjadi bagian dari negara kesatuan Indonesia; "The Vice-President of the Republic of Indonesia stated that her Government highly appreciated the determination of the Government of Papua New Guinea for her consistent policy to recognise the Province of Papua as an integral part of the Republic of Indonesia."⁹³

Kendati PNG secara konsisten mengakui integritas wilayah Papua sebagai bagian dari wilayah kesatuan Indonesia, terdapat banyak kelompok non-pemerintah termasuk politisi yang secara pribadi mendukung perjuangan gerakan separatis di Papua. Gubernur Propinsi Sandaun (PNG), John Tekwi, misalnya ketika menghadiri Kongres Rakyat Papua II secara tegas menyatakan dukungannya kepada perjuangan rakyat Papua meraih kemerdekaan, meski dia mengingatkan bahwa perjuangan tersebut perlu dilakukan dalam dialog dan perjuangan damai.

⁹² Stephen V. Harris and Collin Brown, "Indonesia, Papua New Guinea and Australia: the Papua Problem of 1984," *Australia-Asia Paper*, no 29, Center for the Study of Australia-Asia Relations, School of Modern Asian Studies, Griffith University, Nathan, Australia, February 1985, hal. 7.

⁹³ "Joint Statement by the Prime Minister of Papua New Guinea and the Vice-President of the Republic of Indonesia," Deplu RI, 2000.

*Saya hadir di sini bukan diutus oleh perdana menteri (PM) PNG, tetapi karena panggilan demokrasi. Karena kemerdekaan Papua sudah di depan mata. Saya, rakyat sandaun dan PNG mendukung perjuangan rakyat Papua dalam dialog dan keamanan.*⁹⁴

Di samping itu, Gubernur Sandau ini juga mendukung pernyataan Ketua Presidium dewan Papua, Theys Eluay, bahwa sejarah Papua Barat telah dibelokkan. Tetapi dia menilai bahwa yang membelokkan sejarah tersebut ialah Amerika Serikat, Belanda dan Australia yang ikut merancang pembuatan kesepakatan New York tahun 1961, yang membagi-bagi wilayah Papua tanpa berbicara dengan rakyat Papua.

*Sebaiknya Amerika Serikat, Belanda, dan Australia merampungkan persoalan ini [pembelokan sejarah]. Indonesia hanya memungut sumpah-sumpah yang mereka sebar. Bahkan, rakyat Papua harus berterima kasih kepada Indonesia yang telah memberikan kebebasan. Keleluasaan dan kebebasan untuk membicarakan masa depan Papua.*⁹⁵

Sebagai wujud dukungan dan simpatinya, Gubernur Tekwi lalu mengundang peserta kongres maupun Presidium Dewan Papua dalam sebuah jamuan makan malam yang diselenggarakan di Jayapura, Papua.⁹⁶

Sementara itu, kalangan politisi di PNG sendiri masih cukup sering menyampaikan pandangan pribadi mereka mengenai situasi yang sedang terjadi di Papua. Michael Somare yang kemudian pernah menjadi PM PNG, dalam sebuah debat di parlemen PNG menjelang dilakukannya Act of Free Choice, pernah berargumen bahwa *"we are the same people and, therefore, we have every right to talk about these problems which are so close to us and are concerning the people who are brother to us."* Pandangan Somare ini juga kerap senada dengan pandangan politisi lainnya seperti Angmai Bilas, *"I am very sympathetic towards the West Papuan people, the west Irianese, who are the same race of people as we Papuans and the New Guineans"*. Politisi lain, Tei Abal,

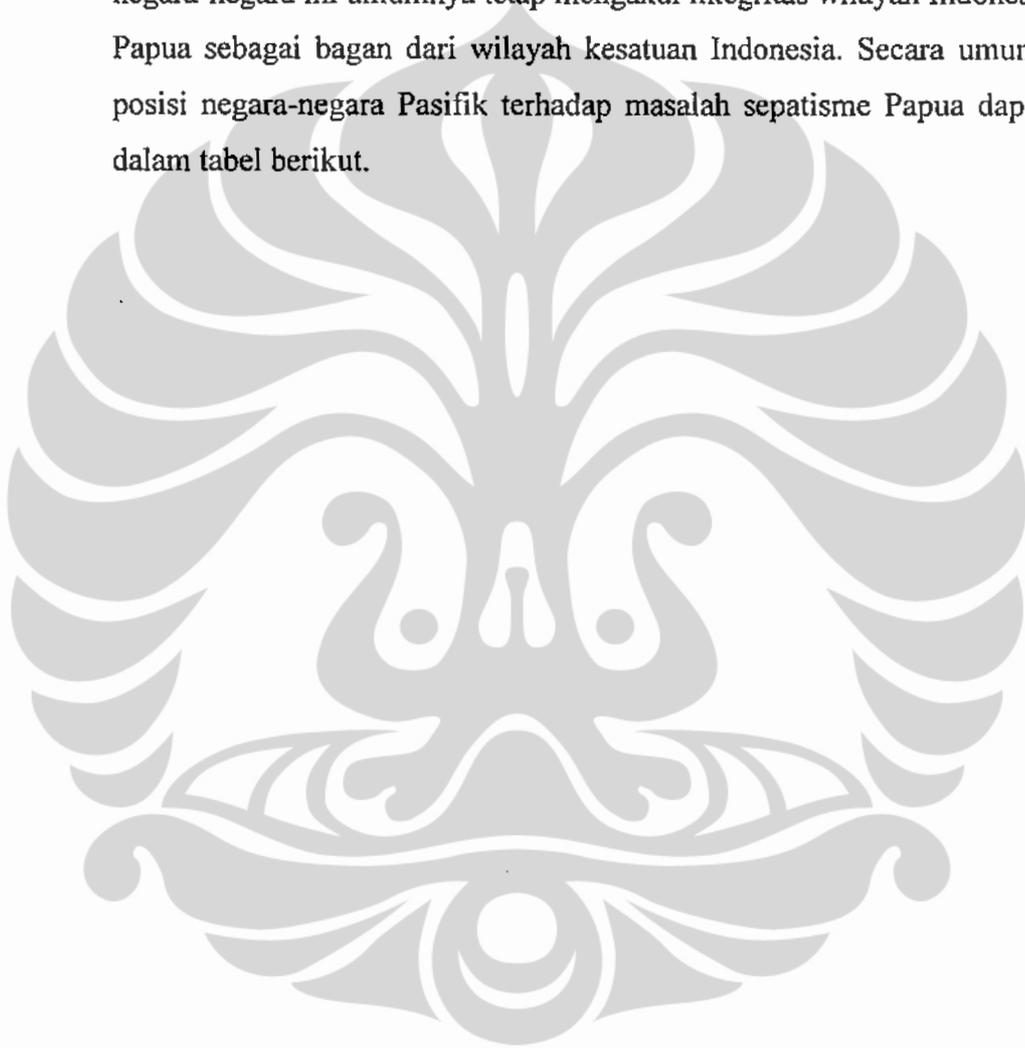
⁹⁴ "PNG Dukung Perjuangan Damai," *Kompas*, 3 Mei 2000.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

menyuarakan hal yang hampir senada, "*these people in West Irian are the same as us and are our 'wantoks'*".⁹⁷

Adapun posisi negara-negara Pasifik lainnya, hingga kini masih terbatas pada concern terhadap perkembangan yang terjadi di Papua. Kendati demikian, negara-negara ini umumnya tetap mengakui integritas wilayah Indonesia termasuk Papua sebagai bagian dari wilayah kesatuan Indonesia. Secara umum gambaran posisi negara-negara Pasifik terhadap masalah sepatisme Papua dapat diringkas dalam tabel berikut.



⁹⁷ House of Assembly Debate, Vol. II no. 5 pp. 1346-1442, 25 and 27 June 1969, di kutip dalam Dr. J.R. Verrier, "Is West Papua Another Timor?", *Current Issues Brief*, 1 2000-01, Parliament of Australia, Parliamentary Library.

Tabel 1
Posisi Resmi Negara-Negara Pasifik Terhadap Isu Separatis Papua

Nama Negara	Memperhatikan Masalah Papua	Mendukung Kemerdekaan Papua	Mendukung Integrasi Papua ke Indonesia
Samoa Amerika	V		V
Kepulauan Cook	V	V	V
Federasi Negara-Negara Mikronesia	V		V
Fiji	V		V
Polynesia Perancis	V		V
Guam	V		V
Kiribati	V		V
Kepulauan Marshall	V		V
Nauru	V	V	
Caledonia Baru	V		V
Nieu	V		V
Kepulauan Mariana Utara	V		V
Palau	V		V
Papua New Guinea	V		V
Pitcarin	V		V
Kepulauan Salomon	V		V
Tokelau	V		V
Tonga	V		V
Tuvalu	V	V	

Vanuatu	V	V	
Wallis & Futuna	V		V
Samoa Barat	V		V
Jumlah	22	4	18

Dua negara lain yang juga perlu dilihat sikapnya ialah Selandia Baru dan Australia. Meskipun kedua negara ini secara resmi tetap mendukung integrasi wilayah Indonesia, tetapi di dalam kedua wilayah negara ini terdapat cukup banyak simpatisan yang mendukung perjuangan OPM untuk memisahkan Papua dari negara kesatuan Indonesia. Menurut pemerintah Australia, masalah Papua berbeda dengan kasus Timor Timur. Krisis yang belakangan terjadi di Papua jelas mempunyai potensi pengaruh ketidakstabilan politik, strategis maupun kepentingan-kepentingan ekonomi pada wilayah sekitarnya. Namun demikian, Australia tetap mendukung integritas wilayah Indonesia. Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, pada tanggal 17 Juli 2000 menyatakan di Sydney bahwa,

*Australia will not support Papua independence because any impetus toward secession could lead to the bloody breakup of Indonesia. Let me make this very clear, we accept that West Papua, or Papua, is a part of Indonesia.*⁹⁸

Pandangan serupa kembali dikemukakan Menteri Luar Negeri Australia kepada wartawan di sela-sela acara Forum Pertemuan Menteri Indonesia Australia, di Gedung Parlemen Australia. Ketika itu Downer secara eksplisit mengatakan,

Dan ini sudah menjadi keputusan Pemerintah Australia, tidak hanya merupakan keputusan politik pemerintah, tetapi juga keputusan birokrasi Australia. Hampir tanpa pengecualian, terpisah-pisahannya wilayah Indonesia, akan menjadi bencana strategis bagi seluruh tetangga Indonesia, termasuk Australia. Kami dengan tegas menyatakan bahwa terjadinya disintegrasikan di Indonesia sama sekali bukan menjadi keinginan Australia, dan bukan keinginan Asia

⁹⁸ "Papua is part of Indonesia, says Downer", Ployers@gn.Apc.Org (Tapol).

*Tenggara, kami tidak ingin melihat hal itu terjadi. Walau begitu jelas, kami mengharapkan, Indonesia mengikuti norma HAM.*⁹⁹

Di samping reaksi yang dikemukakan secara bilateral, reaksi bersama yang diberikan melalui Forum Pasifik Selatan tentunya signifikan untuk diperhatikan. Hal ini setidaknya memperhitungkan dua hal berikut. Pertama, Forum Pasifik Selatan, seperti telah disinggung pada Bab sebelumnya, adalah salah satu target diplomasi geakan OPM. Bahkan Nauru dan Vanuatu yang secara terang-terangan mendukung gerakan separatis yang dimotori OPM berjanji untuk menjadikan forum ini sebagai target diplomasinya. Kedua, sikap negara-negara Pasifik tidak jarang berbeda antara yang dikemukakan secara bilateral dengan sikap yang dikemukakan. Tetapi hingga KTT PIF ke-32, posisi resmi forum tetap mengakui integritas Papua menjadi bagian dari wilayah kesatuan Indonesia, kendatipun forum ini tetap menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi yang tengah berlangsung di Papua.

3.3.2. Reaksi Negara dan Kelompok Lainnya

Upaya internasionalisasi isu separatis Papua yang dimotori OPM nampaknya tidak saja mendapat reaksi dari negara-negara di kawasan Pasifik, tetapi juga dari negara dan kelompok-kelompok non-pemerintah di luar negara-negara di kawasan Pasifik. Sebuah seminar tentang Papua Barat pada tanggal 20 November 1999 yang diorganisir oleh *the Foundation for Studies and Information of Papua Peoples* berhasil mempengaruhi Menteri Luar Negeri Belanda, J. J. Van Aarsten, untuk menyetujui suatu investigasi terhadap situasi yang terjadi ketika Papua Barat masuk kedalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁰⁰

Selanjutnya beberapa senator partai Buruh Australia dari fraksi kiri juga telah mulai menjadikan isu separatis Papua sebagai salah satu soal yang diangkat di dalam perdebatan parlemen Australia. Hal ini merupakan hasil dari dibentuknya "Australian Parliamentarian Group for West Papua" di Parlemen Federal Australia pada tanggal 2 November 2000 di Canberra.

Dukungan dan reaksi serupa juga diperlihatkan oleh Partai Hijau di Selandia Baru. Pada tanggal 18 oktober 2000 terjadi debat di parlemen selandia

⁹⁹ "Forum Menteri RI-Australia, Australia Dukung Kedaulatan RI" *Kompas*, 9 Desember 2000.

¹⁰⁰ *Pacific News Bulletin*, December 1999, h.3.

baru yang di hadiri oleh John Ondawane, perwakilan internasional gerakan kemerdekaan Papua Barat. Tiga senator dari Partai Hijau, Partai aliansi dan Partai Buruh menyatakan keprihatinan atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Parlemen Selandia Baru menyatakan dukungan mereka pada perjuangan rakyat papua dengan menyatakan: "New Zealand should be at the forefront of defending the West Papua people's rights in their hour of need".

Di samping itu, pemerintah Selandia Baru juga telah melekukan kunjungan ke Papua pada tanggal 21 Mei 2000. Pada prinsipnya, pemerintah Selandia Baru prihatin terhadap masalah-masalah pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah sosial lainnya di Papua. Tetapi hasil kunjungan ini nampaknya lebih dari sekedar memberikan bantuan pada tersebut di atas, tetapi lebih pada invesgtigasi situasi keamanan, yang akhirnya sepakat menjadikan Selandia Baru sebagai salah satu pihak yang berada di garis untuk mempertahankan hak-hak orang Papua (Papua Barat).

Walaupun, belum mendapat reaksi yang jelas, keompok-kelompok OPM juga telah melakukan pendekatan kepada Cina. Di dalam pertemuan tahunan Forum Pasifik yang diselenggarakan di Tarawa, Karibati, sejumlah tokoh penting Papua telah melakukan pendekatan kepada pejabat-pejabat Cina yang hadir di dalam forum tersebut.

BAB IV

ANALISIS ANCAMAN

GERAKAN PAPUA MERDEKA

4.1. Keinginan Papua untuk Merdeka

Dari gambaran yang terpapar pada bab-bab sebelumnya ada sejumlah bukti kuat bahwa Indonesia sedang menghadapi persoalan yang cukup serius berkaitan dengan adanya upaya separatis Papua. Sebagaimana yang diuraikan di dalam Bab 3, upaya separatis Papua yang diupayakan sebagian masyarakatnya bukanlah persoalan baru. Masalah gerakan separatis ini adalah produk sampingan (*by product*) dari sejarah bergabungnya Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun alasan utama yang menyebabkan timbulnya masalah separatis ini ialah ketidakpuasan sebagian masyarakat Irian terhadap proses pelaksanaan Pepera pada tahun 1969. Walaupun dari kacamata Indonesia proses tersebut telah dianggap final setelah mendapat pengesahan PBB melalui Resolusi MU No. 2504 tertanggal 19 November 1969, tetapi sebagian masyarakat Papua merasa adanya 'ketidakadilan' dalam pelaksanaan Pepera serta kurang terwakilinya aspirasi seluruh masyarakat akibat penggunaan sistem perwakilan serta cara musyawarah dalam Pepera.

Argumentasi yang dipakai Indonesia menyebutkan bahwa Irian Barat (Papua Barat) Barat bagian dari wilayah jajahan Belanda yang seharusnya ikut diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada waktu penyerahan kedaulatan sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, tetapi justru oleh Belanda dijanjikan untuk diatur kemudian. Berdasarkan sejarah dan hukum internasional, maka Indonesia berhak atas wilayah Papua sebagaimana status wilayah-wilayah lain di bumi nusantara Republik Indonesia.

Di samping itu, persoalan pengambilan suara menurut prinsip *act of self-determination* yang digariskan Persetujuan New York tidak menyebut diberlakukannya prinsip 'satu orang satu suara' (*one man one vote*) di dalam proses penentuan pendapat rakyat. Persetujuan New York juga tidak secara spesifik menyatakan prosedur dan tatacara pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri dimaksud.

Hal di atas didukung oleh suatu fakta bahwa kondisi perkembangan ekonomi, situasi sosial, agama dan keadaan geografis Papua Barat ketika itu tidak memungkinkan menerapkan penentuan suara secara perorangan karena itu Indonesia mengadakan pembicaraan dengan pihak PBB baik di Jakarta maupun di New York tentang teknis pengambilan suara. Adapun nota hasil pembicaraan yang kemudian disampaikan kepada Duta Besar Fernando Ortiz Sanz adalah sebagai berikut:

- a) Penentuan nasib sendiri akan dilaksanakan oleh Majelis Pemusyawaratan di setiap kabupaten dengan sistem demokrasi musyawarah,
- b) Majelis Pemusyawaratan tersebut akan terdiri atas tiga perwakilan yakni Regional yang dipilih secara langsung oleh masyarakat; Fungsional yang mewakili kepentingan politik, sosial, budaya dan agama; serta Tradisional yang tersiri dad wakil suku-suku yang dipilih secara langsung, dan
- c) Metode ini dikonsultasikan terlebih dahulu dengan masyarakat Irian sesuai dengan ketentuan Persetujuan New York (*New York Agreement*)

Di samping itu, Indonesia juga berpegang pada argumen yang menyebutkan bahwa Persetujuan New York secara tersurat maupun tersirat tidak mewajibkan proses penentuan pendapat rakyat dengan cara *one man one vote*. Atas dasar itu maka Indonesia berpendirian bahwa proses pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (Pepera) di Papua pada tahun 1969 adalah sah dan demokratis serta legal dan kuat secara hukum internasional menyusul pengesahan melalui Resolusi MU PBB No. 2504 tertanggal 19 November 1969.

Sebaliknya, argumentasi yang dikemukakan kelompok pejuang separatis Papua pada prinsipnya melihat adanya ketidakadilan dalam proses pelaksanaan Pepera. Hal tersebut dikatakan tidak adil karena adanya anggapan tidak terwakilinya seluruh aspirasi masyarakat Papua Barat karena Pepera tidak dilakukan melalui mekanisme *one man one vote*.

PEPERA 1969 merupakan awal masuknya Papua dalam pangkuan NKRI. Setelah perjuangan sengketa yang begitu rumit dengan Belanda. Dalam sejarahnya, kekerasan merupakan hal yang tidak lepas dalam perjalanan masyarakat Papua, baik sebelum masuk NKRI maupun sesudahnya. Perjuangan pemerintah dalam melakukan lobi-lobi internasional, baik pendekatan terhadap Belanda maupun forum di PBB, agar Papua menjadi bagian dari NKRI, dinilai oleh sekelompok masyarakat Papua tidak

membawa aspirasi dari masyarakat Papua sendiri. Hal ini tertera jelas dalam Bab III, setelah PEPERA dilaksanakan banyak masyarakat Papua yang meninggalkan tanah Papua baik ke Belanda, Papua Nugini ataupun mengasingkan diri ke hutan-hutan di Papua.

Ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah RI menyebabkan reaksi penolakan yang kemudian berujung mendirikan Organisasi Papua Merdeka yang bertujuan ingin memisahkan diri dari NKRI. Gurr dalam teori deprivasi menjelaskan mengapa dalam sekelompok manusia ingin melepaskan diri dari sebuah komunitas karena adanya kekurangan yang dialami oleh kelompok tersebut, kekurangan yang dimaksud bisa rasa tidak senasib, tidak terakomodasi baik secara ekonomi maupun politik. Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua yang menjadi pendorong dan semangat kuat bagi para aktivis Gerakan Papua Merdeka, baik gerakan secara politik di Indonesia maupun mencari dukungan dari luar negeri melalui LSM-LSM dan forum internasional, seperti PBB.

Di samping itu (sebagaimana diuraikan pada Bab 3), kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua ini juga berargumen bahwa Papua telah menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1961 melalui Deklarasi Papua Merdeka yang dicetuskan dalam Kongres Rakyat Papua I. Adapun bunyi deklarasi tersebut ialah;

“To all the Papuan people, from Numbay Jayapura to Merauke, From Sorong to Beliem Star mountains and from Biak to the isle of adi: with God blessing, we take this opportunity to day to announce to you all that... the land and the people of Papua have been declared to be free and independent (de facto and the jure). May god be with us, and let it be known to the world that the sincere wish of the papuan people to be free and independent in their own country hereby fulfilled.”

Adapun lagu kebangsaan Papua adalah “ Oh My Land Papua”, dengan bendera kebangsaan bernama “ Morning Star” dan nama resmi ialah Papua Barat (West Papua).

“The widespread perception of relative deprivation leads to discontent, which lead to politization of discontent, which tends to lead to political violence.” Ini merupakan inti dari teori deprivasi Gurr, ketika ketidakpuasan berkembang akan mengarah kepada politisasi ketidakpuasan tersebut yang berujung kepada kekerasan

politik. Rasa frustrasi yang dialami oleh kelompok masyarakat Papua, atas kesenjangan ekonomi yang dirasakan, keterbatasan dalam bidang politik, serta rasa “berbeda” dengan kelompok etnis lainnya kemudian memuncak sehingga menimbulkan gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI. Akumulasi frustrasi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Papua kemudian diwujudkan melalui gerakan perlawanan baik secara politik maupun bersenjata. Perkembangan Gerakan Papua Merdeka dari kurun 1961- sekarang, kurang lebih menggambarkan bagaimana proses ketidakpuasan yang berkembang dalam masyarakat Papua menjadi sebuah gerakan politik; melalui perjuangan di forum PBB, yang kemudian berujung pada gerakan bersenjata yang dilakukan TPN/OPM ataupun kekerasan dalam aksi yang dilakukan para aktivis Papua ketika menyuarakan keinginan untuk merdeka kepada pemerintah Indonesia.

Prilaku para aktivis Gerakan Papua Merdeka melakukan perjuangan untuk memisahkan diri karena mereka berpikir mereka berhak untuk mendapatkannya. Masyarakat Papua merasakan nilai ekspektasi dan nilai kapabilitas yang mereka miliki, yaitu nilai ekspektasi untuk mendapatkan kehidupan yang “merdeka”, dalam artian memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti masyarakat Indonesia lainnya, tetapi ketika hal tersebut tidak terpenuhi, nilai kapabilitas yang mereka miliki kemudian muncul, mereka merasakan sebuah keyakinan mampu untuk mendapatkan kondisi yang “merdeka” melalui Gerakan Papua Merdeka. Timbulnya gerakan ini semata-mata hanya karena ingin merasakan kehidupan yang merdeka dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lainnya.

Di dalam perkembangannya, sebab utama ini diperkuat oleh sejumlah faktor seperti eksploitasi sumber alam dan perusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan militerisasi, marginalisasi sosial dan budaya, perubahan situasi internasional, serta momentum reformasi yang dialami Indonesia semenjak jatuhnya pemerintahan Soeharto.

Eksplorasi sumber daya alam dan perusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan militerisasi serta marginalisasi sosial dan budaya telah memberi dorongan untuk muncul dan perkembangannya keinginan untuk memisahkan diri dan mengganggu proses inkorporasi dalam kebangsaan Indonesia. militerisasi sebagai alat penyelesaian masalah tak selalu bisa ampuh, tetapi sering *counter-*

productive, terutama kalau pertimbangan sosial-buday tidak diperhatikan. Namun hal ini tidaklah harus diartikan bahwa penyelesaian secara teknis-militer tidak berguna.

4.2. Proses Integrasi Nasional Papua

Pemerintah dalam menghadapi Gerakan Papua Merdeka melakukan upaya yang sangat keras meredam keinginan masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Sejak PEPERA 1969, berbagai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua sudah dilaksanakan. Namun, hal tersebut masih belum mampu meredam keinginan memisahkan diri dari NKRI oleh sekelompok masyarakat Papua.

Gerakan Papua Merdeka menimbulkan berbagai reaksi dari pemerintah NKRI. Upaya pendekatan secara sosial melalui pembangunan infrastruktur maupun pendidikan dan kesehatan sudah dilakukan hingga operasi militer untuk memberantas gerakan bersenjata dari TPN/OPM. Prilaku negara dalam upaya pemberantasan Gerakan Papua Merdeka dikarenakan negara sebagai institusi harus bisa mempertahankan keutuhan dan kewibawaannya. Bagi suatu negara yang memiliki keanekaragaman atas suku bangsa, agama, yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang amat luas dan besar tanpa integrasi dapat mempengaruhi ketentraman dan keamanan bagi negara itu sebab mereka tidak merasa menyatu dan secara bebas memainkan peranannya sebagaimana warga negara biasa.

Para ahli sudah menyatakan integrasi politik harus dilakukan, terutama negara yang beragam suku, ras dan agama seperti Indonesia, untuk menegakkan wibawa negara dimana rakyatnya mengakui hak-haknya sebagai institusi dan rakyatnya mengakui adanya konsensus normatif sehingga mau diatur oleh negara. Apabila ada sekelompok masyarakatnya yang tidak mau diatur, dalam hal ini mau memisahkan diri, sudah sewajarnya bila negara berperilaku mencegah hal tersebut. Upaya pencegahan yang dilakukan merupakan upaya yang dapat dilakukannya dalam konteks hak sebagai institusi negara, batas yang dimaksud adalah hak asasi manusia. Bila negara melakukan upaya yang melanggar batas-batas kemanusiaan dalam mengatasi upaya memisahkan diri sekelompok orang, akan menimbulkan reaksi internasional.

Pemerintah memperjuangkan Papua baik dengan Belanda maupun forum PBB, bukan merupakan perkara yang mudah dan perjuangan yang sulit. Ketika Papua diakui merupakan bagian dari NKRI, maka rasa memiliki dan mempertahankan akan muncul dengan sendirinya. Perbedaan yang nampak antara masyarakat Papua dengan masyarakat Indonesia lainnya, dalam warna kulit, membuat pemerintah melakukan upaya pengintegrasian, bahwa masyarakat Indonesia yang beragam ras, suku, dan agama merupakan satu kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini tampak dalam simbol “Bhineka Tunggal Ika.”

Secara alamiah, manusia mengarahkan kesetiannya pada kelompok-kelompok kedaerahan, etnis, keagamaan, bahasa atau disebut juga primordialisme. Oleh karena itu, bagi negara yang memiliki keanekaragaman suku, etnis, ras, dan agama integrasi bangsa sangat penting untuk menciptakan identitas nasional.

Pemerintah sewajarnya melakukan percepatan proses integrasi bangsa dengan pengesahan satu bahasa nasional, memaksakan program-program pendidikan dan banyak hal lainnya, yang pada prosesnya menimbulkan rasa sakit hati dalam kalangan minoritas akibat dari tekanan dari penguasa untuk mewujudkan identitas nasional, kemudian kalangan minoritas ini menjadi kaum penentang. Integrasi alamiah, yang semestinya terjadi, dihambat sendiri oleh akselerasi yang dilakukan pemerintah.

Penyatuan alamiah yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat Papua terhambat karena program-program pemerintah yang berusaha menyeragamkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Adat istiadat yang sudah menjadi dasar hidup masyarakat Papua diterobos digantikan sistem pemerintahan yang baru. Hal-hal seperti ini yang membuat penyatuan antara “rasa bahwa masyarakat Papua yang berkulit hitam juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia” berubah menjadi “rasa masyarakat Papua bukan bagian dari NKRI.”

Perbedaan persepsi, masyarakat Papua merasa tidak terakomodasi keinginannya dengan pemerintah yang melakukan upaya dalam rangka integrasi nasional, menimbulkan konflik di kedua belah pihak. Konflik tersebut berawal dari tataran ide yang berkembang dalam masyarakat, dimana kedua belah pihak mencari dukungan, hingga berujung pada konflik bersenjata.

Konflik yang diakibatkan separatism bisa meningkat menjadi perang kota dan perang sipil, dalam studi konflik, peningkatan ini yang membahayakan baik bagi pemerintahan maupun rakyat yang menjadi korban. Eskalasi konflik dalam Gerakan Papua Merdeka sejauh ini masih melakukan milisi bersenjata dan dilakukan secara gerilya oleh TPN/OPM.

Dalam perkembangannya aktor-aktor tersebut membentuk kekuatan yang terorganisir. Ideologi kemerdekaan dilanjutkan secara turun-temurun kepada generasi penerus Papua. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, konflik yang terjadi di Papua tersosialisasikan secara turun-temurun dan berkelanjutan ke dalam kehidupan masyarakat. Sosialisasi konflik kelompok separatis tersebut menyangkut ideologi perjuangan kemerdekaan, garis perjuangan pergerakan separatis, dan didukung oleh pemahaman *cargo cult* yang dipercayai oleh sebagian masyarakat Papua. Pemahaman ini banyak diyakini oleh masyarakat Papua, mereka percaya bahwa kemerdekaan Papua akan membawa kemakmuran dan kehidupan tentram bagi masyarakat Papua. Hal inilah yang membangkitkan fanatisme ideologi perjuangan Papua merdeka dalam kelompok separatis.

Masyarakat Papua mempelajari konflik Papua dari kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Proses pembelajaran tersebut sangatlah menentukan sikap bagaimana individu atau kelompok masyarakat memposisikan dirinya atau kelompoknya dalam konflik di Papua. Masyarakat Papua masih sangat memegang teguh adat, sehingga posisi kepala suku sangatlah dominan dalam setiap masyarakat. Pemahaman kepala suku mengenai konflik Papua akan sangat menentukan bagaimana kelompok masyarakat tertentu menentukan sikap untuk pro atau kontra terhadap gerakan separatis yang mengusung kemerdekaan Papua. Pemuka agama dan pejabat birokrat juga menentukan proses belajar sosial masyarakat Papua dalam menyikapi konflik yang terjadi.

Nasionalisme Papua yang berkembang secara turun temurun juga didukung oleh faktor identitas sosial masyarakat Papua. Secara fisik dan kultur masyarakat Papua dapat dengan mudah membentuk identitas sosial mereka yang berbeda dengan kebanyakan penduduk bangsa Indonesia.

Dari penjabaran diatas maka pemerintah harus bijaksana dalam mengelola konflik Papua. Pemerintah harus sebisa mungkin mengeliminir eskalasi konflik ke

arah konflik destruktif yang menghancurkan. Upaya kebijakan resolusi harus dibangun atas dasar kesepakatan antar kelompok yang bertikai dengan fokus memecahkan permasalahan di Papua. Pendekatan kekerasan dan sentralistik hanya akan meningkatkan antipati masyarakat Papua terhadap Indonesia. Upaya penyelesaian konflik Papua harus dilakukan dengan jalan damai, karena akan menjadi landasan bagi terwujudnya integrasi bangsa di Papua. Faktor identitas masyarakat Papua harus benar-benar diperhatikan, karena selama ini masalah mendasar adalah kurang perhatian terhadap hak-hak dasar masyarakat adat.

Pemerintah menawarkan penyelesaian bagi konflik Papua melalui Otonomi Khusus, program yang ditawarkan yaitu

4.3. Ancaman Gerakan Papua Merdeka

Sejak kemunculannya pada tahun 1961, Gerakan Papua Merdeka merupakan ancaman serius terhadap keutuhan dan stabilitas NKRI. Indonesia sebagai negara yang masih baru merdeka dan lepas dari penjajahan menghadapi isu separatis Papua tentunya sedikit kewalahan yang mengakibatkan permasalahan Papua menjadi berlarut-larut hingga sekarang. Barry Buzan menyatakan, khususnya di negara-negara yang masih bergumul dengan bina-bangsa (*nation-building*) dan bina-negara (*state-building*), tetap tegaknya suatu negara memang lebih dari sekedar dari kemampuannya untuk menjamin keamanan fisik (*physical based of the states*) seperti wilayah, penduduk, sumberdaya, tetapi juga mempertahankan tegaknya lembaga-lembaga politik dan aturan-aturan yang mencerminkan otoritas negara (*institutions based*) dan bahkan, dalam kondisi tertentu, terpeliharanya wawasan dan cita-cita bersama (*ideational based*). Gerakan Papua Merdeka dalam perkembangannya mengganggu bukan hanya cita-cita bersama Indonesia tetapi keamanan fisik, dengan melakukan kontak senjata di wilayah Papua.

Kondisi lain yang dapat memperjelas gambaran konflik Papua adalah permasalahan pemenuhan kebutuhan masyarakat Papua. Masyarakat yang multi etnik seperti Papua akan dapat stabil apabila kebutuhan akan kesejahteraan, keamanan, keadilan, pengakuan terhadap identitasnya dapat terpenuhi. Masyarakat Papua merasa identitasnya sebagai masyarakat asli Papua terpinggirkan oleh kehadiran transmigran yang secara sosial ekonomi lebih baik

dibandingkan kebanyakan masyarakat asli Papua. Tidak terpenuhinya kebutuhan dan keadilan akan identitas masyarakat asli Papua membangkitkan sikap anti terhadap pemerintah.

Kongres Rakyat Papua II Juni 2000 menyatakan:¹⁰¹

- e) Secara *de facto* rakyat Papua sudah berdaulat sejak 1 Desember 1961 (KRP I).
- f) Menolak isi Perjanjian New York 1962 yang dianggap cacat secara hukum dan moral karena tidak melibatkan wakil-wakil dari Papua.
- g) Menuntut PBB mencabut Resolusi Sidang Umum No. 2504 tanggal 19 Desember 1969 yang isinya mensahkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA – *Act of Free Choice*).
- h) Meminta PBB, AS dan Belanda untuk meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses integrasi Papua ke dalam wilayah RI.

Perjuangan yang dilakukan oleh Gerakan Papua Merdeka dilakukan secara politik dan bersenjata. Perjuangan politik dilakukan melalui Organisasi Sayap Gerakan Papua Merdeka, yaitu "United West Papua National Council for Independence" (UWPNACI) /Dewan Kesatuan Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan, *Free West Papua Organization* (FWPO) yang dipelopori Benny Wenda, *International Parliamentary for West Papua* (IPWP), *International Lawyer for West Papua* (ILWP) dan *Free West Papua Campaign* (FWPC). Organisasi-organisasi ini hanya sebagian dari sekian banyak organisasi lain yang melakukan perjuangan politik bagi kemerdekaan Papua. Mereka aktif melakukan lobi-lobi internasional, baik meminta dukungan rakyat luar negeri maupun pemerintahannya. Sasaran mereka agar PBB mau memperhatikan permasalahan yang terjadi di Papua.

Konflik di Papua semakin rumit ketika, berbagai aktor internasional baik dari NGO maupun parlemen dari negara-negara tertentu memberikan dukungan terhadap gerakan separatis. Upaya internasionalisasi masalah Papua memang merupakan salah satu strategi dari Gerakan Papua Merdeka untuk mewujudkan kemerdekaan Papua. Gerakan Papua Merdeka terus berupaya untuk mendapatkan dukungan dalam rangka menggugat keabsahan *New York Agreement* dan hasil Pepera. Berbagai isu pelanggaran HAM di Papua dijadikan sebagai senjata utama

¹⁰¹ Departemen Luar Negeri RI, Kedubes RI di London, "Komitmen Pemerintah atas Penyelesaian Berbagai Masalah di Tanah Air", *Warta Indonesia*, <http://www.dfa-deplu.go.id>

untuk mendapatkan simpati dari negara-negara internasional. Melalui tokoh-tokoh GSP yang berada di luar negeri, kelompok separatis terus melakukan propaganda dan menjalin kontak dengan berbagai pihak yang mendukung Gerakan Papua Merdeka.

Usaha internasionalisasi masalah Papua juga dilakukan melalui LSM-LSM baik lokal maupun skala internasional. NGO Internasional yang sering mengangkat masalah HAM di Papua diantaranya *Amnesty International (AI)*, *Asian Human Right Commission (AHRC)*, *Asian Legal Resource Centre (ALRC)*, *Institute for Papuan Advocacy and Human Right (IPAHR / ELSHAM)*, *Human Right Watch (HRW)*, *Asian Indonesia and Tribal People Network (AITPN)*; *International Crisis Group*; *Human Rights First (HRF)*; *Australia West Papua Association (AWPA)*; *Pacific Caucus*; *Reporter Without Border (RSF)*; *International NGO Forum on Indonesian Development (INGOFID)*; *TAPOL*; *Commission of the Churches on International Affairs of the World Council of Churches (CCIAWCC)*; *Society for Threatened Peoples (STP)*; *Unpresented Nations and People Organisation (UNPO)*; *Justice and Peace Netherlands*; *Cordaid-NGO with General Consultative Status*; *West-Papua-Network Germany*; *United Evangelical Mission (UEM)*.

Human Right Watch (HRW) sudah menerbitkan empat buah laporan terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Papua; *Kopassus Siksa Orang Papua di Merauke (2009)*, *Protes dan Hukuman Tahanan Politik di Papua (2007)*, *Endemic Abuse and Impunity in Papua's Central Highlands (2007)*, *VIOLENCE AND POLITICAL IMPASSE IN PAPUA (2001)*. Selain itu juga, HRW

Selain itu, di regional Asia juga tersebar melalui *Asia Pasific Solidarity Network (APSN)* yang membahas seputar isu-isu aktual di kawasan Asia Pasifik; termasuk isu Papua. APSN mengangkat isu-isu Papua melalui jaringan media internasional diantaranya *ABC News Asia*, *ABYZ News Links Asia*, *Asia Daily*, *AsiaNet News*, *Asia News Network*, *Asia-Pacific News*, *Asia Times*, *Asian Observer*, *BBC News Asia Pacific*, *Channel News Asia Pacific*, *Radio Australia Asia Pacific News*, *Radio New Zealand*, dll.

Melihat usaha yang dilakukan Gerakan Papua Merdeka dalam mencari dukungan internasional dalam mewujudkan kemerdekaan Papua, merupakan

ancaman yang serius bagi keutuhan dan stabilitas NKRI. Pemerintah harus serius dalam menangani masalah Papua dengan sangat hati-hati. Belajar dari pengalaman Aceh dan Timor Timur (sekarang Timor Leste), “kemerdekaan” yang mereka dapatkan selain karena adanya kesempatan tidak lepas dari dukungan internasional.

Gerakan Bersenjata yang dilakukan oleh TPN/OPM dengan kekuatan yang terbatas melakukan perlawanannya dengan cara perampokan, penghadangan, penculikan, penyanderaan dan penyerangan terhadap para warga atau pekerja pendatang, warga negara asing dan aparat keamanan TNI/Polri yang berada di pedalaman. Serangannya bersifat sporadis dan menggunakan taktik “*hit and run*” dengan motif ekonomi guna memperoleh tebusan serta perusakan atau pembongkaran instalasi-instalasi vital guna memperoleh senjata maupun aksi melintasi perbatasan dari dan ke Papua Nugini.

Menghadapi kegiatan bersenjata, pemerintah menurunkan personil POLRI dan TNI. Akan tetapi, dalam perkembangannya penyerangan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap orang yang diduga ataupun merupakan anggota TPN/OPM menjadi bumerang bagi pemerintah, dengan isu penyiksaan tahanan dan pelanggaran HAM. Pemerintah dalam melakukan operasi kekuatan militer harus berdasarkan *code of conduct* sehingga dapat melindungi aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya. Munculnya video penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap orang Papua, yang diduga TPN/OPM, merugikan bagi pemerintah dalam menjaga image negara dimata dunia internasional. Bila pelanggaran HAM yang terjadi semakin meningkat baik jumlah dan kualitasnya, kemungkinan masuknya internasional semakin besar. Banyak negara dan forum internasional sudah memperingatkan Indonesia, bahwa apabila dalam penyelesaian masalah Papua terjadi pelanggaran HAM yang besar maka dunia internasional akan terlibat dalam permasalahan Papua.

Strategi pemerintah dalam menghadapi Gerakan Papua Merdeka, melakukan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Pendekatan kesejahteraan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendidikan, dll. Pendekatan melalui Otonomi Khusus yang sudah tinggal 10 tahun lagi, dinilai gagal oleh Gerakan

Papua Merdeka. Pemerintah sudah mengelontorkan 30T rupiah melalui dana Otsus dan 1,7T rupiah tiap tahunnya melalui dana percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi masih belum menurunkan semangat memisahkan diri dari masyarakat Papua. Perlu keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan amanat dari UU Otonomi Khusus sehingga niat baik dan penyamaan kedudukan masyarakat Papua sebagai bagian dari NKRI terlihat dan dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat Papua yang tinggal di hutan-hutan dan gunung-gunung.

Apabila kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat Papua, maka rasa sebagai bagian dari NKRI yang memiliki kedudukan dan hak yang sama akan muncul secara perlahan-lahan. Peningkatan pendidikan dan kesehatan juga akan memacu masyarakat Papua lebih berperan aktif dalam aktifitas ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Bahkan bukan hanya kancah nasional mungkin bisa menjadi *leading factor* di dalam dunia internasional. Kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat Papua, semata-mata hanya pembangunan di Papua jauh tertinggal dibandingkan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Ketergesaan pemerintah dalam memacu proses integrasi nasional terhadap masyarakat Papua menjadi hambatan bagi masyarakat Papua untuk mengerti bahwa pembangunan Papua membutuhkan jalan dan proses yang panjang. Mereka hanya mengerti bahwa hasil yang dicapai di Jawa dapat dicapai juga di Papua, tetapi proses dan waktu yang dilalui tidak dilihat oleh mereka.

4.4. Kebijakan Pemerintah Terhadap Reaksi Negara-Negara Pasifik

Di dalam akhir Bab 3 juga telah dikemukakan sejumlah fakta yang menunjukkan adanya upaya-upaya intensif yang dilakukan kelompok pejuang kemerdekaan Papua Barat dalam rangka internasionalisasi isu separatist Papua. Secara sistimatis negara serumpun kawasan asia pasifik, diplomasi ke forum pasifik selatan, diplomasi ke forum PBB, dan upaya lain dalam rangka membuka dan menjagadukung jaringan internasional terhadap upaya separatist di Papua. Upaya itu dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat.

Selain itu juga memperlihatkan sejumlah dukungan reaksi yang diberikan negara lain terhadap upaya internasionalisasi yang digalakkan kelompok pejuang kemerdekaan Papua Barat. Fakta-fakta tersebut telah memperlihatkan adanya dukungan luas dari negara di kawasan pasifik.

Meskipun dari sisi kuantitas dukungan tersebut boleh dibilang masih terbatas (baru empat negara yaitu Vanuatu, Nauru, Tuvalu dan kepulauan cook), tetapi realitas menunjukkan bahwa vanuatu dan nauru justru secara berkelanjutan dan kontinyu menyuarakan aspirasi Papua Merdeka pada berbagai forum termasuk Forum Pasifik Selatan dan PBB.

Melihat kenyataan tersebut maka logislah adanya kekhawatiran bahwa jika upaya separatis Papua tidak ditangani secara tepat maka stabilitas Indonesia secara keseluruhan dapat ikut terganggu. Untuk itulah maka diperlukan suatu formula kebijakan luar negeri yang tepat untuk mengantisipasi meningkatnya arus dukungan internasional yang dimaksud terutama yang berasal dari negara-negara di kawasan pasifik. Formula kebijakan luar negeri itu merupakan salah satu *track* yang perlu disertai dengan formula kebijakan dalam negeri khususnya terhadap Papua., sehingga pemerintah Indonesia menjalan *dual track* (ke dalam dan ke luar) dalam menyelesaikan persoalan ini. Sebagaimana diketahui, kebijakan dalam negeri yang terakhir yang menyangkut masalah ini adalah akan diberlakukan UU Otonomi Khusus untuk Papua. RUU itu kini sedang diproses dan mencapai tahap akhir oleh DPR-RI. Sebagaimana Diskusi Khusus TVRI dengan Gubernur Jaap Salosa dan Wakil Ketua Pansus RUU Otonomi Khusus Papua, Ferry Mursidan Baldan, dalam Siaran Berita TVRI, Rabu, 3 Oktober 2001, jam 18.15-18.30, salah satu poin penting yang sedang dibicarakan oleh pembagian hasil 80-20, yang penting adalah bila sudah menjadi UU maka realisasinya segera dilakukan.

Dalam kaitannya politik luar negeri, ada beberapa hal penting yang patut dicatat mengenai politik luar negeri Indonesia. Pertama, meski sudah sejak 1970-an Indonesia menganggap penting kawasan Pasifik, tetapi perhatian ke kawasan ini nampaknya baru dimulai awal 1980-an. Keadaan ini tentu dapat membawa sejumlah interpretasi dari negara-negara di kawasan Pasifik. Salah satu interpretasi yang ada menyebutkan bahwa sebetulnya Indonesia sengaja tidak

memberi perhatian yang cukup pada negara-negara di kawasan Pasifik pada era 1970-an hingga awal 1980-an.

Tetapi argumen yang pernah dikemukakan Indonesia ialah bahwa banyak isu yang terjadi di kawasan Asia Tenggara --yang merupakan lapisan pertama (*first layer*) dalam lingkaran prioritas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia— yang meminta banyak perhatian Indonesia. Karena itu logislah jika Indonesia memberi perhatian pada kawasan terdekatnya lebih dahulu, baru kemudian memperhatikan kawasan di luar itu dan dalam hal ini kawasan Pasifik yang berada pada lapis kedua lingkaran prioritas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Namun argumentasi itu tidak disertai dengan kenyataan bahwa perhatian dan energi Indonesia untuk kawasan itu selama Orde Baru terlalu berlebihan bila dibanding dengan perolehan dan kerugian dilihat dari sudut kepentingan nasional, sehingga menyebabkan munculnya keinginan dari Presiden Abdurrahman Wahid untuk menggeser perhatian dari kawasan Asia Tenggara ke kawasan-kawasan lain, seperti segitiga India-Indonesia-Cina dan forum Pasifik.

Secara umum setidaknya ada dua alasan utama mengapa Indonesia baru mulai meningkatkan perhatiannya ke kawasan Pasifik awal 1980-an. Pertama, meningkatnya kesadaran Indonesia mengenai posisi geografis di dalam kawasan regional sekitar. Letak Indonesia yang dikitari beberapa kawasan tentu saja mendorong pemerintah Indonesia untuk secara perlahan meningkatkan perannya secara lebih aktif terhadap negara-negara di kawasan tersebut, termasuk negara-negara di kawasan Pasifik. Dalam konteks demikian, hal ini merupakan suatu daya tarik alamiah bagi negara-negara di Pasifik karena bagian timur Indonesia dihuni oleh sebagian besar etnis Melanesia, kelompok etnis yang juga menghuni sebagian besar kawasan Pasifik. Hal ini selanjutnya mendorong Indonesia merasa sebagai bagian dari kawasan Pasifik baik secara geografis maupun secara etnis.

Kedua, posisi yang diambil negara-negara Pasifik terhadap resolusi mengenai Timor Timur di dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia berkeinginan agar negara-negara di kawasan Pasifik secara konsisten memberikan dukungan kepada Indonesia terhadap resolusi mengenai Timor Timur di dalam forum PBB. Dalam kenyataannya, kecuali Vanuatu, negara-negara

di kawasan Pasifik mendukung posisi Indonesia di dalam sidang-sidang Majelis Umum PBB.

Dalam konteks hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik, terlihat adanya peningkatan, baik pada tingkat bilateral maupun pada tingkat multilateral. Pada tingkat bilateral, sekali lagi walau masih terbatas, jumlah hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik juga ikut bertambah. Sebaliknya, pada tingkat multilateral hal ini terlihat dari penerimaan Indonesia sebagai negara Mitra Wicara ke-11 PIF yang ditindaklanjuti dengan keikutsertaan Indonesia dalam KTT PIF ke-32 di Nauru 16-18 Agustus 2001. Secara simultan hubungan pada dua tingkat ini menunjukkan adanya peningkatan interaksi antara kedua belah pihak, apalagi jika tawaran pembukaan hubungan diplomatik yang baru saja dikemukakan Indonesia segera dapat ditindaklanjuti.

Pada tingkat implementasi kebijakan luar negeri, nampak jelas bahwasannya sejak awal Indonesia terlihat memberi prioritas utama hubungannya dengan negara-negara di kawasan Pasifik kepada PNG. Terlihat adanya kecenderungan Indonesia untuk menggunakan PNG sebagai pintu masuk ke kawasan Pasifik. Di dalam bidang ilmu politik maupun ekonomi, intensitas hubungan Indonesia-PNG jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Pasifik.

Dari sisi Indonesia langkah ini nampaknya diambil karena beberapa pertimbangan berikut. PNG adalah negara kawasan Pasifik yang mempunyai perbatasan langsung dengan Indonesia. Karena itu tentu saja banyak persoalan politik-keamanan dan ekonomi yang bersinggungan langsung antara kedua pihak. Salah satunya ialah masalah OPM yang hingga kini sebagian masih menggunakan wilayah PNG untuk melakukan konsolidasi kekuatan. Di samping itu, sejarah integrasi Papua dan hubungan historis Papua (Irian Barat) dengan PNG (lihat uraian tentang hal ini pada Bab 3) membuat Indonesia mau tidak mau mendahulukan perhatian yang lebih kepada PNG dibandingkan dengan negara-negara Pasifik lainnya.

Tetapi persoalannya, langkah Indonesia ini dapat menimbulkan beberapa persoalan lain. Di satu sisi, hubungan baik antar Indonesia dengan PNG tentu saja

dapat menjadi instrumen yang handal bagi Indonesia untuk tetap dapat 'mengendalikan' PNG dari upaya mendukung aktivitas-aktivitas gerakan PNG. Hal ini terbukti dengan tetap konsistennya sikap PNG dalam memberikan penagkuan terhadap wilayah Papua sebagai bagian dari wilayah kesatuan Indonesia.

Pada sisi lain, langkah Indonesia dalam memberikan prioritas penagkuan yang berlebih kepada PNG dibandingkan negara-negara Pasifik lainnya dapat saja menimbulkan semacam sikap 'iri' negara-negara Pasifik terhadap apa yang dilakukan Indonesia. Negara-negara Pasifik dapat saja menganggap Indonesia melakukan kebijakan luar negeri yang bersifat 'diskriminatif'.

Bersamaan dengan itu, aktivitas gerakan OPM yang semakin tidak mendapat dukungan resmi PNG, sebagaimana digambarkan pada Bab 3, semakin memperluas jaringan kerjasamanya dengan negara-negara lain di kawasan Pasifik. Akibatnya, semakin luas pula dukungan dari negara-negara kawasan Pasifik terhadap perjuangan OPM untuk memisahkan Papua dari negara kesatuan Indonesia. Sebagaimana yang dibuktikan dalam Bab 3, ada sejumlah fakta yang menunjukkan meningkat dan meluasnya dukungan dari sejumlah negara di kawasan Pasifik terhadap upaya separatis Papua.

Di dalam kaitannya dengan implementasi politik luar negeri Indonesia dengan negara-negara di kawasan pasifik, Indonesia cenderung menggunakan instrumen ekonomi, dan belum menggunakan instrumen kebudayaan. Ini terbukti dengan proposal Indonesia mengenai bentuk kerjasama melalui skema KTNB yang mulai digunakan mulai awal 1980-an, bersamaan dengan mulai meningkatnya perhatian Indonesia ke kawasan Pasifik. Penggunaan instrumen ini jelas menunjukkan posisi "pengaruh" Indonesia yang cukup besar bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Secara implisit ini berarti bahwa Indonesia cukup yakin melalui instrumen ekonomi ini dapat memainkan peran yang berpengaruh terhadap negara-negara di kawasan ini demi mencapai kepentingan nasional Indonesia. Salah satu contohnya ialah dukungan negara-negara di kawasan ini terhadap posisi Indonesia dalam masalah Timor Timur (sebelumnya akhirnya Timor Timur lepas dari Indonesia).

Belajar dari pengalaman Timor timur dan mempertimbangkan fakta tetap meningkatnya dukungan negara-negara di kawasan Pasifik terhadap upaya separatis Papua serta memperhitungkan kondisi Indonesia yang tengah dalam proses pemulihan ekonomi, maka penggunaan instrumen ekonomi ini tidak lagi dapat diandalkan sebagai instrumen tunggal yang dapat dipakai untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Singkatnya, diperlukan suatu pemikiran ulang mengenai dasar kebijakan luar negeri serta instrumen yang tepat untuk mengembangkan hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Pasifik.

Disamping instrumen ekonomi, terlihat juga adanya kecenderungan Indonesia ikut memperhitungkan posisi Australia dan Selandia Baru di dalam memainkan politik luar negerinya ke kawasan Pasifik. Salah satu bentuk perhitungan tersebut terlihat melalui perwakilan hubungan diplomatik Indonesia untuk Vanuatu oleh kedutaan besar Indonesia di Canberra, Australia. Sementara hubungan diplomatik Indonesia dengan Fiji, Samoa barat dan Tonga diwakilkan oleh kedutaan Besar Indonesia di Wellington, Selandia Baru.

Memainkan kartu Australia dan Selandia Baru di dalam percaturan hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan Pasifik memang penting mengingat kedua negara ini selain mempunyai hubungan historis yang kuat dengan negara-negara kawasan Pasifik, keduanya hingga kini mempunyai pengaruh yang masih kuat karena memberikan kontribusi bantuan ekonomi yang cukup terhadap hampir semua negara di Pasifik.

Tetapi nampaknya memainkan kartu Australia dan Selandia Baru juga mengandung kelemahan terutama dalam kaitannya dengan isu separatis Papua. Perwakilan diplomatik melalui negara ketiga ini bisa saja mengakibatkan informasi yang diterima negara-negara Pasifik mengenai apa yang terjadi di Irian Jaya menjadi tidak seimbang dan bahkan mengandung unsur bias. Artinya bahwa informasi dari sumber dari sumber pertama mengenai apa yang terjadi di Papua menjadi sangat kurang. Akibatnya, pemahaman yang didapat menjadi kurang utuh.

Hal demikian umumnya diperumit oleh fakta bahwa di kedua negara ini, Australia dan Selandia Baru, simpatisan dan basis dukungan terhadap kelompok

OPM juga tidak sedikit jumlahnya, sehingga yang terjadi ialah informasi-informasi yang lebih banyak menyudutkan Indonesia mengenai apa yang terjadi di Papua.

Mempertimbangkan uraian-uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka secara umum dapatlah dikatakan bahwa meskipun Indonesia sejak cukup lama berpendirian bahwa kawasan Pasifik penting, tetapi nampak cukup jelas bahwa hingga kini Indonesia belum mempunyai suatu format “baku” mengenai bentuk pelaksanaan politik luar negeri seperti apa yang sebaiknya diterapkan terhadap negara-negara dikawasan ini. Ada kecenderungan bahwa kebijakan politik luar negeri yang diterapkan Indonesia lebih bersifat *ad hoc*, cenderung bernuansa reaktif terhadap apa yang disuarakan oleh negara-negara dari kawasan ini. Contohnya, Indonesia mulai peduli dengan kawasan ini ketika ada sebagian negara dikawasan pasifik menyuarakan posisi yang berbeda dengan Indonesia baik dalam isu Timor Timur maupun terhadap isu separatis Papua.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Persoalan Gerakan Papua Merdeka adalah persoalan yang sangat penting untuk segera diatasi, karena persoalan separatis itu mengancam kepentingan nasional dan kekuatan nasional Indonesia. Pada dasarnya kesadaran berbangsa merupakan sumber dan faktor paling utama dari kekuatan suatu bangsa. Maka ketika kesadaran berbangsa itu bermasalah, kepentingan nasional pun terancam. Masalah separatis di Papua –sebagaimana setiap masalah separatis– tidak boleh dianggap enteng. Keinginan untuk merdeka sudah ditanamkan dan difasilitasi oleh pemerintah Belanda kepada elit Papua ketika Belanda khawatir tidak bisa mempertahankan wilayah Papua dari Indonesia.

Keberhasilan Indonesia dalam memasukkan Papua dalam NKRI pada 1969 diwarnai kepentingan negara-negara Barat, khususnya AS, yang menghawatirkan pengaruh Blok Komunis (*containment policy*). Pemerintah Indonesia sudah menyadari akan pentingnya kawasan Pasifik sebagai *second layer* dalam politik luar negerinya.

Upaya-upaya untuk menjalin hubungan lebih baik dengan negara-negara di kawasan Pasifik sudah dilakukan sejak 1980-an. Namun, demikian, realisasi dari upaya-upaya itu tidak maksimal dan berkesinambungan karena pemerintah lebih memperhatikan kawasan Asia tenggara sebagai *first layer*-nya. Ada peningkatan upaya menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Indonesia baru mempunyai hubungan diplomatik resmi dengan tujuh dari 22 negara di Pasifik, bahkan enam diantaranya bersifat perwakilan. Hanya PNG yang tidak diwakilkan. Dengan enam negara lainnya, hubungan resmi dibangun dan diwakilkan: Fiji (sejak 1974, di Selandia Baru), Vanuatu (sejak 1980, di Australia), Samoa Barat (sejak 1984, di Selandia Baru), Tonga (sejak 1994, di Inggris), Kepulauan Marshall (di RRC), dan Kepulauan Salomon (di Inggris). Dari tujuh negara yang mempunyai hubungan diplomatik resmi itu hanya Vanuata yang menentang integrasi Papua ke NKRI. Tiga negara yang pro-kemerdekaan

(Kepulauan Cook, Nauru, dan Tuvalu) belum mempunyai hubungan diplomatik resmi dengan Indonesia. Kendati secara resmi negara-negara Pasifik mengakui integrasi Papua ke NKRI, tetapi ada beberapa individu, aktor sub-negara dan LSM yang menyatakan pro-kemerdekaan Papua.

Gerakan Papua Merdeka merupakan ancaman bagi kedaulatan dan keutuhan NKRI. Eskalasi konflik yang mungkin dapat terjadi apabila mereka mendapat dukungan dana dan persenjataan dari luar negeri, sehingga taktik yang hanya gerilya bias meningkat menjadi perang kota atau perang sipil. Hal ini dapat terjadi apabila dukungan persenjataan dan pendanaan yang cukup. Selain itu juga, perlu pelatihan dan kemampuan yang lebih dari yang sekarang dimiliki oleh Gerakan Papua Merdeka Bersenjata.

Bergesernya isu-isu global yang dari dahulu disebut *high politics* menjadi *low politics*, dan perubahan konstelasi dunia dari Perang Dingin menjadi Pasca Perang Dingin menyebabkan masalah-masalah Demokratisasi dan hak-hak asasi manusia menjadi menonjol sekarang ini. Kenyataan baru ini memberi ruang gerak yang leluasa bagi Gerakan Papua Merdeka untuk mengedepankan nasib penentuan sendiri (*self-determination*). Untuk mencegah meluasnya semangat pro-kemerdekaan pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya, antara lain dengan operasi militer. Namun operasi militer yang bersifat teknis dan menggunakan kekerasan masih belum mampu meredam dan mengurangi semangat pro-kemerdekaan.

Secara hukum, posisi NKRI sudah kuat karena masuk kembalinya Irian Barat ke NKRI sudah melalui *de facto* dan *de jure* yang dilakukan PBB. Proses integrasi seharusnya juga menyertakan kepentingan – kepentingan ekonomi dan sosial, sehingga integrasi menjadi mantap. Ada permintaan dunia internasional agar Indonesia menghadapi Gerakan Papua Merdeka dengan memperhatikan norma-norma HAM. Pemerintah dalam melaksanakan strategi untuk mengatasi masalah Papua harus benar-benar memperhatikan norma HAM selain itu juga, terus melakukan lobi-lobi internasional agar secara politik, dunia mengakui bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI dan pemerintah Indonesia melakukan segenap cara untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua.

5.2. Saran

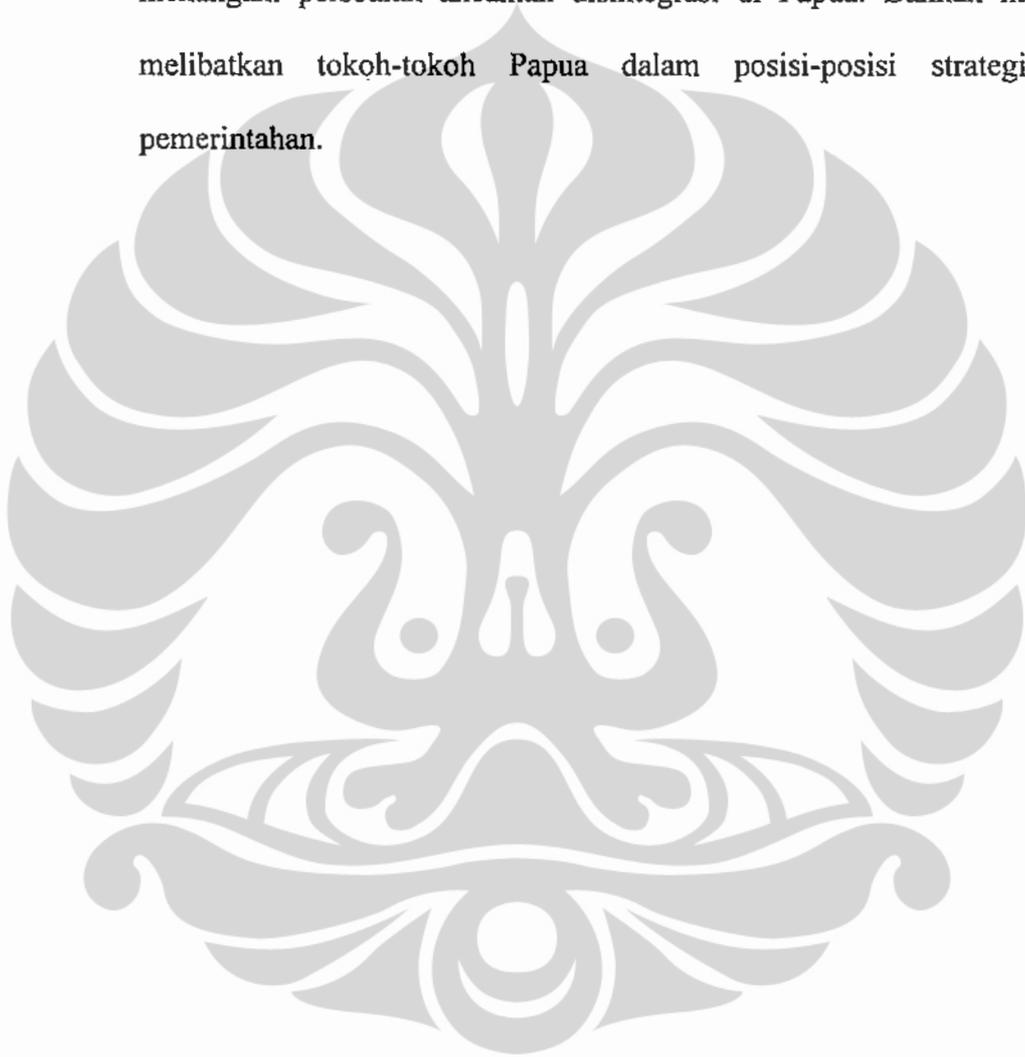
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran kepada pihak-pihak pemerintah agar melakukan beberapa tindakan, diantaranya:

1. Bangsa Indonesia melalui media perlu untuk memperkokoh konsep “Dari Sabang sampai Merauke” dan Bhineka Tunggal Ika sehingga proses integrasi nasional dapat dicapai.
2. Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan perhatian dan perannya ke kawasan Pasifik. Pertimbangan ekonomi yang mungkin tidak menjanjikan keuntungan harus dihadapkan dengan pertimbangan politik dan budaya yang menjanjikan keuntungan strategis jangka panjang dan penguatan sendi kekuatan nasional.
3. Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan upaya pendekatan-pendekatan dengan negara-negara di kawasan Pasifik, bisa dengan menambah pos-pos diplomatik dikawasan tersebut atau melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi ataupun lainnya agar negara-negara tersebut mau mendukung Indonesia secara politik.
4. Pemerintah Indonesia, secara khusus, harus melakukan pendekatan dengan Nauru dan Vanuatu yang selama ini mendukung kemerdekaan Gerakan Papua Merdeka. Pemerintah Indonesia bisa mengundang para tokoh organisasi politik atau organisasi masyarakat, melalui pemerintahnya masing-masing, sehingga terjadi kesepahaman antara kedua negara mengenai posisi dan keadaan di Papua.
5. Pemerintah Indonesia perlu menunjukkan bahwa masalah Papua ini juga termasuk dalam konteks kepentingan negara-negara Barat terutama AS

- (keberadaan PT. Freeport di Timika), untuk mendapat dukungan dari negara adidaya sehingga bisa memberikan pengaruh di forum internasional.
6. Indonesia melakukan lobi kepada negara anggota tetap dewan keamanan PBB agar permasalahan Papua tidak diajukan ke PBB.
 7. Indonesia harus berhati-hati terhadap problem integrasi bangsa yang dihadapi bangsa-bangsa lain. Dalam menyikapi soal integrasi suatu bangsa, Indonesia harus konsisten dan tidak pernah mendukung kekuatan dalam negeri yang ingin merdeka dan melepaskan diri (gerakan separatis) dari negaranya.
 8. Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan Papua Nugini untuk bisa mendapatkan posisi sebagai *observer* khusus dalam ASEAN. Mengingat posisi dan pengaruh Papua Nugini dalam forum Asia Pasifik.
 9. Pemerintah Indonesia harus terus mengikuti dengan seksama setiap pertemuan regional yang diadakan oleh negara-negara di kawasan Pasifik.
 10. Pemerintah Indonesia harus bisa mencegah diri agar tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan (pelanggaran HAM) terhadap rakyat di Papua karena hal ini menjadikan masalah Papua mencuat di dunia internasional.
 11. Pemerintah Indonesia harus terus mengusahakan proses integrasi yang belum tuntas secara ekonomi dan secara sosial di Papua, dengan memperhatikan norma HAM.
 12. Gagasan Otonomi Khusus Papua harus dilihat sebagai salah satu langkah strategis dari dalam untuk mencegah meluasnya upaya separatisme yang digerakkan OPM. Sisa waktu berlakunya Otonomi Khusus harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat Papua. Dalam hal ini, perlu memberdayakan

masyarakat setempat, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dan pembangunan sarana infrastruktur dasar.

13. Pemerintah Indonesia perlu melibatkan pakar-pakar ilmu sosial dalam menangani persoalan ancaman disintegrasi di Papua. Bahkan harus lebih melibatkan tokoh-tokoh Papua dalam posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AFK Organsky, *"The Stages of Political Development,"* New York: Knopt.
- Cameron, David (ed.), *Regionalism and Supra Nationalism*, 1981, Montreal: The Institute for Research on Public Policy.
- Djopari, Jhon RG, *"Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka"*, 1993, Jakarta: PT Gramedia.
- Hadi, Syamsul, et. al, *"Disintegrasi Pasca Orde Baru, Negara Konflik Lokal dan Dinamika International"*, 2006, Jakarta : Center for International Relation Studies FISIP UI.
- Liddle W R (ed), *Crafting Indonesian Democracy*, 2001, Bandung:Mizan.
- May, R.J(ed)., *"Between Two nations:The Indonesian-Papua New Guinea Border and West Papuan Nasionalism"*, 1986, Sydney; Robert Brown and Associates.
- Pigay, Decky Natalis, *"Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua,"* 2005, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sihbudi, Riza, et.al., *"Bara Dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah dan Solusi Atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau"*, 2001, Bandung: Penerbit Mizan.
- Solossa, JP, *"Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI,"* 2006, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sugirman, Supono, *"Analisis Intelijen sebuah Kontemplasi"*, 2009, Jakarta: Centre For the Study of Intelligence and Counterintelligence.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Politik*, 1992, Jakarta: Gramedia.

Jurnal/Artikel:

Aditjondro, George Yunus, "*Bintang Kejora di Tengah Kegelapan Malam: Peggelapan Nasionalisme Orang Irian dalam Historiografi Indonesia*", makalah untuk seminar tentang Nasionalisme Indonesia pada dan Menjelang Abad XXI, yang diselenggarakan oleh Yayasan Mashad, Dhuroruddin dan Ikar Nusa Bakti, "*Berbagai Faktor Separatisme di Irian Jaya*", *Indonesia di Ambang Perpecahan*, Jakarta: LIPI. Bina Darma di Kampus Universitas Kristen Satya Wacana(UKSW), 2-5 Juni 1993.

Ake, Claude, "*A Theory of Political Integration*," dalam *Southeast Asia, The Politics of National Integration*, 1967, Illinois: Dorsey Press..

Carment, David dan Patrick James, "*Escalation of Ethnic Conflict: A Survey and Assesment*," [http-server.carleton.ca/~dcarment/papers/escalati.html](http://server.carleton.ca/~dcarment/papers/escalati.html) diunduh pada 27 Oktober 2010.

Deplu RI, "*Sejarah Kembalinya Papua ke Pangkuan Republik Indonesia*," 1998, Jakarta: Direktorat Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri.

Harris, Stephen V and Collin Brown, "Indonesia, Papua New Guinea and Australia: The Papua Problem of 1984," 1985, *Australia-Asia Paper*, no 29, Center for the Study of Australia-Asia Relations, School of Modern Asian studies, Griffith University, Nathan, Australia.

House of Assembly Debate, Vol. II no. 5 pp. 1346-1442, 25 and 27 June 1969, di kutip dalam Dr. J.R. Verrier, "Is West Papua Another Timor?", *Current Issues Brief*, 1 2000-01, Parliament of Australia, Parliamentary Library.

Ikshanudin, et. Al, "Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Intelijen Negara", 2010, Jakarta: Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Leatherman, Janie, *"Memutus Siklus Kekerasan: Pencegahan Konflik Dalam Krisis Intranegara"*, 2004, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mulherin, Geoff, "Zigzag act over Papua Choices", *The Sydney Morning Herald*, 16 June 2000.
- Raharja, Marga, "Genderang Dukungan dari Lautan Teduh", *Kontan*, No. 12 Tahun V, edisi 11 November 2000.
- Sukarno, Irawan, *"Ancaman Potensial dan Strategi Penangkalan"*, 2004, SESPAPARLU XXX dan SESDILU XXXII.
- Syamsyuddin, Nazzarudin, *Integrasi dan Ketahanan Nasional di Indonesia*, 1994, Jakarta: Lemhanas.
- UNDP, PACNEWS, "Nauru lobbies for West Papua, Taiwan at the UN", PACNEWS 1: Friday September 08, 2000.
- Webster, David, "West Papua: The Next East Timor?" *Peace Magazine*, April 2000.
- Widjajanto, Andi, *"Empat Tahap Resolusi Konflik,"* diakses dari <http://www.tempointeraktif.com>, pada 10 Oktober 2010, pukul 22.30 WIB.
- Wirawan., *"Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian,"* 2010, Salemba Humanika.

Penelitian/Riset:

- Harris, Steven dan Collin Brown, *"Indonesia and Australia: The Papua Border Problem of 1984"*, 1985, *Australia-Asia Papers*, Research Paper no.29, Brisbane: Griffith University.
- Hidayat, Taufik, *"Organisasi Papua Merdeka: Suatu Studi Deskriptif tentang Latar Belakang dan Prospeknya"*, 1987, Skripsi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.

Website

www.gn.ap.org/tapol

<http://www.irja.org/archiaves/2001.txt>

<http://www.moles.org>.

<http://www.tulane.edu>

<http://www.corpwatch.org>

<http://www.american.edu>

<http://www.pasifika.net>.

<http://www.utexas.edu>

<http://www.freedom.frogspacenet>

<http://www.dfa-deplu.go.id>

<http://www.converge.org.nz>

<http://www.wetpapua.net/FOREIGN/pacific.htm>

Lain-lain

Papua Could Follow Timor Way," *The Age*, 9 November 2000.

Kompas, 25 Maret 2000

Separatist flags in Papua to be Lowered after Dec.1", *The Jakarta Post*, 10 November 2000.

"Papua Liberation Forces Disbanded", *The Indonesian Observer*, 13 december 2000

"Police Arrest Chief of Papua Council", *The Jakarta Post*, 28 November 2000

"Keinginan Merdeka Rakyat Papua Akan Dibawa ke PBB", *Kompas*, 4 Juni 2000.

"Pertemuan Tokoh Pejuang Papua Merdeka di Vanuatu", *Kompas*, 28 Juli 2000

"Irianese Leaders Seeks Special Autonomy ",*The Jakarta Post*, 25 Juli 2000.

Pertemuan Tokoh Pejuang Papua Merdeka di Vanuatu. "*Kompas*, 28 Juli 2000.

"PNG Dukung Perjuangan Damai," *Kompas*, 3 Mei 2000.

"Forum Menteri RI-Australia, Australia Dukung Kedaulatan RI" *Kompas*, 9 Desember 2000.

Pasific News Bulletin, December 1999, h.3.

Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: No.3), hal. 1484-1488.

Pasific News Bulletin, December 1999, h. 3.

Senate, Debates, 23 November 1999, h. 10423.

Agreement Between The Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands Concerning West New Guinea (West Irian)", sign at the Headquarters of the United Nations, New York, on 15 August 1962.

Media Release yang dikeluarkan oleh Pasifik Concerns Resource Centre (PCRC) Forum Pasifik Selatan, 27 Oktober 2000

"Joint Statement by the Prime Minister of Papua New Guinea and the Vice-President of the Republic of Indonesia," Deplu RI, 2000.